



Edisi 106 TH. XLIII, 2013

Parlementaria

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEMBALIKAN KEDAULATAN ENERGI NASIONAL



ISSN 1979-5912



9 771979 591288

Parlementaria

PENGAWAS UMUM:

Pimpinan DPR-RI

**PENANGGUNG JAWAB/
KETUA PENGARAH:**

Dr. Winantuningtyastiti, M. Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH:

Achmad Djuned SH, M.Hum
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

PIMPINAN PELAKSANA:

Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si.
(Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI:

Dadang Prayitna, S.IP. M.H.
(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI:

Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan),
Medianoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR:

Sugeng Irianto, S.Sos
M. Ibnur Khalid
Iwan Armanias

SEKRETARIS REDAKSI:

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI:

Nita Juwita, S.Sos
Supriyanto
Agung Sulistiono, SH

PENANGGUNGJAWAB FOTO:

Eka Hindra

FOTOGRAFER:

Rizka Arinindya

SEKRETARIAT REDAKSI:

I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI:

Abdul Kodir, SH

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II
Gedung Nusantara III DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350
Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com;
www.dpr.go.id/berita



PENGANTAR REDAKSI

Persoalan energi selalu menarik untuk diperbincangkan, pasalnya energi sangat terkait dengan kebutuhan hidup manusia. Begitu harga energi khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) bergejolak, pikiran dan energi kita seolah terkuras membahas permasalahan tersebut.

Parlementaria Edisi 106 mengambil tema utama masalah kedaulatan energi terkait dengan pembahasan Revisi UU Migas yang tengah ditangani Komisi VII DPR. Revisi UU tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan kedaulatan energy di Indonesia.

Berbicara masalah energi tidak bisa lepas dari teknologi dan ketergantungan dengan pihak asing. Karena itu DPR telah mengusulkan kepada pemerintah agar jangan memberikan ruang terlalu banyak bagi asing untuk mengatur kita. “ Kita harus berdaulat di bidang energi di negeri kita sendiri,” tandas Wakil ketua DPR Pramono Anung.

Berbagai riset terhadap energi alternatif apapun pilihannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan diputuskan secara politik. Sering kita selalu mengikuti tren-tren yang ada, tetapi lemah diimplementasi. Pramono yakin kalau kita berani mengambil kebijakan misalnya kelapa sawit untuk produk unggulan energi alternatif,

maka kita tidak akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan energi nasional.

Anggota Komisi VII DPR Ismayatun menambahkan, revisi UU Migas menjadi tolak ukur perubahan tata kelola migas menuju kedaulatan energi Indonesia. Melalui revisi UU ini DPR diharapkan mampu menampung seluruh masukan dari *stake holder* dan memerhatikan putusan Uji materi MK, serta diharapkan masyarakat akan menikmati hasil migas tanah air kita sendiri.

Laporan dari tiga tugas pokok DPR disajikan masalah stabilisasi rupiah dan Revitalisasi LP (rubrik pengawasan), masih minimnya anggaran kesehatan (rubrik anggaran) dan bidang legislasi diturunkan laporan RUU tentang Radio, Televisi Republik Indonesia dan RUU tentang Jasa Konstruksi.

Sedangkan dalam rubrik sorotan, diturunkan laporan mengenai melambungnya harga kedelai. Bahan baku utama tempe sebagai makanan khas Indonesia ini menjadi primadona berita beberapa pekan lalu. Kita semua berharap melambungnya harga komoditas ini segera ada solusi yang komprehensif sehingga bahan baku makanan rakyat yang cukup bergizi ini bisa kembali tersedia dengan mudah dan murah.

Kini Majalah dan Buletin Parlementaria hadir lebih dekat dengan Anda.

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
Loby Gedung Setjen DPR RI
Ruang Loby Ketua
Ruang Loby Wakil Ketua
Ruang Yankes

Terminal 1 dan 2
Bandara Soekarno Hatta



Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.

KEMBALIKAN KEDAULATAN ENERGI NASIONAL MELALUI REVISI UU MIGAS.

Kedaulatan energi tengah menjadi isu sentral di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Berbicara energi memang tidak terlepas dari sistem tata kelola sesuai UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang banyak mendapat kritikan dari para ahli karena bertentangan dengan UUD 1945.



Ramah menyapa. Tenang dan penuh kharisma. Saat Parlementaria menemuinya, ia menyambut dengan sangat baik. Inilah Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Sosoknya tampak bersahaja dan religius. Bicaranya berwawasan penuh keilmuwan. Bahkan, keteduhan jiwanya membuat nyaman semua orang yang diajak bicara.



PERSOALAN LAPAS, IBARAT BENANG KUSUT

Dalam kunjungan ke Lapas Cilodong dan Pondok Rajek, Bogor anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono menyaksikan sendiri betapa padatnya ruangan 3x5 berjeruji besi itu. 5 tempat tidur tingkat yang tersedia di ruangan itu seharusnya digunakan oleh 10 orang narapidana. Tetapi fakta yang dilihatnya ada 30 orang disitu.



DAFTAR ISI

PESAN PIMPINAN	8
Kemandirian Inovasi Dan Iptek Bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional	
PROLOG	12
Kembalikan Kedaulatan Energi Nasional Melalui Revisi UU Migas.	
LAPORAN UTAMA	16
Jangan Berikan Ruang Terlalu Banyak Asing Mengatur Kita.	
SUMBANG SARAN	26
Pengelolaan Politik Energi ke Depan	
PENGAWASAN	29
Persoalan Lapas, Ibarat Benang Kusut	
Akankah Rupiah Terus Melemah?	32
ANGGARAN	35
Anggaran Kesehatan Belum Penuhi Amanat Undang-undang	
LEGISLASI	38
Ruu RTRI, Obat Kuat Lembaga Penyiaran Publik	
Perubahan Uu Jasa Konstruksi, Kebutuhan Yang Tak Bisa Ditunda-Tunda	40
FOTO BERITA	42
KIAT SEHAT	45
Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah	
PROFIL	48
Agus Gumiwang Kartasasmita Politisi Muda yang Bersahaja	
KUNJUNGAN KERJA	56
SOROTAN	64
Pemerintah Tidak Serius Wujudkan Swasembada Pangan	
SELEBRITIS	71
Rachel Amanda Aurora Deg-degan Nyoblos Pertama Kali	
PERNIK	75
Partogi Nainggolan, Profesor Riset Pertama Setjen DPR	
POJOK PARLE	78
Warna Warni Rapat Tim Pengawas Bank Century	

Diskriminasi Hukum terhadap Penyidikan Kasus Pemasangan Liar Sambungan Air Minum

Surat dari Karyawan dan Karyawati PDAM Way Rilau Bandar Lampung, yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI, yang mempertanyakan tindak lanjut dari penyidikan yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terhadap masalah pemasangan liar kurang lebih 1.000 sambungan air minum Tahun 2008/2009 oleh para oknum karyawan PDAM Way Rilau Bandar Lampung yang telah merugikan negara sebesar kurang lebih Rp 2 miliar dan telah ditetapkannya para tersangka atas kasus tersebut oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Menurut pelapor, telah terjadi diskriminasi hukum atas penyidikan kasus tersebut, karena

hanya pelaksana lapangan yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bandar Lampung, sedangkan masih banyak oknum karyawan yang belum diperiksa, bahkan aktor dibalik masalah tersebut tidak pernah tersentuh oleh hukum sebab yang bersangkutan mempunyai uang untuk melakukan kolusi dengan oknum-oknum Jaksa di Kejari Bandar Lampung.

Pelapor memohon tindak lanjut atas masalah tersebut dengan tidak berpihak pada oknum yang mempunyai uang demi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat masalah tersebut sudah beberapa tahun belum dituntaskan.

Mohon Bantuan Untuk Penyelesaian Sengketa Lahan

Surat dari Sdr. Sukriansyah, dkk., tentang permohonan penyelesaian sengketa lahan perkebunan antara masyarakat Desa Samba Danum dan Rantau Asem dengan PT Karya Dewi Putra (PT KDP) yang beroperasi di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena sampai saat ini belum ada penyelesaian.

Pelapor telah menggarap lahan tersebut sejak Tahun 1990 dan telah mempunyai Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei pada tanggal 25 November 2011. Pelapor menyampaikan, bahwa kebun karet sejumlah 3.000 pohon yang sudah panen dan rumah tempat peristirahatan digusur rata dengan tanah oleh PT KDP.

Pelapor mengadakan permasalahan tersebut kepada Presiden berdasarkan surat tanggal 28 Februari 2013 dan telah mendapatkan tanggapan dari Plh. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kemensekneg RI pada tanggal 1 April 2013, yang intinya meminta Bupati Katingan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan hal ini dilaksanakan pertemuan dengan kepada Bupati Katingan dan Gubernur Kalimantan Tengah pada bulan April 2013, namun tidak mendapatkan penyelesaian seperti yang diharapkan oleh pelapor.

Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan diteruskan kepada Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan dan perkebunan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan.

Pengaduan tentang Tindak Pidana Korupsi

Surat dari Sdr. H. Remad M. selaku Ketua Kelompok Tani Maju Jaya (KTMJ), tentang tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak, serta tindak pidana perbankan terkait dengan pemberian kredit oleh Bank BNI 46 Cabang Jambi kepada Pengurus KUD Akso Dano senilai Rp. 23,746. miliar.

Bahwa sejak terbentuknya pengurus KTMJ yang baru pada tanggal 25 Maret 2013 pelapor ingin mengetahui perkembangan atau tindak lanjut atas surat pengaduan sebelumnya yang disampaikan melalui kuasa hukum pelapor, yaitu Graziano Pattiasina dan Patners kepada Kejaksaan Agung, Kapolri, Gubernur BI dan Komisi III DPR RI berdasarkan surat No. 16/GP dan P/V/2011 tanggal 9 Mei 2011.

Melaporkan bahwa KTMJ tidak pernah mendapat Sisa Hasil Usaha yang diperoleh KUD Akso Dano selama kurang lebih 15 tahun (Desember 1995 – Maret 2011) dan belum

pernah ada pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana pinjaman sebesar Rp. 34.007.233.489 tersebut kepada KTMJ.

Pelapor menduga telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak serta tindak pidana perbankan antara Pengurus KUD Akso Dano, PT Kirana Sekernan dan Bank BNI 46 Cabang Jambi. Pengurus KTMJ telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Polda Jambi berdasarkan laporan No. LP/B-37/VI/2004/ Ro.Os tanggal 29 Juni 2004 dengan terlapor Ir. Joko Minto Cahyono.

Pelapor memohon Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Anggota KTMJ yang sebagian anggotanya adalah pensiunan Anggota Polri dan TNI dapat menikmati hasil jerih payahnya.

Penyampaian Aspirasi dan Permohonan Penghentian Upaya Eksploitasi

Surat dari Sdr. A.Sitohang, SH, dkk. atas nama Lembaga Bantuan Hukum Ondo Bina, yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI, perihal permohonan dilakukan pengusutan atas pengrusakan sawah dan ladang masyarakat di Desa Sigara-Gara Patumak, Sumatera Utara milik Sdr. Muhammad Jhoni Hendro Sembiring yang diduga dilakukan dan didalangi oleh oknum pengusaha galian C yang bernama Kasianto.

Pelapor menyatakan bahwa usaha galian C oleh Sdr. Kasianto dilakukan secara ilegal karena tidak memiliki izin dari instansi terkait, sehingga diduga merugikan masyarakat dan

negara bernilai miliaran rupiah selama 10 tahun beroperasi. Lebih lanjut pelapor meminta agar kegiatan usaha tersebut dihentikan, namun tidak dihiraukan.

Pelapor memohon kepada Komisi III DPR RI segera mengambil langkah kebijakan yang efektif untuk mencegah potensi kerusakan massa yang berlanjut di desa tersebut dan menegakkan keadilan dengan menghukum tindakan oknum Sdr. Kasianto beserta kelompoknya untuk tidak lagi meneruskan upaya eksploitasi lahan yang telah merugikan pihak lain.

KEMANDIRIAN INOVASI DAN IPTEK BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OLEH DR. MARZUKI ALIE

Tolak ukur kemajuan suatu bangsa era modern saat ini adalah inovasi dalam sains (ilmu pengetahuan) dan teknologi (lptek). Namun demikian, menempatkan lptek dalam kehidupan manusia, harus ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Bukan sebaliknya, jika kemajuan sains dan teknologi tidak dimaknai dengan benar, maka tidak akan ada kemaslahatan yang didapatkan melalui lptek. Lptek untuk kemaslahatan, kemudahan dan kesejahteraan manusia, antara lain dilihat dari daya dukung lptek terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Inovasi lptek harus mandiri, guna mendukung perekonomian nasional.

Makna Kemandirian

Kemandirian suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola masalah-masalah internal tanpa campur tangan bangsa asing, dan mampu berperan aktif di kancah pergaulan antar-bangsa berdasar prinsip-prinsip kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Artinya, kemandirian nasional memiliki dua dimensi: internal dan eksternal.

Dimensi internal, yaitu apabila proses penyelenggaraan bernegara diarahkan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa sendiri dan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara berdaulat. Kekuatan ekonomi, politik, sumberdaya alam, sosial, budaya, dan pertahanan yang menopang sendi-sendi kehidupan bernegara, seyogyanya diarahkan untuk memajukan manusia Indonesia yang seutuhnya, sesuai dengan pencapaian yang diharapkan oleh UUD 1945.

Namun demikian, pada *dimensi eksternal*, kemandirian bukan berarti kita tidak membutuhkan bangsa lain. Namun, menyadari bahwa kita hidup dalam suatu sistem global yang saling bergantung dan berkaitan satu sama lain. Semangat kompetisi dengan bangsa lain selalu ada.



Intinya adalah, kekuatan internal bangsa akan sangat menentukan posisi dalam pergaulan internasional. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu menyejajarkan dirinya di hadapan bangsa-bangsa lain, meskipun kemandirian sangat ditentukan oleh kemajuan peradaban, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah telah membuktikan bahwa kemandirian suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inovasi dan Iptek

Dalam konteks kekinian, kemajuan lptek lebih dominan diterapkan dalam dunia bisnis. Akibatnya, daya-saing perusahaan juga sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mentransformasikan teknologi menjadi *value creation*, yang pada gilirannya sangat menentukan perkembangan perusahaan.

Penguasaan lptek berkembang menjadi faktor penentu daya saing. Kompetisi tidak saja dilandasi oleh kemampuan memproduksi barang dan jasa secara lebih murah, namun memiliki dimensi yang lebih luas, terutama dalam hal kualitas dan manfaat yang dirasakan penggunaannya. Lebih dari itu, laku-tidaknya produk di pasaran dan kesetiaan klien banyak ditentukan oleh inovasi pada faktor-faktor emosional, seperti warna, bentuk, dan pelayanan yang lebih mengutamakan kepuasan pembeli. Perkembangan produk TI sangat cepat dibandingkan dengan produk TI karena pada dasarnya dunia TI cepat melakukan inovasi, sehingga selalu saja ada fitur-fitur baru yang akan memanjakan penggunaannya.

Sebenarnya secara agregat, daya saing perusahaan akan turut menentukan daya saing ekonomi nasional, yaitu kemampuan bangsa

dalam menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif dalam era persaingan global. Hingga pada akhirnya, diharapkan langkah menuju kemandirian nasional akan segera terwujud.

Kemandirian nasional berasal dari inovasi, dan inovasi berakar pada riset. Proses riset ini dilakukan oleh para *interpreneur*. Karena, pada dasarnya inovasi berangkat dari dua landasan pikir: selalu ada cara yang lebih baik, dan selalu ada cara baru (unik). Meski demikian para *interpreneur* harus memiliki semangat *interpreneurship*, yaitu *pertama* inovasi, *kedua* pengambilan risiko yang terkalkulasi, dan *ketiga* kreativitas. Keberhasilan seringkali diraih dari kemampuan untuk melakukan hal yang berbeda secara lebih cepat dan lebih baik daripada kompetitor. Disinilah makna penting sebuah inovasi.

Disamping itu, secara ekonomi, perkembangan dan inovasi dalam dunia Iptek akan memiliki beberapa dampak. Seperti, mendorong efisiensi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kapasitas produktif, terciptanya barang dan jasa yang lebih berkualitas, dan terciptanya sumber-sumber pertumbuhan baru melalui inovasi. Hal ini mengartikan bahwa perkembangan Iptek tidak hanya berpengaruh secara internal di dalam satu sektor saja, tapi juga mempengaruhi pengembangan sektor lainnya. Dengan kata lain, inovasi juga dapat menciptakan *multiplier effect* yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Inovasi dan Iptek dengan Pembangunan Ekonomi

Dalam kerangka hukum yang lebih sektoral, kaitan agenda kemandirian inovasi dan Iptek dapat kita rujuk pada UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. UU ini menegaskan bahwa pengelolaan penelitian dan pengembangan Iptek, diarahkan untuk memperkuat

daya dukung Iptek untuk mencapai tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional. Disinilah titik irisan kepentingan antara penguatan inovasi, pengembangan Iptek dan teknologi dengan pembangunan ekonomi, ditemukan.

Dari sudut pandang ekonomi, alat ukur konvensional untuk menilai peran inovasi dan Iptek terhadap *output* dikenal dengan konsepsi *total-factor productivity* (TFP), atau juga sering disebut *multi-factor productivity*. TFP diartikan sebagai variabel yang memperhitungkan setiap hal yang berpengaruh terhadap besaran *output* total yang tidak disebabkan oleh sederetan input yang diukur secara tradisional seperti tenaga kerja dan modal. Jika semua input diperhitungkan, TFP dapat dianggap sebagai ukuran sebuah perubahan teknologi jangka panjang sebuah perekonomian atau dinamika teknologi.

Indonesia telah tumbuh menjadi negara dengan tingkat perekonomian yang berpendapatan menengah. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh struktur industri yang sifatnya belum *intensive-technology* dan impor produk teknologi tinggi masih melampaui produk yang diekspor. Peningkatan TFP memang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi tingkat pertumbuhan TFP lebih masih cukup rendah.

Sumber: OECD, 2013.

Dengan kata lain, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah dikembangkan, tetapi belum banyak yang terserap dalam bidang pembangunan ekonomi. Situasi seperti ini menguatkan sebuah adagium bahwa Indonesia berada dalam situasi di mana terjadi fenomena ketidakpaduan (*mismatch*) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya.

Indonesia adalah sebuah perekonomian yang sangat dinamis, dan kini sedang berperan dalam kancah panggung politik dan ekonomi internasional, sebagai contoh, melalui keanggotaannya di G-20 dan peran aktifnya di ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian Indonesia dapat dikatakan selalu positif dan potensinya ke depan tetap tinggi. Hal ini menjadi penting seiring dengan lahirnya Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI sangat signifikan dan memiliki misi yang strategis.

Sebagaimana diketahui, MP3EI untuk periode pembangunan 2011-2025, bertujuan untuk mengkokohkan posisi Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar secara global pada tahun 2025. Pilar pertama MP3EI adalah pembangunan enam koridor ekonomi regional melalui investasi dalam sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi dan terkait dengan keunggulan komparatif masing-masing koridor. Pilar ke-2 dan ke-3 antara lain yakni meningkatkan konektivitas dan memperkuat SDM dan Iptek.

Sejalan dengan paradigma bahwa inovasi dan Iptek menjadi komponen utama mesin pertumbuhan ekonomi nasional, peran pengembangan inovasi dan Iptek menjadi sangat fundamental dalam mewujudkan agenda MP3EI dan pembangunan ekonomi nasional secara umum. Pertanyaannya, pengembangan inovasi dan Iptek seperti apa yang berperan dalam menopang pembangunan ekonomi secara kokoh ke depan?

Sejumlah parameter normatif dapat kita sebutkan, misalnya bahwa inovasi dan Iptek itu harus berkualitas, relevan terhadap kebutuhan nasional, relevan terhadap tren global, dan memiliki keterkaitan dengan pasar teknologi lokal dan internasional. Faktor kemandirian menjadi variabel yang turut menentukan bagi tercapainya bauran



parameter pengembangan inovasi dan Iptek. Oleh karena bagaimana memadukan semua unsur bauran parameter tersebut bagi tercapainya pembangunan ekonomi nasional yang sifatnya padat teknologi, menjadi pekerjaan besar kita, dalam menyongsong rencana pembangunan jangka panjang nasional pada tahun 2025. Dalam kerangka inilah, sinergitas politik pembangunan dengan politik pengembangan inovasi dan

Iptek perlu menjadi sebuah keniscayaan.

Politik Kemandirian Inovasi dan Pengembangan Iptek

Konsitusi negara telah memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kemandirian inovasi dan Iptek. Dalam masa Orde Baru, GBHN memberikan landasan haluan bagi setiap tahapan rencana

pembangunan nasional. Memasuki era reformasi, politik kemandirian pengembangan inovasi dan Iptek dikukuhkan dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2002 yang diperkuat dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2004-2025.

Dalam konstelasi politik global dewasa ini, globalisasi ekonomi semakin memperkuat lahirnya sebuah rezim ekonomi global yang

tidak kunjung bersifat inklusif dan adil bagi semua negara khususnya negara-negara berkembang di satu sisi. Namun demikian, pada saat yang sama, globalisasi ekonomi juga menawarkan peluang manfaat ekonomis yang bisa diraih semua bangsa. Dalam pemikiran seperti ini, pengembangan inovasi dan penguasaan iptek yang bersifat mandiri, menjadi agenda nasional setiap bangsa.

Bagaimana agenda kemandirian inovasi dan iptek harus didorong? Saya melihat kuncinya berada pada penguatan kemauan politik negara dalam menentukan politik kemandirian inovasi dan iptek ke depan. Ruang yang bisa dikelola oleh negara dalam koridor ini bisa dilihat dari beberapa hal:

Pertama, politik alokasi belanja publik untuk kegiatan yang mendukung bagi pengembangan inovasi dan iptek. Selama periode 1987-1997, tercatat hanya terdapat 182 ilmuwan dan insinyur dari setiap satu juta penduduk yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan (R&D), dengan total belanja APBN hanya 0,07% dari PDB. Angka ini turun menjadi 0,05% s.d. tahun 2005 dan hanya sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,06% pada tahun 2006 dan menjadi 0,08% dari PDB pada tahun 2010. Jumlah ini kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Kamboja sebesar 0,05% pada tahun 2002 dan sangat kecil jika dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 2,2 % pada tahun 2009, Malaysia 0,64% pada tahun 2006 atau 0,82% pada tahun 2008, dan Vietnam 0,19% (2002), Thailand 0,21 (2007).

Kedua, perlunya "realokasi" peruntukkan anggaran pendidikan untuk kegiatan pengembangan inovasi dan pengembangan iptek. Belanja pemerintah terhadap R&D hanya dalam kisaran 84,5% dari semua belanja R&D secara nasional dalam kurun waktu 2001-2006 (Papliptek, LIPI, 2009a). Sementara itu, alokasi APBN untuk pengembangan iptek termasuk di dalamnya semua

kegiatan pengembangan iptek dan R&D di semua lembaga riset di kementerian dan lembaga, statistik dan kegiatan sejenisnya, mengalami penurunan dalam kurun waktu 35 tahun terakhir. Pada tahun 1970-an nilainya masih di kisaran 6,1% dan angkanya terus terjun bebas menjadi 2,34% pada tahun 1991 dan menjadi 0,49% pada tahun 2006. Anggaran untuk R&D sendiri tercatat hanya pada kisaran 0,74 pada tahun 1994 dan turun menjadi 0,42% pada tahun 2006.

Ketiga, penguatan sinergitas antar-semua komponen pemangku kepentingan. Seperti kita ketahui bahwa salah satu persoalan mendasar lemahnya kemandirian inovasi dan pengembangan iptek adalah belum terjadinya sinergi yang kuat dan saling menguatkan antar-aktor utama sistem inovasi nasional, yakni: (1) pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator, (2) pelaku usaha sebagai pengguna hasil dan produk inovasi dan (3) lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk inovasi.

Dalam konteks kekiniaan, pelebaran sinergitas dengan komponen anak bangsa lainnya juga berpotensi berperan dalam melaksanakan misi ini. Sebagai contoh, pelembagaan konferensi diaspora Indonesia baru-baru ini sedikit banyak dapat membawa implikasi bagi terjadinya sebuah jalinan sinergitas dalam mendukung proses pengembangan inovasi dan iptek yang lebih mandiri.

Peran Parlemen: Catatan Penutup

Agenda pengembangan inovasi dan iptek yang mandiri secara nasional menjadi misi negara yang sangat strategis baik secara politis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Mewakili lembaga parlemen, ijinlah saya menggarisbawahi beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, sebagai lembaga peng-

ambil keputusan penting negara, melalui tugas dan fungsinya DPR RI memberikan komitmen politik penuh dalam mendorong dan mengawal pemerintah untuk melakukan upaya terobosan politik dalam rangka menguatkan kemandirian inovasi dan pengembangan iptek ke depan. Melalui fungsi legislasi, DPR RI mendorong semua komponen pemangku kepentingan untuk menyempurnakan kerangka hukum yang ada. Dalam konteks inilah, lembaga DPR RI memberikan ruang publik yang luas dalam proses revisi peraturan perundang-undangan terkait. Hal yang sama dalam kerangka fungsi anggaran, khususnya dalam penentuan disain politik anggaran untuk pengembangan kemandirian inovasi dan iptek yang lebih proporsional.

Kedua, kita perlu memberikan kemauan politik yang kuat dalam urusan pengembangan inovasi dan iptek secara mandiri dalam rangka menopang agenda pembangunan jangka panjang, MP3EI dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada beberapa dekade ke depan. Untuk itu, optimalisasi pendayagunaan segenap sumberdaya dan penguatan kualitas SDM secara nasional harus kita perkokoh berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta berkelanjutan dan demokratis. Dalam kerangka ini, penyatuan energi nasional dalam menyelesaikan agenda RPJP I periode 2004-2025 dan menyiapkan agenda RPJP II periode 2026-2050 mutlak diperlukan.

Ketiga, mendorong penguatan sinergitas ketiga aktor utama dalam pengembangan kemandirian inovasi dan iptek, yakni pemerintah, dunia industri dan lembaga penelitian/perguruan tinggi sehingga hasil kemandirian inovasi dan iptek benar-benar semakin memperkokoh daya saing perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Melalui tugas dan fungsinya, DPR RI siap memberikan dukungan politiknya untuk mencapai misi startegis ini ke depan.*



KEMBALIKAN KEDAULATAN ENERGI NASIONAL, MELALUI REVISI UU MIGAS

Kedaulatan energi tengah menjadi isu sentral di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Berbicara energi memang tidak terlepas dari sistem tata kelola sesuai UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang banyak mendapat kritikan dari para ahli karena bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagian besar pakar perminyakan menganggap UU No. 22 tahun 2001 awal munculnya legalisasi liberalisasi migas di Indonesia dan merugikan secara finansial. Karena, potensi penerimaan negara dari sektor migas baik hulu dan hilir banyak tersedot oleh para pemburu rente yang bersekongkol dengan pejabat

pemegang otoritas, terbukti tertangkapnya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK karena menerima suap miliaran Rupiah.

Berbicara liberalisasi migas di Indonesia sejatinya telah terjadi semenjak Orde Baru, ditandai kedatangan investor asing yang mengeksplorasi Sumber Daya

Alam (SDA), praktek liberalisasi juga dilakukan dalam pertambangan dan pengilangan minyak, dan semakin membabi buta ketika disahkannya UU Migas No. 22 tahun 2001

Sebagai konsekuensi pengesahan UU 22/2001 adalah perlu dibentuknya Badan Pelaksana (dibentuk BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir (dibentuk BPH Migas) serta perubahan bentuk Pertamina menjadi Persero. Pertamina bukan lagi sebagai perusahaan pengelola dan pemegang kuasa pertambangan. Dalam kegiatan hulu Pertamina akan menjadi perusahaan yang diberlakukan seperti perusahaan-perusahaan kontraktor. Dan akhirnya Pertamina juga menandatangani KKKS dengan BP Migas pada tanggal 17 September 2005.

Badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu BP Migas dibentuk pada tanggal 16 Juli 2002 berperan sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia BP Migas berwenang sebagai wakil pemerintah untuk mengatur masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan kontrak kerja sama yang sebelumnya dikerjakan oleh Pertamina.

Kemudian pada, tanggal 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membubarkan BP Migas karena dinilai sangat bernuansa kepentingan kapitalis. MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. Putusan MK itu berawal dari pengajuan *Judicial Review* oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk di antaranya Hizbut Tahrir Indonesia.



Anggota Komisi VII DPR RI, Ismayatun.

Tolak Ukur

Revisi UU Migas menjadi tolak ukur perubahan tata kelola migas menuju kedaulatan energi Indonesia, karena melalui revisi ini diharapkan DPR mampu menampung seluruh masukan dari para *stakeholder*. "Revisi UU Migas sekarang sudah masuk tingkat Panja dan sudah bertemu dengan para civitas akademika," kata anggota DPR Ismayatun dari PDIP kepada Parlemenaria.

Menurutnya, revisi ini akan memperhatikan hasil *Judicial Review* dari MK terkait pasal yang dihilangkan.





"Nanti kita juga ingin membuat badan yang berbeda dan kita semua tidak ingin masyarakat tidak dapat menikmati hasil dari migas ini," katanya.

Nantinya, lanjut Ismayatun, DPR ingin ada suatu badan yang dibentuk terkait penguasaan migas Indonesia. Selain itu, adanya usulan mengenai pembentukan *petroleum fund* (dana migas). "Kita juga ingin BUMN kita memiliki hak atau kesempatan seperti Pertamina melakukan eksplorasi ladang-ladang kita. Selain itu, jika tidak sanggup dia bisa bekerjasama dengan BUMN lainnya," ujarnya.

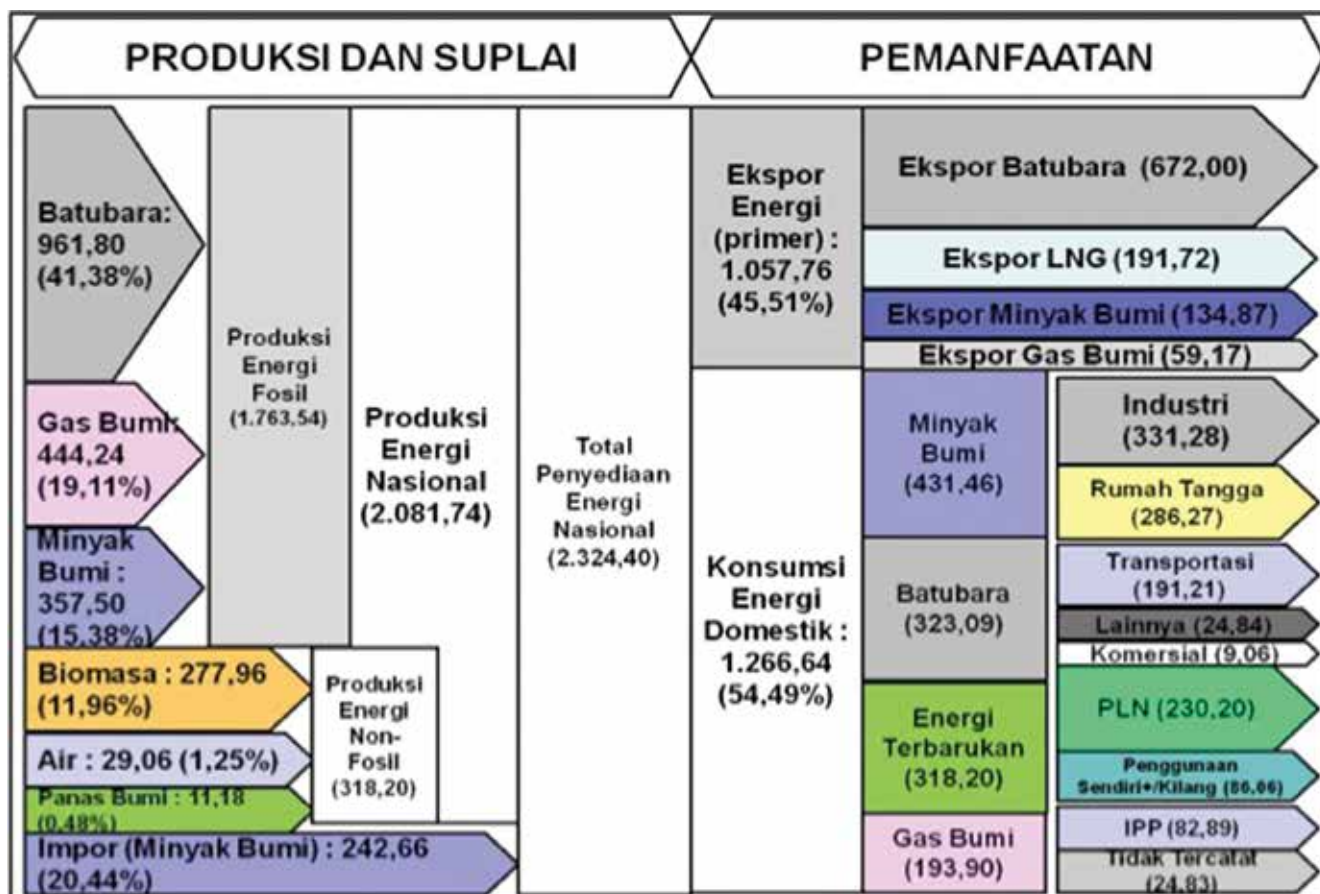
Dia menegaskan, kontrak yang sedang berlangsung sebaiknya segera dikembalikan kepada BUMN agar segera dikelola untuk kepentingan bangsa Indonesia.

"Jangan mau kita diperdaya oleh orang asing, sudah cukup, tidak ada alasan teknologi kita tidak mampu, karena banyak ahli kita yang bekerja di perusahaan migas asing.

Pemerintah, harapnya, harus memiliki ketegasan dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan tidak mengedepankan egoisme sektoral. "Sektor energi ini sangat vital bagi bangsa dan negara kita," katanya. Di sisi lain, Ismayatun menilai masih minim peran pemerintah dalam memanfaatkan energi baru dan terbarukan padahal, anggaran yang tersedia cukup besar.

Diakuinya, memang masih banyak masalah terkait energi panas bumi, pasalnya banyak berada di hutan lindung sehingga sulit untuk mengeksplorasinya. "Kita

ARUS ENERGI TOTAL (JUTA SBM)



harapkan juga jangan sampai ada tarik menarik, untuk Geothermal memang tidak bisa diekspor tetapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.

Kontrak Karya

Lelang kontrak Wilayah Kerja (WK) dan perpanjangan kontrak semuanya banyak dimanfaatkan oleh asing untuk menguasai migas di Indonesia. Di hulu saat ini sebanyak 85 persen eksploitasi minyak nasional dikuasai perusahaan asing seperti Chevron, Exxon, Total, Petrochina.

Lelang kontrak wilayah kerja (WK) dan perpanjangan kontrak semuanya dimanfaatkan oleh asing untuk menguasai migas di Indonesia.

Saat ini sumbangsih di sektor Migas bagi APBN hampir 30 persen karena itu perlu dikelola sebaik mungkin demi kepentingan bangsa dan negara kita. "Kita sepakat bahwa peran Pertamina harus diperkuat caranya dalam

setiap penawaran wilayah kerja baru sebelum ditawarkan Pertamina bebas untuk memilihnya, jika telah memilih Pemerintah harus memberikan jangan terjadi lagi kalah tender seperti di Papua," tegas anggota DPR dari Komisi VII DPR Bobby Adityo Rizaldi dari Partai Golkar.

Seperti kita ketahui, Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Selain itu Pertamina selama ini telah menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik dan dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi dengan pengalaman lebih dari 55 tahun,

Diharapkan nantinya, setelah revisi UU Migas, Pertamina akan semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir sehingga Pertamina banyak berperan aktif dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. (TIM PARLE) Foto: iwan armanias/sugeng/parle.



JANGAN BERIKAN RUANG TERLALU BANYAK ASING MENGATUR KITA

Gemah Ripah Loh Jinawi, ungkapan bahasa Jawa yang sudah sangat dikenal digunakan untuk menggambarkan kemakmuran dan kesuburan bumi pertiwi. Ungkapan tersebut tentu bukan tanpa maksud, dari Sabang sampai Merauke, negara kita kaya akan sumber daya alamnya, baik emas, permata, batu bara, timah dan minyak serta gas bumi.

Ungkapan tersebut seolah berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Harga minyak dunia yang terus merangkak naik mengakibatkan negara kita menjadi kelabakan untuk memenuhi kebutuhan migas di dalam negeri.

Konon, Pertamina yang dalam hal ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar enam puluh persen kebutuhan BBM nasional, sementara sisanya harus di impor dari luar negeri. Bahkan lebih ironis lagi, ketika kekayaan yang telah dianugerahkan oleh Sang Khalik kepada Ibu Pertiwi ini dieksplorasi

oleh perusahaan multinasional asing untuk dijual ke luar negeri, padahal di saat bersamaan bangsa kita tengah membutuhkan untuk konsumsi dalam negeri. Mengenai hal tersebut, kepada Parlemenaria, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menuturkan.

Sebenarnya yang dikuasai oleh as-

ing itu bukan migasnya, melainkan hanya kontraktornya. Dimana sebagian besar masih dipegang oleh Pertamina dan dimiliki oleh negara. Namun tidak dapat dipungkiri asing yang bercokol di sektor migas ini dari dulu dan akan bertahan terus selama tidak ada keinginan dari Pemerintah untuk mendorong adanya perubahan operator ataupun juga perubahan kepemilikan dan sebagainya. Karena pertanyaannya adalah apakah Pertamina sudah mendevlop ladang-ladang ataupun minyak-minyak yang kita miliki.

Saat ini teknologi tentang perminyakan bukan teknologi yang canggih karena teknologinya hanya begitu saja. Indonesia mampu untuk mendevlop dan sekarang Pertamina sudah menjadi *worldclass* atau kemampuannya sudah diakui dunia.

Saat ini teknologi tentang perminyakan bukan teknologi yang canggih karena teknologinya hanya begitu saja. Indonesia mampu untuk mendevlop dan sekarang Pertamina sudah menjadi *worldclass* atau kemampuannya sudah diakui dunia.

Saya tidak sependapat dengan anggapan bahwa perkembangan migas Indonesia berada dalam posisi jalan di tempat. Hanya saja, sumur-sumur baru dalam cadangan yang cukup besar jarang kita *develop* sendiri. Saya berharap agar Indonesia bisa melakukan pengeboran sumur-sumur baru agar bisa meningkatkan *lifting* migas Indonesia.

Saya tidak sependapat jika ada anggapan bahwa hampir sembilan puluh lima persen migas kita dikuasai asing. Sebenarnya namanya bagi hasil mayoritas itu sebenarnya buat negara, sisanya asing. Berapa

besar persentase untuk asing? itu tergantung bagaimana kontrak tersebut dibuat, berapa *production sharing*-nya. Bicara tentang *production sharing*, memang sejak dulu ketika kita belum mempunyai kemampuan mendevlop kontraktor-kontraktor asing mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Mereka tentu tidak mau memberikan kepada kontraktor lokal.

Meski begitu, tidak benar jika kontraktor asing tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini *developer* bersama dan mayoritas untuk kita. Asing tidak boleh mendominasi seakan-akan dia yang bisa, karena *lokal partner* baik Pertamina maupun kontraktor-kontraktor sudah banyak yang bisa, Pertamina harusnya diuji tetapi kita juga harus memberikan

kan transaksi eksport-import. Dalam konteks itu, dalam jangka pendek kita harus membangun satu *refinery* dengan kapasitas yang lebih besar dari Balongan. Itu bisa digunakan untuk mengatasi kebutuhan di Indonesia Timur.

Jaman Pak Harto dulu ketika memutuskan membangun di Balongan, waktu itu semua orang ribut, namun kenyataannya sekarang kita bergantung pada Balongan. Maka jika dibangun satu lagi di Indonesia Timur atau di Sulawesi saya yakin kebutuhan BBM untuk Indonesia Timur itu akan diatasi.

Sederhananya begini, *lifting* kita itu sekarang sekitar 870 barel perhari, karena kita tidak punya *refinery*, maka sebagian minyak men-



pengawasan kepada Pertamina.

Bangun Kilang Minyak

DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk membangun *refinery* (Kilang Minyak-red), dan selama ini kita hanya punya satu di Balongan. Sementara Singapura saja sudah punya dua *refinery*. Karena kebutuhan *refinery* ini cukup besar maka tidak ada pilihan lain Pemerintah harus membangun *refinery*. Sempat terfikir jangan-jangan ini tidak dibangun karena selalu ada orang yang mendapatkan keuntungan melaku-

tah kita dikirim ke Singapura atau ke negara lain. Kemudian diolah oleh mereka, inilah yang sebenarnya menjadi persoalan utama. Karena itu kenapa kita tidak mengembangkan yang ada di Indonesia, pasti akan membawa *benefit* yang lebih besar untuk kita. Kita harus memberikan kesempatan bagi kontraktor lokal untuk bisa berpartisipasi. Jika itu diberikan kesempatan sebagaimana dulu Pertamina pernah mengalami keterpurukan dan sekarang menjadi perusahaan yang cukup disegani di dunia.



Usulan dari DPR sendiri kepada pemerintah adalah jangan memberikan ruang terlalu banyak bagi asing untuk mengatur kita. Kedua adalah apapun pilihannya setelah dilakukan riset yang mendalam, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan diputuskan secara politik. Kelemahan kita selalu mengikuti tren-tren yang ada sekarang. Saya yakin kalau kita berani mengambil kebijakan ini, misalnya kelapa sawit untuk produk unggulan energi alternatif, maka saya yakin kita akan ditakuti oleh dunia. Jangan kemudian kita takut dengan negara-negara Barat, Eropa yang mem*protect* energi mereka sendiri. Kita harus juga berdaulat di bidang energi di negeri kita sendiri.

Kembangkan energi alternatif

Selama ini kita masih tergantung kepada energi fosil, seperti gas, batubara itu energi yang tidak bisa diperbarui. Dalam jangka panjang yang harus kita lakukan adalah ketergantungan terhadap minyak, gas, batubara itu harus dikurangi. Kita mempunyai kekuatan karena kita ini negara kepulauan maka energi yang alternatif ini harus dikem-

bangkan. Artinya energi alternatif yang bisa diperbarui harus dikembangkan dan salah satu energi yang bisa diperbarui seperti energi alternatif dari kelapa sawit. Disini terlihat pemerintah belum sungguh-sungguh mengeksplorasi hal tersebut. Jadi pengadaan itu lebih ke proyek, sementara jika kita melihat di negara maju hal tersebut malah di *maintenance*.

Persoalan yang sering terjadi adalah siapapun yang menjadi pengambil kebijakan itu selalu disudutkan pada pilihan yang menyulitkan. Karena mesin pembuat kebijakan ini katakanlah lebih menguntungkan kalau pengelolaan energi itu masih seperti sekarang. Kalau saya melihat sebenarnya banyak anak bangsa yang lulusan dari ITB, ITS, UI yang jago diluar negeri jadi kita tidak perlu khawatir akan kekurangan SDM. Saya yakin SDM kita cukup. Tinggal dikelola dengan baik, contoh konkretnya Freeport, apa betul jika Freeport tidak dikelola oleh asing kemudian tidak bisa di*develop*. Saya rasa tidak, saya yakin Indonesia sekarang bisa. Untuk operasi tambang terbuka dan tambang bawah tanah, itu bukan lagi ilmu yang susah.

Setiap tahun Pemerintah selalu mempersoalkan tentang subsidi BBM, selama APBN kita masih dibuat tahunan, maka hal tersebut akan terjadi terus. Kecuali kalau kita sudah merencanakannya dalam lima tahun, maka problem kita akan menjadi lima tahun. Selama problem kita dibuat tahunan ya pasti akan tahunan, dampak kenaikan harga BBM tahun lalu masih kita rasakan sampai sekarang. Akibat terlalu lama pengambilan keputusan untuk menaikkan BBM dampaknya ketika kita mengalami goncangan rupiah kita, devisa kita tergerus, inflasi kita naik tinggi kemudian pertumbuhannya juga mengalami keterlambatan, ini problem

yang kita hadapi karena kita tidak mengambil keputusan terhadap kenaikan BBM tahun lalu.

Selama kita hanya bergantung pada BBM, persoalan ini akan terus ada, kecuali kalau kita sudah mengembangkan energi alternatif diberbagai daerah. Sekarang ini salah satu hal yang bisa kita lakukan misalnya minyak mengalami penurunan cadangan tetapi kita menemukan gas dalam jumlah yang cukup besar, kenapa kita tidak kembangkan *power plant* mini di daerah-daerah untuk mengatasi persoalan kelangkaan energi listrik.

Kalau itu bisa dilakukan maka kebergantungan kepada minyak dan juga *power plant* besar yang tersebar di Jawa itu sangat tinggi, sehingga kalau itu dikembangkan akan mengurangi problem tersendiri. Jadi makin banyak *power plant* mini di daerah yang bahan dasarnya gas, dan gas kita juga banyak. Jangan energi yang tidak bisa diperbarui dihabis-habiskan. Dengan pencarian energi alternatif terutama yang bisa diperbaharui maka harapan agar energi ini juga bisa diwariskan untuk generasi mendatang. (TIM PARLE) Foto iwan armanias/parle.

BENTUK BADAN KHUSUS KELOLA MIGAS



Anggota Komisi VII DPR Bobby Adityo Rizaldi.

Revisi UU Migas semakin mengerucut dengan munculnya usulan dari para *stakeholder* untuk meningkatkan peran lembaga pemerintah dalam mengelola cadangan energi di Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

"Kita sepakat bahwa peran Pertamina harus diperkuat caranya dalam setiap penawaran wilayah kerja baru sebelum ditawarkan Pertamina bebas untuk memilihnya, jika telah memilih Pemerintah harus memberikan jangsan terjadi lagi kalau tender seperti di Papua," tegas anggota DPR dari Komisi VII DPR Bobby Adityo Rizaldi dari Partai Golkar.

Menurutnya, DPR ingin memastikan mana yang terbaik dalam ruang publik dan mampu memberikan informasi kepada Dewan sehingga melalui UU Migas dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. "Diharapkan ada informasi yang berimbang sehingga memastikan yang benar secara substansi," ujarnya.

Terkait isu pembentukan manajemen baru didalam UU Migas, Bobby mengatakan, saat ini UU BUMN sedang di *judicial review* oleh serikat

kerja, yang menegaskan bahwa BUMN merupakan aset negara yang dipisahkan baik utangnya maupun piutang, kalau ini jebol maka kita akan balik kepada UU No. 8 tahun 1971. "Kita tahu bahwa jaman dulu Pertamina tidak bisa masuk dalam laporan BPK, bahkan sekarang ini, BPK bisa memeriksa Exxon," terangnya.

Bobby mengatakan, fungsi manajemen hulu harus tetap ada apapun bentuknya dalam UU Migas nantinya karena hal itu, merupakan representasi *Production Sharing Contracts (PSC)* yang masih banyak sampai tahun 2028. "Kita ketahui, bahwa dalam dua kali urusan perpanjangan kontrak WMO, DPR hanya bisa menandatangani petisi secara formal bahkan tidak ada tanda tangannya, yang kita wacanakan untuk perpanjangan kontrak dimana Pertamina seharusnya diberikan penawaran pertama untuk perpanjangan tersebut," katanya.

Terkait peran Pertamina, DPR prinsipnya setuju adanya pembentukan badan hukum baru bukan seperti Pertamina, karena memang Pertamina hanya cari profit saja jadi tidak bisa membangun kilang karena memang kurang menguntungkan. "Apapun bentuknya akan ada yang berbeda dengan BUMN, SKK Migas dan Pertamina, sebelum UU No. 22 tahun 2001 memang ada semacam Badan Pembinaan dan penguasaan kontraktor migas asing, itu akan diwacanakan kembali," ujarnya.

Keseriusan DPR

Menurut Bobby, revisi RUU Migas merupakan bukti keseriusan DPR dalam menindaklanjuti hasil *Judicial Review* MK terhadap UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Selain keputusan MK, lanjutnya, juga merupakan hasil hak angket Pansus BBM karena harga minyak mahal maka setelah diselidiki data yang ada menunjukkan perlunya perubahan sektor hulu dan semuanya sepakat mengenai hasil Pansus tersebut.

"Yang berkembang di tahun 2009



setelah masuk Prolegnas dibentuk naskah akademis dan muncul kejadian luar biasa yaitu hasil *judicial review* Keputusan MK, yang terakhir yaitu adanya penangkapan KPK Orang Tangkap Tangan (OTT) Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, karena itu kita segera mengkaji kembali naskah akademik sesuai perkembangan opini di masyarakat,” katanya.

Berdasarkan hasil *Judicial Review* MK, terdapat 12 pasal yang berisi pembubaran BP Migas yang dite-

Berdasarkan hasil Judicial Review MK, terdapat 12 pasal yang berisi pembubaran BP Migas yang ditelaah kembali oleh DPR. “Dari sisi kelembagaan apakah lembaganya yang membuat celah ada korupsi atau memang orangnya,” tanyanya.

laah kembali oleh DPR. “Dari sisi kelembagaan apakah lembaganya yang membuat celah ada korupsi atau memang orangnya,” tanyanya.

Menurut Bobby, DPR mencoba membandingkan secara historis UU No. 8 tahun 1971 dan UU No. 22 tahun 2001. Prinsipnya kedua UU tersebut dikelompokkan menjadi tiga besar, yaitu pertama siapa pengambil kebijakan, manajemen operasi dan fungsi komersial. “UU No. 8 tahun 1971 *policy*nya berada di pemerintah sementara manajemen operasi dan komersial berada di Pertamina, sementara UU No. 22 tahun 2001 manajemen operasi di BP Migas dan dipecah dari sisi komersial yaitu BUMN seperti Pertamina,” tambahnya.

Jika dilihat, lanjut Bobby, manajemen operasi yang dikerjakan SKK Migas dan BP Migas bertujuan menentukan teknologi dan menjaga *cost recovery*. Kemudian ada lembaga semacam direktorat Manajemen *production sharing*. “Kalau dilihat Tupoksinya sama saja dan tidak ada bedanya. Namanya fungsi manajemen operasi harus ada karena perusahaan nasional kita kemampuan *lifting*nya masih minim dibanding-

kan dengan asing,” tegasnya.

Terkait isu tidak adanya kedaulatan negara di sektor tambang, paparnya, Komisi VII DPR juga telah berkonsultasi dengan para ahli dan mempertanyakan hal itu kepada Baleg, dan PUU Setjen DPR RI. “Ternyata hasil konsultasinya memang tidak ada peran negara yang tereduksi menurut para ahli kita membatasi kewajiban negara terhadap eksposur kontraktual kontraktor asing. Dahulu PSC Presiden mengetahui sama Pertamina, sekarang ini BP Migas termasuk Menteri ESDM, karena itu tidak ada lagi dalam arbitrase aset negara terambil dalam berbagai kasus,” katanya.

Berdasarkan UU No. 8 tahun 1971 kuasa pertambangan diserahkan kepada BUMN. Jadi pada masa itu, posisi Pertamina bentuknya sama dengan BP Migas yaitu berbadan hukum. “Mulai kita wacanakan sekarang apakah Pertamina yang direformat atau badan lain yang sesuai konstitusi berdasarkan UU No. 8 tahun 1971,” tambahnya.

Dia mengatakan, SKK Migas boleh bubar tetapi fungsinya harus ada terkait manajemen operasi karena berhubungan dengan kontraktor asing. Sementara terkait kinerja Pertamina, Bobby menjelaskan, sebelum adanya UU No. 22 tahun 2001 kinerjanya sangat buruk namun sekarang Pertamina masuk dalam fortune 500 dan pelayanannya sangat bagus sekali. Selain itu, PGN juga mengalami over likuiditas hingga mereka berdua berebut gas di Jawa Barat. “Pertamina sekarang ingin eksplorasi minyak seperti di Qatar dan Libya,” tambahnya.

Menurutnya, dalam waktu dekat Revisi RUU Migas akan masuk di Baleg kemudian diputuskan apakah dibikin Pansus atau Panja. “Setelah itu balik kembali ke ruang publik lagi, jadi *draft* yang ada kemarin bukan harga mati disitu kita ingin memastikan mana yang terbaik buat Indonesia,” katanya. (TIM PARLE) Foto wahyu/parle.

PENGELOLAAN MIGAS HARUS SESUAI KONSTITUSI



Pengamat Perminyakan, Kurtubi.

Kekayaan migas harus dikelola sesuai dengan konstitusi guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Namun pertanyaannya apakah prinsip pengelolaan migas yang sesuai dengan konstitusi itu? Berikut pernyataan pengamat perminyakan Kurtubi terkait pengelolaan migas yang sesuai konstitusi tersebut.

Menurut Pengamat Perminyakan Kurtubi terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh Negara. Pertama yaitu kekayaan yang ada atau cadangan di perut bumi harus dinyatakan sebagai milik negara, dikuasai dan diatur oleh negara dan secara eksplisit dinyatakan di dalam Undang-Undang.

Berikutnya yaitu, kepemilikan oleh negara dan kuasa pertambangan harus diserahkan, diberikan dan dibukukan oleh perusahaan negara khusus yang dinyatakan dalam UU. "Kepemilikan oleh negara baru efektif kalau otoritasnya diberikan kepada perusahaan negara yang dibentuk dan berdasarkan UU. Kalau kepemilikan ditangan lembaga negara seperti SKK Migas, ataupun

BP Migas lalu tidak efektif karena bukan entitas bisnis, kalau perusahaan itu punya neraca," katanya.

Kedua yaitu terkait cadangan di perut bumi, Kurtubi mengatakan, itu termasuk aset di pembukuan seperti halnya mobil yang berada di gudang dimasukkan dalam *inventory*. "Ini aset cair dan masih status cadangan persediaan kalau secara bisnis dapat dimasukkan dalam perusahaan negara, apabila muncul di aset perusahaan negara maka kontraktor tidak bisa mengklaim kalau dibawa ke bank. Jadi aturan memberikan sertifikasi kepada perusahaan asing itu salah," tambahnya.

Ketiga, perusahaan negara yang diberikan kuasa pertambangan itu bila kurang teknologi maupun dana bisa bekerja sama dengan siapapun baik perusahaan asing, swasta dan berkontrak dengannya. Namun, aset terpisah dari perusahaan Negara atau istilahnya *Business to Business* (B to B).

"Pemerintah harus berada di atas kontrak dan kebal dengan aturan arbitrase internasional bila perusahaan negara berkonflik dengan asing. Hal itu harus dinyatakan dalam kontrak bahwa pemerintah RI berada di atas tidak terikat kontrak," tandasnya.

Kemudian keempat, perusahaan negara harus memiliki kewajiban memaksimalkan penerimaan negara dari migas dengan cara kerjasama asing baik teknologi dan dana. Selain itu, ke depan perlu dipikirkan bagaimana memonetisasi kekayaan dari migas nasional. "Melalui cara ini diharapkan dapat mengumpulkan uang untuk dana pembangunan infrastruktur, terdapat dua teori di migas yaitu teori *bankable* seperti melakukan sertifikasi cadangan kemudian bisa dibawa ke bank, sama seperti surat tanah," ungkap dia.



Berikutnya yaitu *tradeable* yaitu minyak di perut bumi bisa diperdagangkan meskipun barangnya masih di perut bumi, seperti pasar Nymex bisa menjual komoditas minyak dengan pengiriman dua bulan lagi.

"Transaksi yang terjadi masih berada di perut bumi namun nyatanya memang bisa diperdagangkan. Ini semua milik negara bukan kontraktor, jadi akan menjadi milik kontraktor asing bila telah diproduksi dan dieksploitasi dari perut bumi dan dibagi secara fisik istilahnya *crude entitlement* maksudnya sudah berada di Pelabuhan ekspor atau titik serah, sementara bila masih di kilang itu masih milik negara," ujarnya.

Kedepan, lanjutnya, kita ingin

menciptakan UU Migas yang mampu memanfaatkan secara maksimal kekayaan migas untuk kepentingan bangsa namun dengan tata kelola yang baru tidak seperti sekarang yang hanya menguntungkan asing semata. "Perusahaan asing mengendor pertama memang dengan modalnya, tetapi setelah dapat minyak dapat mengagungkannya, setelah itu mereka semua modal *dengkul*, bahkan *domestic public obligation* kita mengemis sama mereka, ini salah sekali," tegasnya.

Kurtubi mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjaga kedaulatan bangsa dengan mencabut UU Migas. "Jadi nanti kita harapkan ada perusahaan negara yang dibentuk khusus dan aset ter-

pisah dari negara. Di sisi lain, dibuka peluang untuk memonetisasi cadangan yang ada tanpa merugikan investornya yaitu negara," katanya.

Menurutnya, SKK Migas tertutup untuk memanfaatkan potensi tersebut, karena memang yang mengelola seharusnya perusahaan negara sehingga Indonesia dapat mengumpulkan dana yang besar. Melalui cara ini ke depan kita tidak butuh pinjaman nantinya. "Perkiraan kasar saya termasuk batubara, emas, perak aset sekitar 200 ribu Triliun, asumsi saja 50 persen nilai itu nilai biaya produksi dan kontraktor. Jadi masih sisa 100 ribu triliun. Kalau *tradeable* bisa saja misal 10 persen 10 ribu Triliun, jadi generasi muda tidak mendapat beban utang negara," tandasnya.

Melanggar UU

Kurtubi menilai Presiden RI memiliki potensi melanggar konstitusi khususnya di sektor migas. Pertama memberlakukan harga pasar Pertamina untuk subsidi karena menurut UU Migas itu tidak dibedakan. "Jadi ini melanggar konstitusi yaitu hasil keputusan MK, harga pasar tidak boleh karena BBM menguasai hajat hidup orang banyak, kalau diserahkan ke pasar pemerintah lepas tangan seharusnya kalau untuk BBM tidak disubsidi tetap dengan harga pasar, tetapi dengan biaya pokok ditambah *margin* yang ditentukan oleh pemerintah," kata Kurtubi.

Biaya pokok, lanjutnya, jauh lebih rendah dibandingkan acuan harga pasar. Kalau biaya pokok yang dikeluarkan sampai BBM itu disisi konsumen perliternya, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan seperti biaya produksi, angkutan, *storage*, bunga bank. "Kalau impor biaya pokoknya sama dengan harga pasar internasional kalau dalam negeri tidak sama. Acuan biaya pokok adalah yang benar itu termasuk ketentuan tarif harga BBM termasuk penghitungan harga BBM yang mengacu di APBN karena ketentuan sudah dicabut di MK," tandasnya. (TIM PARLE)
Foto wahyu/parle.

KEKAYAAN MIGAS HARUS DIKELOLA PEMERINTAH



Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin.

Kekayaan bumi, air, dan cabang produksinya harus diserahkan sepenuhnya kepada negara dan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, energi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri namun ternyata belum mampu mensejahterakan rakyatnya.

Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung industri migas yang sedang giat-giatnya dilakukan di Indonesia, membuat pertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir (PWC, 2011).

Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan, Indo-

nesia memiliki keunikan tersendiri dalam mengelola cabang produksi yang dianggap penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. "Amanat UUD 1945 kalau ada cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak negara harus menguasainya, sementara kalau ada cabang yang penting meski tidak menguasai hajat hidup orang banyak negara juga harus menguasainya," ujarnya.

Menurutnya, contoh cabang produksi yang tidak penting tetapi menguasai hajat hidup orang banyak seperti tempe juga menjadi persoalan bangsa karena itu negara harus menguasainya dan harganya tidak dilempar ke pasar. "Ini keunikan yang kita miliki, India tidak memiliki pasal 33 UUD 45 tetapi negaranya menguasainya. Komoditas beras karena memang harganya dipatok dengan UU bukan peraturan



Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi DPR RI.

presiden, sementara Indonesia hanya memakai Perpres,” terangnya.

Terkait persoalan BBM, dia menambahkan, pemerintah jangan diberikan check kosong untuk menaikkan harga BBM, padahal seharusnya itu dibuatkan undang-undangnya. “Yang banyak dipropagandakan BBM hancur itu karena kelas atas beli premium. Hal itu tidak haram, mobil Bentley beli BBM premium maka mobilnya yang rusak, begitu juga orang kaya tidak haram makan di warteg. Bumi air dan kekayaan alam di dalamnya, serta cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan tidak mengenal kelas social. Setiap rakyat berhak menikmati semuanya,” tambahnya.

Menurutnya, usulan Pemerintah yang membatasi mobil bermesin cc kecil harus membeli premium se-

mentara mesin cc besar harus per-tamax, hanya dapat dilakukan bila peraturannya berbentuk Undang-undang. Karena itu percuma kalau peraturan SKK Migas atau peraturan Menteri. “Perpres saja tidak boleh, karena itu harus bentuk Undang-Undang, hal itu merupakan persetujuan DPR sebagai representasi rakyat, karena memang UUD tidak mengenal kasta sosial,” katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan UUD 45 definisi kemakmuran rakyat mengandung makna implisit bahwa distribusi cabang produksi harus merata di seluruh Indonesia, kemudian tidak boleh hilang di pasaran (ini terkait ketahanan distribusinya), terakhir yaitu harganya terjangkau.

“Jadi ada tiga, tersedia barangnya, terjangkau, dan distribusi merata. Itu yang dimaksud dengan kemakmuran makanya tidak boleh tempe,

maupun minyak tidak ada di daerah lain, dan harga BBM tinggi di Papua itu termasuk melanggar Pasal 33 UUD 45,” tambahnya.

Artinya, meskipun harga murah dan terjangkau jika distribusi tidak merata itu juga tidak memenuhi pasal 33 UUD 45. “Jadi menurut UUD guna pemenuhan item itu, untuk menjaga harganya terjangkau dan distribusi merata tidak boleh dilemparkan mekanisme pasar harus negara yang menguasainya,” katanya.

Dia kembali menegaskan bahwa kalimat dalam UUD 45 “dikuasai oleh Negara” ternyata Negara berwenang mengatur meskipun Negara tersebut secara inheren bisa mengaturnya seperti bumi air atau tentang migas itu.

“Pertanyaannya apakah negara memiliki kekayaan itu? Negara tidak

pernah memiliki bumi air semuanya milik rakyat Indonesia namun diberikan otoritas kepada negara untuk mengelolanya. Untuk mengeluarkan kebijakan atau mengurus langsung cabang produksi tersebut, atau mengatur saja jika negara tidak mampu mengelola dan mengurus cabang produksi tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, tujuannya semata untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia karena sebenarnya mekanisme pasar tidak bisa menjamin keterjangkauan harga yang dianggap cabang produksi itu. “UU kita mengharuskan negara mengelola langsung karena kita percaya kalau

Menurutnya, tujuannya semata untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia karena sebenarnya mekanisme pasar tidak bisa menjamin keterjangkauan harga yang dianggap cabang produksi itu. “UU kita mengharuskan negara mengelola langsung karena kita percaya kalau negara mengelola langsung maka sharenya banyak,” tambahnya.

negara mengelola langsung maka sharenya banyak,” tambahnya.

Dia mengatakan, pemikiran UU Migas terdahulu banyak dianggap inkonstitusional karena kita ketahui instrumen pemerintah yang melakukan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga ada BUMN, swasta dan perusahaan bentuk lainnya. Sementara negara tidak bisa berbuat dan tunduk dengan kontrak tersebut. “Karena itu bunyi pasal tersebut dicabut oleh keputusan MK kemarin untuk dihilangkan, artinya jangan sampai UU mencabut otoritas tersebut, yang berhak itu DPR dan pemerintah sendiri, sementara kita ketahui UU disektor ekonomi berhalal ekonomi bukan disektor tersebut ada semacam IMF, dan World Bank,” ujarnya.

Irman menegaskan, hal ini dinamakan *neolib* karena seolah-olah

negara menguasainya tetapi tidak bisa berbuat apapun. Otoritas negara tidak mendapat keuntungan dari keberadaan institusi semacam BP Migas dulu. “Karena itu RUU Migas harus dirancang sesuai dengan paradigma Pasal 33 UUD 45. Kita tahu bahwa di sektor cabang penting dan bumi, air itu besar sekali sumbangsinya terhadap sector APBN kita,” tambahnya.

Dia mengusulkan terkait sektor ekonomi pemerintah kedepan jangan membentuk lembaga yang terlalu jauh dari Presiden, jangan ke menteri dan juga jangan sampai

dalam level presiden bisa langsung diinterpelasi segera,” tambahnya.

Disisi lain, jelasnya, kalau terlalu membentuk badan yang lengkap juga tidak bagus, membuat kita inflasi dalam memilih otoritas politik lima tahun presiden tersebut karena jika masuk Presiden juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bila terjadi kerugian di sektor migas kita tidak bisa menagihnya.

“Kelembagaan pengelola itu diberikan saja kepada Presiden langsung, jangan kepada menteri karena hanya pembantu presiden,



mengebiri otoritas DPR. Sekarang ini, kita ketahui DPR kerap mengurangi otoritasnya sendiri seperti UU BUMN itu, bila ingin menjual BUMN tidak perlu ijin DPR. “Hal ini sangat keliru karena menyangkut entitas negara, jika ingin divestasi harus ijin DPR tetapi didalam UU BUMN tidak dijadikan seperti itu,” tandasnya.

Karena itu, sekali lagi jangan pernah melepaskan otoritas DPR itu terkait bumi, air dan cabang produksi penting kalau perlu dilepaskan hanya pada tingkat level Presiden. “Kita jangan membangun lembaga terlalu jauh dari presiden karena dengan cara ini DPR selaku wakil rakyat bisa dengan mudah menagih Presiden melalui interpelasi, dengan mudahnya DPR dapat menagih dengan hak angket. Kalau seperti BP Migas itu tidak imbang berantemnya paling teriak saja informal kalau

kalau kuasa negara Pasal 33 itu paling jauh presiden mengatur regulasi internalnya, sekarang ini otoritasnya BP Migas jika dewan ingin tanya bisa lepas tangan,” katanya.

Terkait SKK Migas, semuanya tergantung dari DPR apakah konstitusional atau inkonstitusional. “Yang kita pahami SKK Migas itu produk sementara sampai UU Migas yang baru itu rampung,” ujarnya.

Membentuk lembaga terlalu banyak dapat membuat Presiden lepas tangan karena jika ada persoalan kita tidak bisa meminta pertanggung jawaban Presiden langsung. “Kita ingin pemimpin di 2014 yang ingin mengubah keadaan ini, memang sulit jika kita tidak mendesain itu semuanya,” tandasnya. (TIM PARLE) Foto wahyu/parle.

PENGGELOLAAN POLITIK ENERGI KE DEPAN

Oleh Hariyadi

Masih kental dalam ingatan kita ketika kebijakan pengendalian kuota BBM bersubsidi pada tahun 2012 akhirnya mentah kembali setelah muncul gejolak sosial. Pada waktu itu, 23 November 2012, gejolak sosial terjadi di Kecamatan Barong Tiongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Barat. Gejolak yang diawali dengan cekcok antara warga dengan petugas agen penyalur minyak dan solar berujung pada kerusuhan sosial dengan implikasi ratusan rumah dan toko terbakar. Kecenderungan “kekurangan” pasokan BBM tersebut juga ditemui di sejumlah wilayah. Dalam konteks ini negara harus ‘mengalah’: Pertama menghentikan kebijakan tersebut dan pilihan politik negara akhirnya mengarah pada penambalan kuota BBM bersubsidi pada tahun anggaran.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya mengoptimalkan sejumlah kebijakan pengendalian sebelumnya dan langkah himbauan penghematan termasuk di dalamnya kegiatan Gerakan Nasional Hari Tanpa Bensin Bersubsidi pada tanggal 2 Desember 2012 di wilayah Jawa-Bali dan lima kota besar di luar pulau Jawa, yakni Medan, Batam, Palembang, Balikpapan dan Makasar dilakukan. Namun demikian, akhirnya pemerintah memandang bahwa semua langkah itu tetap tidak mampu mengerem laju tingkat konsumsi. Setali tiga uang pada kasus tahun ini, upaya pengendalian kuota BBM

bersubsidi digenjut lagi. Permen ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, sebagai tindak lanjut Permen ESDM No. 12 Tahun 2012 yang memiliki ruang lingkup pengaturan yang sama di tingkat Jabodetabek telah digulirkan. Melalui kerangka kebijakan ini, pemerintah menargetkan dapat menghemat BBM bersubsidi sebesar 1,3 juta kiloliter sehingga upaya menjaga kuota BBM bersubsidi tidak melampaui kuota yang ditetapkan APBN 2013 sebesar 46,01 juta kilo liter senilai Rp193,8 triliun tercapai. Lagi-lagi, nilai BBM bersubsidi terus mengalami kenaikan sebagai konsekuensi naiknya volume alokasinya. APBN-P 2013 mematok kuota subsidi sebesar Rp199,85 triliun atau setara dengan 47 juta kilo liter. Alokasi ini masih sangat rentan terhadap perubahan sedikit-tidaknya karena tiga variabel penting berikut ini.

Pertama, tingginya laju konsumsi BBM bersubsidi secara nasional. Seiring dengan kehadiran mobil hijau murah (LCGC), laju tingkat konsumsi BBM bersubsidi bakal semakin fantastis dan keluar dari batas ambang psikologis kita jika dirasiokan dengan jumlah ruas dan luas jalanan misalnya, di Jabodetabek. Mari kita lihat fakta empiris oto-hedonis kelas menengah di republik ini. Peluncuran LCGC Toyota Agya pada awal bulan September 2013 lalu mampu mencetak 1500 pesanan mobil hanya dalam waktu tiga jam (*Tempo*, 10/9/13). Dengan jumlah kelas menengah yang



Hariyadi, Peneliti P3DI Setjen DPR RI.

mencapai lebih dari 20% dari jumlah penduduk, dipastikan konsumsi BBM akan semakin menjadi momok bagi negara. *Kedua*, politik subsidi BBM yang masih menyisakan ruang bagi terciptanya tambalan subsidi. Kehadiran Pasal 8 UU ayat (10) No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 membuka ruang bagi dilakukannya penyesuaian alokasi BBM bersubsidi menguatkan hal ini. Di satu sisi, fakta ini sekaligus menyiratkan belum berjalannya serangkaian kebijakan pengendalian implementasi BBM bersubsidi. *Ketiga*, belum membuminya kebijakan diversifikasi energi. Mandat Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah mengamanatkan politik bauran energi yang komprehensif sampai tahun 2025 dengan peran masing-masing jenis sumber energi terhadap tingkat konsumsi energi secara nasional. Walhasil, kebijakan ini pun masih jalan di tempat.

Subsidi BBM dan Beban Anggaran

Kenaikan harga minyak dunia mulai tahun 2005 yang mencapai lebih dari 70 dolar AS menghadapi pemerintah pada situasi yang semakin dilematis dalam mengelola kebutuhan BBM bersubsidi atau kebutuhan energi secara umum. Subsidi BBM yang terus mengalami kenaikan di luar ambang batas aman secara psikologis bagi APBN akan semakin membebani keuangan negara. Kondisi ini akan semakin menempatkan pemerintah pada ruang gerak yang sempit.

Tidak hanya itu, faktor status Indonesia sebagai *net importer* minyak bumi dan keluarnya keanggotaan Indonesia dari OPEC pada tahun 2008 turut mengurangi ketahanan energi secara nasional. Indikasinya, target *lifting* minyak dalam beberapa tahun terakhir terus merosot. Dalam tahun ini, Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas bahkan baru-baru ini melansir bahwa *lifting* minyak nasional rata-rata hanya berkisar 830-850 ribu barel per hari dan melenggang jauh di bawah yang ditetapkan APBN 2013, sebesar 900 ribu barel per hari. Target ini menjadi target terendah sejak era bonansa minyak pada tahun 1970-an dan 1980-an sebesar 1,6 juta barel per hari. Sejalan dengan itu, nilai subsidi BBM pun bakal semakin meroket dan alhasil akan semakin menggerogoti kemampuan anggaran pemerintah apalagi dalam lima tahun terakhir kecenderungannya terus mengalami kelebihan kuota APBN.

Bagaimana pun dengan melihat fenomena *over quota* BBM bersubsidi selama lima tahun terakhir praktis nilai subsidi sampai akhir tahun pun akan mengalami hal yang sama apalagi jika kita kaitkan dengan tiga momentum hari libur dan besar nasional seperti hari raya qurban, perayaan natal dan tahun baru. Itu artinya, jika inisiatif kebijakan terobosan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tumpul dalam eksekusinya, persoalan subsidi BBM akan terus menyandera politik anggaran



yang implikasinya politik anggaran yang pro-rakyat akan semakin jauh dari muaranya.

Persoalannya tentu tidak semata-mata hanya pada potensi *budget crunch*. Subsidi energi yang terus meningkat secara kumulatif akan berefek bola salju bagi perekonomian secara umum karena resiko menurunnya stimulus APBN. Argumennya sederhana, meningkatkan subsidi energi akan berdampak terhadap belanja modal. Argumen ini bukan isapan jempol di tengah semakin limbungnya perekonomian kawasan dan global yang cenderung semakin tidak bersahabat dalam upaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang telah kita raih dalam beberapa tahun terakhir. Dari perspektif inilah, politik pengelolaan energi negara yang lebih *tough*, harus segera ditancapkan, kalau tidak dapat disebut, dipaksakan.

Agenda Diversifikasi Energi

Tarik-menarik dalam penentuan struktur politik subsidi BBM dan dinamika yang menyelimuti dalam proses penyesuaian harga BBM bersubsidi yang melelahkan menguatkan adagium bahwa ketahanan energi mulai memasuki fase titik kritis. Dalam jangka panjang, skenario terburuk bisa saja terjadi jika pemerintah tidak mau berpikir *out of the box*. Dalam koridor pemahaman ini, energi, meminjam kaum *developmentalists*, menjadi sangat vital bagi pembangunan. Ironisnya, agenda penghapusan subsidi BBM secara total dinilai menjadi sebuah diskursus yang 'norak' dan lebih ekstrem lagi, malah sebagai 'bunuh diri' politik.

Demi pengamanan kepentingan yang sangat strategis ke depan, misi pengurangan subsidi harus menjadi peletak dasar sekaligus *leverage* pemerintah dalam menuntaskan

agenda ketahanan energi nasional mencakup beberapa isu kebijakan seperti diversifikasi energi dan pengembangan infrastruktur energi. Pengurangan subsidi BBM juga harus menjadi medan 'manuver' pemerintah untuk mendorong perubahan subkultur boros-energi masyarakat untuk menopang ketahanan energi, penghematan anggaran dan penghapusan subsidi secara penuh. Tidak berlebihan, agenda ini akan beririsan dengan upaya pemerintah untuk merubah Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang KEN.

UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menggarisbawahi bahwa kebijakan pengelolaan energi nasional harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Dengan mandat ini, ruang bagi pengembangan semua jenis sumber energi, khususnya energi terbarukan (EBT), menjadi suatu keniscayaan. Pilihan ini sangat fundamental seiring dengan semakin liarnya tingkat konsumsi energi sementara pada saat yang sama kapasitas negara dalam memenuhinya terus merosot tajam. Laju pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi dan tingginya pemburu rente bisnis penyelundupan BBM bersubsidi terus menambah limbung situasi ini.

Alasan ini tidak berlebihan karena Indonesia memiliki sumber EBT yang melimpah. Laporan khusus *Tempo* (24/3) misalnya, membeberkan sejumlah potensi EBT, data yang analog dengan tersedianya menu gastronomikal yang siap dieksekusi.

Sebagai sarana pengolah, landasan aturan mainnya pun sudah jelas. KEN telah menetapkan politik bauran energi bagi terpenuhinya peran jenis energi pada tahun 2025; minyak bumi kurang dari 20%, gas lebih dari 30%, batu bara lebih dari 33%, bahan bakar nabati (BBN) dan panas bumi lebih dari 5%, EBT lainnya khususnya nabati, panas bumi, biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin lebih dari

5%; dan batubara yang dicairkan menjadi lebih dari 2%. Target ini bahkan akan lebih digenjut sampai tahun 2050. Wacana yang berkembang dalam proses penyiapan perubahan kebijakan KEN misalnya, politik bauran energi primer sampai tahun 2050 akan menetapkan peran EBT minimal 31%, minyak bumi kurang dari 20%, batu bara minimal 25% dan gas minimal menjadi 24%.

Mandat penting lainnya adalah target pencapaian elastisitas energi (EE) yang lebih kecil dari 1 pada tahun 2025. EE Indonesia saat ini masih di atas 1 (1,84). Sebagai perbandingan, Malaysia sebesar 1,69; Thailand, 1,16; Singapura, 0,73; Jepang, 0,10; Inggris, 0,03; dan Jerman, 0,12. Pada tahun 2012, Indonesia tergolong negara terboros energi di dunia dengan indeks EE masih di angka 1,63 dan tertinggi di Asia Tenggara dan bahkan sebagian negara-negara maju yang indeks EE-nya di kisaran 0,1-0,6. Di samping itu, intensitas energi final juga akan didorong menjadi 1% pada tahun 2025. Mengapa semua fakta penting disuarakan? Sejumlah sumber potensial bagi pengembangan EBT dan target politik bauran energi yang telah ditetapkan tak ubahnya seperti macan kertas. Pengembangan BBN praktis hanya berjalan di sektor biodiesel dan perannya secara grafikal cenderung linier. Data terbaru bahkan menunjukkan bahwa produksi BBN masih di kisaran dua juta kilo liter per tahun. Penggunaan energi panas bumi baru mencapai 900 Mwe (800 MW). Jumlah ini masih sepertiga dari potensi energi panas bumi nasional yang mencapai kira-kira 27.000 Mwe atau setara 40% cadangan energi panas bumi dunia. Sumber EBT lainnya seperti biomassa, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin dan suhu kedalaman laut pun setali tiga uang. Energi baru seperti nuklir masih menjadi bola politik liar yang dikooptasi populisme sesaat dalam arena percaturan politik nasional.

Sejumlah faktor seperti tingginya biaya pengelolaannya, kebijakan

yang kurang kondusif dan faktor teknologi juga turut memperkeruh suasana. Faktor biaya misalnya, menunjukkan bahwa persoalan ini perlu sebuah kebijakan terobosan yang tentunya membutuhkan keputusan politik yang kuat. Belum sampai di sini, tingginya biaya pembangunannya pun perlu didukung dengan kebijakan lain seperti kebijakan pembelian energi listrik dan regulasi teknis lainnya yang memberikan ruang insentif yang lebih longgar bagi investor. Sebagai contoh, kebijakan harga pembelian listrik investor oleh pemerintah (*feed-in tariff*) telah dinaikkan dari di bawah Rp500 per kWh menjadi lebih dari Rp600 per kWh. Kebijakan ini membangkitkan animo sejumlah investor pembangkit listrik mikrohidro. Namun demikian, dari sejumlah puluhan perjanjian pembelian jual-beli listrik dengan PLN, realisasinya kurang dari 5%. Lagi-lagi, persoalan kondusifitas aturan dan insentif menjadi ganjalan. Persoalan teknologi pun sama karena kentalnya politisasi. Pesan ini secara langsung mendesak bagi dilakukannya rejuvinasi politik bauran energi nasional. Tanpa upaya ini pengembangan EBT hanya akan menjadi pajangan normatif.

Secara normatif, kebijakan pengelolaan energi nasional diarahkan bagi terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Dalam perspektif seperti ini, tugas berat telah menanti generasi kepemimpinan politik saat ini karena dua agenda ini akan bermuara pada tercapainya kedaulatan energi. Titik irisan ketiganya semua mengamini bahwa mustahil ada kedaulatan energi *zonder* kemandirian dan ketahanan energi. Apapun pilihan politiknya ke depan, yang pasti kita harus mengarahkan alam bawah sadar kita bahwa era bonansa minyak bumi menjadi romantisme yang tidak bakal kembali.

Penulis adalah peneliti P3DI Setjen DPR RI, Jakarta.



PERSOALAN LAPAS IBARAT BENANG KUSUT



Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono.

Dalam kunjungan ke Lapas Cilodong dan Pondok Rajek, Bogor anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono menyaksikan sendiri betapa padatnya ruangan 3x5 berjeruji besi itu. 5 tempat tidur tingkat yang tersedia di ruangan itu seharusnya digunakan oleh 10 orang narapidana. Tetapi fakta yang dilihatnya ada 30 orang disitu. Mereka akhirnya tidur 3 tingkat, ada di lantai, di bawah tempat tidur, di kasur bawah dan di kasur atas. Belum lagi fasilitas toilet di ruangan yang harus digunakan ber-30 orang.

"Amanat undang-undang Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan, membantu anak bangsa yang salah melangkah. Mereka dibantu untuk mengoreksi diri dan bangkit menjadi lebih baik pada saat keluar lapas. Kalau kondisinya begitu bagaimana mendorong



Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Lapas Serang, Banten.

mereka berubah,” tandas Harry dalam kesempatan wawancara di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kondisi di dua lapas di Bogor itu menurutnya menjadi cerminan permasalahan lapas di hampir seluruh wilayah di tanah air. Wakil rakyat dari dapil Depok-Bekasi ini menyebut *over capacity* menjadi masalah utama lapas saat ini diikuti daftar panjang problematika lain yang sebagian disaksikannya sendiri pada saat melakukan kunjungan kerja atau kunjungan spesifik ke sejumlah daerah. “Kalau saya ditanya tentang lapas sekarang problem utama adalah *over capacity*. Membangun gedung baru, itu iya, tetapi ada temuan menarik di hampir semua lapas dan rutan ternyata 60 persen penghuni dalam beberapa tahun belakangan ini adalah napi dan tahanan narkoba,” ungkapnya.

Bagi anggota Komisi III dari FPG Ade Supriatna ada salah kaprah yang terjadi terjadi selama ini dalam memperlakukan para pengguna narkoba. Sebagian dari mereka adalah korban dari penyalahgunaan, akibat dari ketidaktahuan dan salah pergaulan. Banyak dari mereka anak muda yang masih harus mengenyam pendidikan di sekolah atau kampus. “Apa jadinya kalau anak-anak yang

masih hijau ini, mungkin ada yang dijemak temannya harus masuk penjara. Bukannya sembuh mereka keluar mungkin menjadi semakin bejat karena bergaul dengan bandar, pembunuh atau pelaku kriminal kelas berat lainnya,” jelasnya miris.

Seharusnya para pengguna baru ini dikirim ke Panti Rehabilitasi atau Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO). Disitu mereka ‘ditahan’ sambil memperoleh rehabilitasi medis dan pembekalan mental termasuk bimbingan rohani dari para guru agama. Penanganan yang tepat diyakininya akan dapat membuat pengguna ini kembali ke jalan yang benar, menjauh dari masa lalu mereka. “Tentu perlakuan ini tidak dapat kita terapkan kepada pengguna yang telah berkali-kali gagal diterapi, masuk lagi, masuk lagi. Kondisi ini bisa saja terjadi. Orang seperti ini bisa jadi layak ditahan,” tekannya.

Masalahnya sekarang amanat UU Narkotika memang mengarahkan untuk memberi sanksi penahanan kepada para pengguna. Ade yang mantan Ketua DPRD DKI ini mendukung agar proses revisi segera dilakukan. “Nah UU Narkotika ini ternyata bukan ranahnya Komisi III tetapi IX. Saya usulkan nanti kalau direvisi lebih baik dibentuk pansus yang melibatkan lintas komisi

jadi hasilnya lebih komprehensif,” imbuhnya.

Langkah lain yang dapat diambil segera adalah mengefektifkan penyelesaian di luar pengadilan. Sebenarnya budaya yang tumbuh dan telah berkembang sejak lama di tengah masyarakat sangat dapat diandalkan untuk menyelesaikan sejumlah tindak pidana berat dan ringan. Dalam kondisi saat ini kita dapat mendorong aparat untuk dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan dengan pendekatan musyawarah mufakat. “Kasus pidana ringan bisa segera dilakukan, misalnya mencuri sandal, semangka, kayu bakar tidak perlu ditahan, disidang dan masuk penjara. Libatkan pemangku adat. Saya dengar di Bali, polisi menerima ini. Kalau sudah diputuskan dalam rapat adat ya selesai,” katanya sambil mengangkat kedua tangannya.

Anggota Komisi III dari dapil Sumbar II Nudirman Munir juga menyebut hal yang sama. “Di kampung saya biasa ada hukuman adat dengan memerintahkan pihak-pihak yang dinyatakan bersalah misalnya membersihkan mesjid selama sebulan, membangun jalan, merapikan banda (kali kecil). Ini berhasil, semua pihak menerima, menjerakan pelaku tanpa harus masuk penjara,” paparnya.

Harry melihat ini seharusnya dapat menjadi bagian dari hukum positif yang diterapkan bangsa ini kedepan. Ia berkeyakinan pelaku kejahatan kerah putih, koruptor mungkin akan lebih jera apabila bagian dari hukumannya melakukan kerja sosial. Pilihannya bisa beragam diantaranya membersihkan toilet di terminal Pulogadung, membersihkan taman-taman publik. “Wah kalau koruptor yang biasanya *public figure* disuruh menyapu di Monas dan dilihat teman dan keluarganya, saya yakin ini akan sangat berbekas dihati mereka sambil tentu kita bimbing mental mereka. Saya yakin langkah ini lebih efektif dari pada penjara bertembok tebal yang terkadang layanannya bisa mereka

beli,” imbuhnya bersemangat. Polisi FPD ini berharap kerja sosial ini dapat diatur dalam revisi UU KUHAP yang saat ini sedang dipersiapkan komisi bidang hukum ini.

SDM Lapas

Pada saat rapat dengar pendapat dengan Kepala Lapas dari seluruh Indonesia beberapa waktu lalu, Komisi III berhasil menghimpun sejumlah persoalan penting. Salah satu yang mengemuka adalah minimnya pegawai lapas atau biasa dikenal dengan sipir yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus dibidang pemasyarakatan. Kemenkumham memang telah memiliki akademi khusus untuk itu (AKIP) namun faktanya sebagian besar sipir yang telah bertugas cukup lama di lapangan adalah tenaga administrasi atau staf bidang lain yang ditempatkan di lapas.

“Jelas ini besar pengaruhnya karena dalam membina narapidana perlu pemahaman khusus, mulai dari manajemen sampai masalah pedagogi dan psikologis. Mereka bukan barang yang datang terus dikurung, kalau sudah begini akhirnya pendekatan yang digunakan kekerasan, menekan,” tandasnya. Pengakuan lain yang cukup mengesankan adalah kesulitan untuk menghadapi narapidana terorisme yang cenderung tertutup dan eksklusif. Seiring dinamika global jumlah tahanan kasus ini terus bertambah di sejumlah lapas di tanah air. Mereka masuk dengan pemahaman terhadap ideologi tertentu yang sangat ekstrim dan tidak mudah merangkul mereka bahkan oleh seorang ahli agama yang diundang ke dalam lapas.

“Para Kalapas mengatakan belum punya panduan bagaimana merangkul narapidana teroris ini, jelas mereka kesulitan mendekati orang yang masuk ke tahanan dengan ideologi yang mereka pahami dengan sangat kuat. Tidak mungkin itu bisa ditembus dengan pendekatan ‘4 pilar’ atau diceramahi ustadz yang tidak sesuai dengan pemahaman mer-

eka. Nah apa jadinya kalau orang dengan pemikiran kuat seperti ini bergaul dengan narapidana lain, bukan tidak mungkin mereka malah mempengaruhi,” ungkapnya.

Melihat kondisi ini beralasan kalau kemudian muncul wacana untuk membangun tahanan khusus bagi narapidana terorisme. Menempatkan mereka terpisah dari tahanan lain diyakini akan lebih memudahkan untuk menanamkan pemahaman baru terhadap apa yang sudah diyakini selama ini. Harry mengaku siap mendukung apabila pemerintah mengajukan proposal lengkap terkait ide ini.



Anggota Komisi III DPR RI, Ade Supriatna.

Sementara itu Ade menilai patut pula ditelaah lebih jauh kemungkinan untuk membangun lebih banyak tahanan khusus bagi napi korupsi. Sebagian besar dari mereka adalah para intelektual yang telah salah melangkah. Dengan pendekatan yang tepat ia meyakini tidak terlalu sulit untuk mengembalikan mereka dan bahkan memanfaatkan keahlian mereka untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat di lapas serta dilingkungan masyarakat yang lebih luas.

“Membangun itu mudah memang untuk diucapkan, direncanakan tapi sejauh ini realisasi yang sulit. Hampir semua persoalan kemudian terbentur pada politik anggaran pemerintah dalam upaya penegakan hukum. Kita lihat hal seperti ini bukan termasuk prioritas sejauh ini,” keluhnyaa.

Menyoal Pengetatan Remisi

Keputusan pemerintah mengeluarkan PP no.99/2012 tentang Pengetatan Remisi untuk narapidana korupsi, narkoba dan terorisme dinilai tidak tepat. Sejumlah temuan menunjukkan kebijakan itu malah membuat para napi menjadi frustrasi karena upaya mereka untuk berubah menjadi lebih baik tidak mendapat apresiasi.

“Dalam UU dijelaskan lapas adalah tempat pembinaan bukan balas dendam. Prinsip pembinaan kalau berbuat baik akan ada reward, pengurangan hukuman tadi. Setelah PP 99, upaya remisi diperketat mereka jadi hilang harapan, jadi agresif. Seharusnya kalau mau menambah efek jera beri hukuman maksimal 20, 30 tahun, seumur hidup kalau perlu,” kata anggota Komisi III Nudirman Munir.

Ia menambahkan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Lapas seluruh Indonesia beberapa waktu lalu banyak yang curhat, keputusan itu telah mempersulit tugas mereka dalam merangkul para napi. “Kita mencatat kebijakan ini ditolak Kalapas seluruh Indonesia, Dirjen Pemasyarakatan dan mantan dirjen yang bilang yang sama. Jadi sekarang menteri jangan menggambinghitamkan over capacity, itu seperti berlindung dibalik rumput sebatang,” tandasnya.

Bagi Harry sejumlah persoalan yang ada di Lapas saat ini seperti benang kusut yang memang harus di urai satu persatu. Kekerasan yang menyeruak di Tanjung Gusta, Labuan Ruku, Sumut atau bahkan Rutan Cipinang yang berada di Ibukota Jakarta harus dilihat sebagai dampak dari sejumlah persoalan yang membelit institusi ini. Pemerintah tidak bisa bersembunyi di balik persoalan kelebihan kapasitas. “Jadi saya harus katakan kalau bicara lapas sekarang ini yang ada ya problem, problem, problem,” pungkasnya. (iky) Foto risiko/iwan armanias/wahyu/perle.



AKANKAH RUPIAH TERUS MELEMAH?

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah mengeluarkan empat kebijakan ekonomi untuk menyikapi kondisi ekonomi yang sedang bergejolak. Salah satu hal yang membuat resah pasar adalah nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah masih bergerak liar terhadap mata uang yang dikenal dengan negara Paman Sam itu. Pada penghujung Agustus 2013, rupiah sedikit menguat, meski masih di posisi yang mendekati level Rp12.000/dolar AS.



Paket pertama yang ditawarkan pemerintah, kebijakan ditujukan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Paket ini diarahkan untuk mendorong ekspor dengan cara pemberian intensif dan keringanan pajak bagi industri yang sebagian produksinya berorientasi ekspor. Selain itu, kebijakan juga dalam bentuk menurunkan impor migas dan mendorong pengembangan sumber energi alternatif serta menetapkan pajak lebih tinggi bagi mobil *built up* dan barang impor bermerek.

Paket kedua, berisi kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, memastikan agar defisit APBN 2013 tetap sebesar 2,38 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembiayaan aman. Paket ketiga, berisi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Cara yang dilakukan, dengan mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari semula impor berdasarkan kuota menjadi impor dengan mengandalkan harga.

Paket keempat, berisi kebijakan mempercepat investasi. Pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegotiasi kontrak karya pertambangan.

Diharapkan, dengan adanya paket kebijakan ekonomi ini, kondisi ekonomi dalam negeri semakin membaik. Namun, sebagian kalangan menilai kebijakan ini terlambat dikeluarkan. Menanggapi empat kebijakan ini, Wakil Ketua Komisi XI Andi Rahmat menyatakan bahwa tidak ada kebijakan yang terlambat. Ia menyatakan, ada perkembangan baru yang tidak bisa dihindari, dan perkembangan baru ini lebih cepat dari yang diperkirakan pemerintah.

"Kebijakan itu pasti keluar setelah peristiwa terjadi. Tidak ada kebijakan yang terlambat. Yang perlu menjadi catatan adalah, kebijakan itu efektif atau tidak. Karena itu akan kami pertimbangkan assessment yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi," ujar Andi beberapa waktu lalu, ketika ditemui Parle di ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I.

Namun, Politisi PKS ini memberi catatan, kebijakan ini jangan ngambang atau hanya menjadi konsep. Pasalnya, kebijakan yang hanya menjadi konsep, justru malah akan merisaukan pasar. Sehingga, Komisi XI dan pemerintah sedang berusaha

agar empat kebijakan ekonomi ini dapat berjalan efektif.

"Komisi XI sudah lama memberi warning kepada pemerintah, kalau ada lubang yang sangat besar di dalam profil neraca pembayaran. Kalau hal ini tidak cepat-cepat diatasi, akan menjadi bom waktu. Nah, sekarang itu sudah terjadi," imbuah politisi dari Dapil Sulawesi Selatan III ini.

Sementara itu, masih terkait dengan nilai tukar rupiah, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menilai, melemahnya nilai tukar rupiah merupakan kesalahan Bank Indonesia (BI). Pasalnya,

sudah mencapai Rp 12.000 per dolar AS. Jadi artinya, secara Undang-undang BI dianggap bersalah," tegasnya.

Untuk itu, Komisi yang membidangi Ekonomi dan Perbankan ini meminta BI agar mampu menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Komisi XI meminta kurs rupiah stabil pada level Rp 10.000 hingga Rp 10.200, dimana angka ini dinilai tidak terlalu jauh dari asumsi ditetapkan pada APBN-P 2013 sebesar Rp 9.600.

"Rupiah pada akhir tahun minta dijadikan Rp 10.000 hingga Rp 10.200, tapi kami juga tetap



Menteri PPN/Bappenas Armida Ali Syahbana, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Gubernur BI Agus Martowardojo.

tujuan didirikannya BI adalah untuk menjaga stabilitas uang rupiah. Dimana stabilitas tersebut mencakup pada inflasi (kenaikan harga), termasuk nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.

"Dari segi undang-undang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kenaikan dolar yang terus meningkat adalah Bank Indonesia. Target dalam APBN di tahun 2013 yang sudah diumumkan Presiden seharusnya Rp 9.300, bahkan dalam Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus lalu, untuk RAPBN tahun 2014 dengan targetnya Rp 9.750 tapi sekarang

meminta supaya bisa di bawah itu, jadi tidak terlalu jauh dari angka APBN-P 2013 sebesar Rp 9.600," tambah Harry.

Harry menambahkan, memang akan terjadi deviasi nilai tukar yang tercantum dalam APBN-P 2013 dengan asumsi rupiah pada level Rp 9.600 diperkirakan akan sulit terealisasi. Hingga saat ini, rata-rata nilai tukar rupiah dari akhir Desember 2012 sampai 26 Agustus 2013 (year to date) sebesar Rp 9.800.

Menurut Politisi Golkar ini, jika pelemahan nilai tukar rupiah tidak



Pimpinan Banggar berdiskusi dengan Gubernur BI usai Rapat Kerja.

bisa dikontrol maka imbasnya akan merambah ke berbagai sektor. Dia menyarankan, langkah awal yang perlu diselesaikan pemerintah adalah memperbaiki sisi pasokan dan permintaan terhadap dolar AS. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah spekulasi. Harry mensinyalir adanya aksi para spekulasi yang turut memberikan pengaruh terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

“Menurut saya, yang penting saat ini kami akan menutup wilayah spekulasi dan memperbaiki level ekspektasi. Itu yang belum dilakukan sampai saat ini, Saya tanya ke BI, bisa tidak meneliti spekulasi itu dan ternyata mereka bilang gak bisa,” imbuh Harry.

Sementara itu, Andi menyatakan bahwa saat ini yang mempengaruhi perekonomian Indonesia variabelnya tidak tunggal, bukan hanya dari dalam Indonesia, tapi juga dari luar negeri yang tidak bisa dikontrol. Sehingga Komisi XI, ujar Andi, berusaha mengorganisir seluruh otoritas di bidang ekonomi untuk lebih optimal, dan untuk menutupi lubanganya.

“Perubahan posisi kurs ini indikasinya akan berdampak besar terhadap struktur dan postur RAPBN 2014. Dalam jangka pendek ini, pemerintah harus memiliki kesepakatan dengan seluruh otoritasnya, dan melihat garis merahnya apa yang sedang terjadi,” pesan Andi.

Kesepakatan Baru

Melihat realitas kondisi ekonomi terkini, Komisi XI dan pemerintah melakukan koreksi terhadap asumsi makro RAPBN 2014. Asumsi ini sedikit berbeda dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2014 beserta Nota Keuangannya, pada 16 Agustus lalu.

“Komisi XI meminta pemerintah untuk berupaya lebih keras menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan target-target rencana pembangunan jangka menengah nasional,” jelas Ketua Komisi XI Olly

Dondokombey, baru-baru ini.

Khusus untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, disepakati sebesar Rp 10.500 per dolar AS. Asumsi nilai tukar ini lebih lemah dibandingkan usulan sebelumnya, yakni Rp 9.750. Sebelum muncul kesepakatan, beberapa fraksi di Komisi XI memberikan koreksi dan memberikan beberapa usulan terkait perubahan asumsi.

Fraksi Golkar mengusulkan perubahan asumsi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yaitu sebesar Rp10.500. Sedangkan, Fraksi PKS mengusulkan perubahan sebesar Rp 10.000. Sementara itu, Fraksi PAN memberikan usulan perubahan pada asumsi kurs rupiah di posisi Rp 9.800. Dan, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan untuk kurs rupiah sebesar Rp 10.500.

Selain nilai tukar rupiah, sejumlah asumsi RAPBN 2014 yang dikoreksi dan disepakati diantaranya; untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditetapkan sebesar 6,0 persen dan tingkat inflasi 5,5 persen. Sementara itu, suku bunga relatif disepakati sebesar 5,5 persen. (sf)
Foto: [odjie/wahyu/parle](#).



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf saat memimpin rapat.

ANGGARAN KESEHATAN BELUM PENUHI AMANAT UNDANG-UNDANG

Pemerintah ingin merealisasikan program kesehatan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014. Namun, alokasi anggaran sektor kesehatan belum memenuhi amanat UU No.36/2009 tentang Kesehatan, yaitu 5% dari APBN. Bahkan, anggaran kesehatan untuk pemerintah daerah minimal 10% dari APBD.



Poempida Hidayatullah saat rapat di Komisi IX.



Menkes saat mengikuti rapat di Komisi IX.

Anggaran kesehatan sangat vital bagi rakyat kecil. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dinilai tidak optimal memperjuangkan anggaran kesehatan untuk rakyat kecil. Saat ini saja alokasi anggaran Kemenkes baru mencapai 2,7%. Masih jauh dari harapan UU.

Pasal 171, UU No.36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan, ayat (1): "Besarnya anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji." Ayat (2): "Besarnya anggaran kesehatan pemerintah kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji."

Rumusan pasal tersebut sangat bagus disusun. Tapi, perjuangan menuju anggaran kesehatan yang ideal tak semudah yang diharapkan. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam beberapa kali rapat kerja dengan Komisi IX DPR, sering mendapat kritik tajam, lantaran kurang *fight* memperjuangkan anggaran kese-

hatan terutama untuk rakyat kecil.

Parlementaria sempat meminta komentar Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh (F-PG) yang sangat vocal menyuarakan pentingnya peningkatan anggaran kesehatan. Menurut Poempida, anggaran kesehatan itu harusnya menjadi yang utama dibanding anggaran sektor lain. Poempida menegaskan, pemerintah tak perlu melebihi anggaran militer untuk membeli alutsista. Anggaran harus diprioritaskan untuk kesehatan masyarakat.

"Kalau pemerintah melanggar UU beberapa kali, ini kan ada konsekuensinya. Nanti pada saat akhir pemerintahan 2014, kita akan tolak pertanggungjawaban presiden. Simpel saja," tegasnya, saat ditemui usai rapat dengan Menkes beberapa waktu lalu. Poempida menilai negatif Menkes yang belum menunjukkan kemajuan berarti atas sikapnya memperjuangkan anggaran di kementeriannya.

"Kita sudah capelah *ngingetin*. Kementerian Keuangan juga bandel. Mereka enggak *ngasih* dananya," ungkap Poempida, emosional. Sementara Menkes sendiri mengaku, masih sulit mewujudkan alokasi anggaran 5% untuk sektor kesehatan seperti diamanatkan UU. Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dan banyak sektor yang perlu diperhatikan, membuat anggaran kesehatan belum mencapai target.

Presiden sendiri dalam pidato RAPBN 2014 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus lalu di DPR, menyebutkan, lewat program BPJS kesehatan tahun 2014, segera akan menambah kapasitas rumah sakit-rumah sakit dan puskesmas di daerah. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menambah tempat tidur kelas III.

Kita masih menunggu realisasi ini tahun depan. Tidak semua anggota DPR optimis atas program kesehatan yang dilontarkan presiden tersebut. Sebagian menilai, program itu mestinya sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya, bukan 2014. Setidaknya itulah yang dinyatakan Okky Asokawati, Anggota Komisi IX dari F-PPP. "Meskipun terlambat, saya berpendapat lebih baik terlambat daripada enggak punya," tutur Okky.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf (F-PD), mengatakan, alokasi anggaran kementerian harus linier dengan penyerapannya. "Anggaran harus linier dengan efektifitas pemanfaatan anggaran itu sendiri. Jangan sampai seperti yang dicontohkan di Kemendikbud ada penyiasatan anggaran," ungkapnya kepada Parlementaria usai memimpin rapat dengan Menkes beberapa waktu lalu.

Dampak Keterbatasan Anggaran

Nova Riyanti menjelaskan, Opini BPK sendiri terhadap laporan keuangan Kemenkes, Wajar Tanpa Pengecualian, meskipun masih 'Dengan Paragraf Penjelasan' (WTP

DPP). Itu berarti belum mencapai kemajuan laporan keuangan yang ideal. Sebelumnya, Kemenkes mendapat opini TMP (tidak memberikan pendapat) pada 2009 dan 2010. Kemudian pada 2011 mendapat WDP (wajar dengan pengecualian).

"Jadi, dalam pemanfaatan anggaran itu masih ada yang belum tepat," kata Nova lagi. Tampaknya masih butuh waktu beberapa tahun anggaran lagi untuk bisa mencapai

alokasi keuangan tersebut. "Saya menyatakan keprihatinan saya Bu Menteri," katanya saat rapat dengan Menkes awal September lalu.

Persoalan kesehatan masyarakat demikian pelik. Oleh karenanya, Okky berharap koleganya di Komisi IX yang bertugas pula di Banggar DPR, agar memperjuangkan anggaran kesehatan terus ditingkatkan hingga mencapai alokasi ideal yang diamanatkan UU. "Kalau saya lihat trennya dari tahun ke tahun prosen-

ke tahun."

Sementara Nova berharap, walaupun anggaran kesehatan belum mencapai 5% seperti diamanatkan UU, namun tak boleh memengaruhi target-target pencapaian yang sudah diprogramkan. "Mudah-mudahan dengan penganggaran sedemikian, saya berharap jangan sampai mengintervensi tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai."

Setidaknya, lanjut Nova, anggaran kesehatan yang ada, tetap harus mencapai Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra), dan lain-lain. Yang jelas, kata Nova, anggaran Kemenkes tidak boleh dimanipulasi atau dibarter dengan kementerian lain, yang dalam istilah Nova, tidak boleh "cawe-cawe".

Namun, Menkes sendiri dalam membahas usulan anggaran pada rapat kerja dengan Komisi IX, mengakui, keterbatasan anggaran berdampak pada kesiapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2014. Dalam konteks ini, program bantuan PBI (penerima bantuan iuran) untuk BPJS 2014 belum semuanya terlayani. Data dari Kemenkes, saat ini PBI baru 86,4 juta jiwa = Rp 19,93 triliun, belum termasuk masyarakat miskin dan kurang mampu yang dijamin Jamkesda.

Program SJSN lainnya juga terganggu, misalnya, meningkatkan kapasitas rumah sakit di daerah dengan menambah tempat tidur kelas III. Kebutuhan anggaran tahun 2014 untuk program yang satu ini mencapai Rp 7,404 triliun, namun yang teralokasi hanya Rp 4,347 triliun (58,7%).

Selain itu, keterbatasan anggaran ini berdampak pula pada anggaran preventif-promotif di Kemenkes sebesar Rp 3,64 triliun. Pos ini belum teranggarkan sesuai kebutuhan. Akhirnya, target akhir RPJMN, Renstra 2014, MDG 2015 juga sulit tercapai dengan keterbatasan anggaran ini. (mh) Foto: [odjie/parle](#).



Okky Asokawati anggota Komisi IX DPR.

5% dari APBN. Mengingat laporan keuangan Kemenkes belum meraih WTP seperti yang diharapkan. Apalagi, daya *fight* untuk memperjuangkan anggaran ideal tersebut kurang ditunjukkan oleh jajaran Kemenkes.

Ironisnya lagi, dalam pagu anggaran Kemenkes tahun 2014, ternyata hanya mendapat sebesar Rp 24,92 triliun. Berarti turun lagi alokasi anggaran tersebut menjadi 1,3%. Okky Asokawati memprihatinkan kondisi

tase anggaran kesehatan dibandingkan dengan APBN turun terus," sesal anggota F-PPP itu.

Menurut Okky lagi, lobi anggaran mesti dilakukan antara Kemenkes dan Kemenkeu. Dan yang melakukan lobi tidak boleh staf di kedua kementerian. "Lobi harus dilakukan oleh Menkes kepada Menkeu langsung. Dengan begitu, diupayakan anggaran kesehatan masyarakat bisa ditingkatkan terus dari tahun

RUU RTRI, OBAT KUAT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Kabar baik itu diputuskan pada saat Rapat Paripurna DPR (20/8) lalu. Pemerintah dan DPR menyetujui penambahan Prolegnas Prioritas tahun 2013, salah satu yang meluncur masuk daftar adalah usulan Komisi I, RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia).



Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.

"Iya kita memang mengusulkan RUU RTRI menjadi usul inisiatif DPR. Ini beranjak dari keinginan untuk memperkuat lembaga penyiaran publik kita, RRI dan TVRI supaya lebih berperan dalam dinamika dan keragaman bangsa ini," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq kepada Parle dalam kesempatan wawancara di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seperti halnya negara demokrasi maju lain di dunia, selalu ada lembaga penyiaran publik yang mengiringi dinamika perkembangan bangsa itu. Ada ABC di Australia, NHK di Jepang, BBC di Inggris, KBS di Korea atau PBS di Amerika. "Dibandingkan negara lain kita jauh tertinggal. Kehadiran lembaga penyiaran publik yang independen, di banyak negara terbukti dapat

menjadi penyeimbang bagi ragam informasi yang dimunculkan oleh media komersial," lanjutnya.

Mahfudz menambahkan pilihan pembenahan regulasi sebagai proses awal revitalisasi dipandang sebagai aspek mendasar. Apabila hal ini sudah diselesaikan barulah melangkah ke level selanjutnya kebijakan pemerintah dan tahap operasional yang dilaksanakan oleh manajemen RRI dan TVRI. Selama ini dua institusi penyiaran ini diatur dalam UU Penyiaran. Karena ada gagasan besar untuk revitalisasi maka pengaturan tentang LPP TVRI dan RRI dilakukan secara lebih komprehensif dengan sejumlah regulasi affirmative makanya kemudian lanjutannya berkembang ide untuk memisahkannya dari RUU Penyiaran.

Apakah itu berarti dua raksasa penyiaran ini akan di-merger? Politisi Fraksi PKS ini mengatakan terlalu dini untuk menyimpulkan hal itu karena sampai saat ini komisi yang dipimpinnya baru memasuki tahap penyusunan draf akamemis. "Kalau itu masih *optional*, nanti kita bicarakan pada saat membahas format kelembagaan tetapi kalau melihat sejumlah negara lain mereka sudah dalam satu institusi, apalagi dalam era konvergensi media seperti sekarang," paparnya.

Bicara pada kesempatan berbeda Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti mengatakan menyambut

baik rencana DPR untuk segera membahas RUU RTRI. Baginya semangat yang terkandung dalam produk legislasi itu adalah penggabungan atau sinergi antar dua institusi negara bukan peleburan. Ia menyebut tidak seperti media penyiaran publik di negara lain kehadiran RRI sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Segera setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, malam harinya pesan penting itu sudah disiarkan RRI keseluruh dunia. Ini yang kemudian ditangkap dan disebarluaskan oleh Radio India dan sejumlah radio lain di Asia Pasifik.

“Dunia akhirnya tahu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Belanda sendiri belum mengakuinya dan menyebut bangsa kita waktu itu sebagai republik mikrofon,” ungkap Niken. “Sejarah panjang itulah yang membuat sulit para angkasawan untuk melepas identitas, Inilah Radio Republik Indonesia.”

Kalau terjadi penggabungan RRI dan TVRI, ia menggambarkan seperti 2 lingkaran yang memiliki *intersection*, tempat dimana banyak hal dapat dan sudah dilakukan bersama. Pemberdayaan SDM, optimalisasi anggaran, pelaksanaan program bersama seperti Bintang Radio, Pekan Tilawatil Quran, *Quick Report* Pemilu merupakan agenda yang sudah dikembangkan dua institusi ini.

Penggabungan Dewan Pengawas

Salah satu opsi yang menjadi bahan kajian dalam RUU yang bocorannya memiliki 11 Bab dan 68 pasal ini adalah penggabungan dewan pengawas. Selama ini baik RRI maupun TVRI mempunyai dewan pengawas masing-masing yang dipilih lewat uji kepatutan dan kelayakan di DPR. “Kalau pilihan format penggabungan institusi



Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti.

ikutannya penggabungan dewan pengawas. Tapi itu nanti tergantung format kelembagaannya,” ujar Mahfudz.

Ia juga meminta publik memberikan *input* terbaik termasuk pada pilihan menjadikan dua lembaga besar ini menjadi satu misalnya menjadi Lembaga Penyiaran RTRI. Kalau kemudian masing-masing tetap mempertahankan identitas yang sudah ada baginya juga bukan persoalan utama. “Pilihan nama penggabungan itu masih jadi opsi yang bisa saja berubah,” tekannya.

Baginya satu yang penting harus dipertahankan adalah baik RRI maupun TVRI tidak akan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Layanan Usaha (BLU). Ia menekankan prinsip utama lembaga penyiaran publik adalah tidak bisa diperlakukan sebagai satu perusahaan komersial, mengejar profit. Ia kemudian menggaris bawahi pendapat pakar media Leo Batubara yang menyebut negara harus menjamin anggaran media penyiaran publik.

“Dalam dua tahun terakhir kita berkomitmen meningkatkan anggaran RRI dari Rp.600 ke 800 miliar. Tahun ini TVRI bahkan telah mencapai Rp.1 triliun. Persoalannya sekarang apakah peningkatan anggaran bisa efektif tidak, berkorelasi positif dengan kinerja. Yang saya lihat belum ada pembenahan sistematis sehingga akhirnya uang tidak bisa menjawab semua. Jadi kesimpulannya masih banyak yang perlu diselesaikan sebelum kita bicara anggaran,” imbuhnya.

Bagaimana dengan revisi RUU Penyiaran? Saat ini UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah mulai memasuki tahapan pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah. Ia menggarisbawahi apabila RUU RTRI selesai lebih dahulu nanti akan dibuat klausul semua aturan mengenai RRI dan TVRI dinyatakan tidak berlaku setelah UU ini disahkan. Dalam RUU penyiaran yang baru nantinya tidak ada lagi aturan tentang Lembaga Penyiaran Publik.

Ketika ditanya tentang target, Mahfudz menyebut masa sidang kali ini dapat menyelesaikan draf RUU. Komisi I menurutnya telah membentuk panitia kerja yang telah mulai melaksanakan tugas, melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk menghimpun masukan termasuk ke sejumlah stasiun RRI dan TVRI. Pada masa sidang selanjutnya barulah draf RUU diajukan untuk kemudian disahkan menjadi usul inisiatif DPR dan dibahas bersama pemerintah.

“Maunya kita selesai *as soon as possible*, makanya kita perlu dukungan teman-teman media. Kalau bisa selesai bareng dengan revisi RUU Penyiaran bagus. Nah biasanya kalau didorong media bisa lebih lancar pembahasannya,” pungkasnya sambil tersenyum. (iky) Foto: odjie/eka hindra/parle.

PERUBAHAN UU JASA KONSTRUKSI, KEBUTUHAN YANG TAK BISA DITUNDA-TUNDA

Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengatakan, urgensi dari perubahan UU Jasa Konstruksi (JK) atau UU No. 18/99 lantaran tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. "Ini prinsip dasarnya, sehingga UU tersebut perlu disempurnakan. Karena perubahannya lebih dari 50% maka tidak sekedar menyempurnakan tetapi mengganti atau dilakukan perubahan," ungkap politisi dari Partai Demokrat baru-baru ini di Komplek Parlemen

Menurut Mulyadi, dari aspek azas, perubahan UU tersebut menekankan adanya kesetaraan, hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Selanjutnya soal kebebasan, agar penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Masalah prinsip lainnya adalah terkait klasifikasi jasa konstruksi yang akan mengacu kepada standar internasional. Selama ini lanjut Mulyadi, jasa konstruksi asing be-



Anggota Komisi V DPR Mulyadi

lum diatur, karenanya harus diatur secara khusus dengan semangat melindungi badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi dalam negeri serta meningkatkan kapasitas dan daya saing termasuk proses transfer teknologi.

"Jangan sampai seperti pembangunan Jembatan Suramadu, tukang masaknya dibawa dari Cina. Ini perlu kita perhatikan dalam perubahan UU JK," paparnya.

Lebih lanjut, sambung Mulyadi, ada beberapa hal yang secara praktis dilihat Komisi V terkait dengan keamanan bangunan publik. Masalah itu juga menjadi sorotan, juga dalam rangka perlindungan masyarakat yang membeli jasa konstruksi, produk konstruksi misalnya

orang membeli rumah lalu kontraksinya bermasalah. Katanya, pernah ada yang mengadu ke Komisi V dan sudah teruskan ke LPJK akhirnya tidak selesai, kemudian masuk ke ranah hukum atau penyelesaian pidana biasa. "Seharusnya ini juga diatur secara jelas dalam UU JK".

RUU Perubahan UU Jasa Konstruksi (JK) telah dimasukkan ke Baleg setelah dilakukan pembulatan dan pemantapan di Komisi V, dan akhir September dibahas dengan Baleg, setelah itu ke Sidang Paripurna untuk diputuskan alat kelengkapan Dewan yaitu Komisi V yang membahas RUU ini.

Meski demikian, dia mengakui pembahasan RUU ini masih cukup panjang, diperkirakan setelah pe-

milu bulan April 2014. "Ada waktu April-Oktober sampai akhir periode DPR 2009-2014," ungkap Mulyadi

APBN. Itu adalah konsep yang akan dilakukan pembulatan dan peman-tapan di Baleg.

"Ini juga akan diperjelas, dalam RUU JK menjadi bahasan kita, karena menjadi perdebatan waktu diundang BP Kontruksi maupun LPJK".

Sanksi pidana.

Di lihat sistematika yang ada, lanjut Mulyadi, banyak sekali perubahan. Termasuk sanksi pidana yang dalam UU lama tidak begitu jelas, makanya harus diperjelas. Pasalnya sebuah perangkat undang-undang harus ada sanksi pidananya. "Buat apa UU dibuat kalau tak ada sanksinya, supaya masyarakat bisa terlindungi," tukasnya.

Di sisi lain, dalam UU yang baru nanti pelaku kontruksi harus ada kepastian, sementara masalah kontruksi semakin lama semakin berkembang dan makin banyak persoalan yang timbul. Dengan lebih tegas anggota Dewan ini mengatakan, perubahan UU JK merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda.

Dari sisi kelembagaan, kata Mulyadi, melalui perubahan UU JK kita ingin menempatkan persoalan kontruksi ini menjadi lebih *clear*, salah satu yang menjadi sorotan adalah sertifikasi. Dalam prakteknya, sertifikasi belum sepenuhnya dijadikan acuan dan merupakan bukti kompetensi. Dewan menginginkan supaya aspek pembinaan itu betul-betul menjadi ranahnya pemerintah. Sedangkan pengembangan itu menjadi ranah masyarakat jasa konstruksi.

Terkait masalah sertifikasi kita kembalikan kepada ranah yang betul-betul independen. "Kalau dulu sertifikasi itu ada di pemerintah, dengan pengalaman selama ini banyak persoalan sehingga kita cari solusinya dalam penyelesaian RUU Kontruksi, kita usulkan Badan Akreditasi dan sertifikasi yang bersifat independen," kata dia dengan menambahkan, bahkan diusulkan, pemasukan dari sertifikasi itu dijadikan semacam penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan proses sertifikasi dibiayai sepenuhnya oleh



Pakar Konstruksi Prof. Sudradjat.

Politisi dari Partai Demokrat ini juga melihat lemahnya daya saing jasa kontruksi nasional sebagai akibat liberalisasi perdagangan jasa kontruksi. Yang masih menjadi perdebatan bahwa arsitektur, mekanikal dan tata lingkungan dan dianggap tidak *compatible* dan berstandar internasional.

Kemudian keragaman jenis dan proses sertifikasi di lapangan sehingga sertifikasi belum menjadi masalah prioritas yang mengakibatkan lemahnya kompetisi SDM bidang jasa kontruksi. Masalah lain adalah standar keselamatan kontruksi dan jaminan pembiayaan belum rinci diatur sehingga mengakibatkan resiko kegagalan pekerjaan kontruksi yang tinggi.

Kalau bicara masalah kegagalan kontruksi dan bangunan ada beberapa hal yang menjadi studi kasus yang terkait dengan robohnya jembatan Kutai Kartanegara. Memang menjadi bias, seberapa jauh tanggungjawab tenaga ahli sementara kontraknya adalah perusahaan. Dan seberapa jauh tanggungjawab perusahaan, kalau kesalahan itu dilakukan dalam perencanaan atau pengawasan oleh tenaga ahli tertentu.

Pakar Konstruksi Prof Sudradjat mengatakan, sependapat dengan Komisi V bahwa UU Jasa Konstruksi harus diubah tidak sekedar revisi karena 50% lebih materinya diubah. Bahwa apa yang ada di lapangan bukan saja tidak sempurna, tetapi banyak kekurangannya. Apakah sistem atau peraturannya yang harus dirombak, atau orangnya yang dirombak sebab variasinya cukup besar.

Dalam UU JK ada pasal yang mengatakan, setiap pekerja kontruksi harus punya sertifikat keahlian, artinya kalau ingin menjadi pekerja kontruksi kuliah atau sekolah, begitu lulus boleh bekerja kalau punya sertifikat. Padahal praktek di dunia, sertifikat tidak mungkin didapat dari lulusan akademik." Jadi seharusnya ada masa magang," tandasnya.

Masalah sertifikat sangat kompleks. Ditegaskan Sudradjat, seharusnya kalau ada kegiatan jasa kontruksi ada *owner*, kontraktor, ada konsultan dan pemerintah yang mengawasi keamanan publik, semua yang terlibat proses kontruksi tadi harus bersertifikat atau keahlian yang sesuai bidangnya.

Tapi prakteknya, yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan memeriksa, tidak ada keharusan bersertifikat. Kontraktornya harus bersertifikat, konsultannya juga harus bersertifikat, tapi yang memeriksa dan memberi ijin tidak perlu bersertifikat.

"Yang jadi masalah, kalau pemeriksa atau pengawas harus bersertifikat, harus melalui ujian atau saringan, bagaimana kalau tidak lulus. Apa harus turun jabatan. Mari kita perbaiki bersama secara bertahap," imbuhnya. (mp) Foto: wahyu/parle.



Tetap Bersaudara

Ruhut Sitompul berjabat tangan dengan Syarifudin Sudding. Meski berbeda pandangan tetap bersaudara.

Foto: wahyu/parle.



Kagumi Produksi Dalam Negeri

Foto: ical/parle.

Tim Komisi V DPR RI dipimpin Ketuanya Laurens Bahang Dama menikmati gerbong baru produksi PT INKA Madiun.





Diskusi Century

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso bersama anggota Timwas Century berdialog dengan Ketua KPK menjelang rapat.

Foto: iwan armanias/parle.



PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH



Oleh: dr. Happy Apriyanti, MKK, Sp.Ok

Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) pada saat ini masih menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian baik di Indonesia maupun di negara-negara maju. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Departemen Kesehatan RI, tahun 2001, PJPD menempati urutan tertinggi sebagai penyebab kematian di Indonesia (26.4%), angka ini meningkat tajam dari tahun 1992 (9.9%) dan tahun 1995 (19%).

Fakta di Amerika Serikat, sekitar 600.000 orang meninggal karena penyakit jantung di Amerika Serikat setiap tahun itu 1 dalam setiap 4 kematian. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian bagi pria dan wanita. Lebih dari setengah dari kematian akibat penyakit jantung di tahun 2009 adalah pada pria. Penyakit jantung koroner adalah jenis paling umum dari penyakit jantung, menewaskan lebih dari 385.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun sekitar 715.000 orang Amerika mengalami serangan jantung. Dari jumlah tersebut, 525.000 adalah serangan jantung yang pertama dan 190.000 terjadi pada orang yang telah mengalami serangan jantung. Penyakit Jantung Koroner memakan biaya \$108.900.000.000 setiap tahun. Jumlah ini meliputi biaya pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan kehilangan produktivitas.

“Kalau perpustakaan dikelola dengan baik bisa mendorong minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat meningkat tentu akan mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa,” tambahnya.

Apakah yang dimaksud dengan penyakit arteri koroner?

Penyakit arteri koroner terjadi ketika zat yang disebut plak menumpuk di arteri yang memasok darah ke jantung (disebut arteri koroner). Plak terdiri dari kolesterol deposito, yang dapat menumpuk di arteri anda. Dan dapat mempersempit lumen arteri dari waktu ke waktu. Proses ini disebut *aterosklerosis*. Plak dapat menimbulkan gejala nyeri dada, atau ketidaknyamanan, gejala yang paling umum dari penyakit arteri koroner. Hal ini disebabkan karena otot jantung tidak mendapatkan darah yang cukup. Seiring waktu, penyakit arteri koroner dapat melemahkan otot jantung. Hal ini dapat menyebabkan gagal jantung, suatu kondisi serius di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan cara yang seharusnya..

Bagi sebagian orang, tanda pertama dari penyakit arteri koroner adalah serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika plak benar-benar menyumbat arteri yang membawa darah ke jantung.

Tes penting

Dokter dapat menentukan risiko anda untuk penyakit arteri koroner, dengan memeriksa tekanan darah, kolesterol, dan glukosa darah, dan dengan mencari tahu lebih banyak tentang sejarah keluarga dari penyakit jantung. Jika anda berisiko tinggi atau sudah memiliki gejala, dokter dapat melakukan beberapa tes untuk mendiagnosa penyakit arteri koroner, termasuk :

Uji	Kegunaan
EKG	Mengukur aktifitas listrik, tingkat, dan keteraturan detak jantung anda
Echokardiogram	Menggunakan ultrasound untuk membuat gambaran jantung
Stress test exercise	Mengukur detak jantung saat berjalan di atas treadmill. Hal ini membantu untuk menentukan seberapa baik jantung anda bekerja ketika harus memompa lebih banyak darah
X ray dada	Membuat gambar jantung, paru-paru dan organ lainnya di dada
Kateterisasi jantung	Cek ada atau tidaknya penyumbatan bagian dalam arteri untuk penyumbatan dengan memasukkan alat yang tipis dan fleksibel melalui arteri pangkal paha, lengan atau leher untuk mencapai arteri koroner. Juga dapat digunakan untuk mengukur tekanan darah dan aliran dalam ruang jantung, mengumpulkan sampel darah dari jantung, atau menyuntikkan pewarna ke dalam arteri koroner.
Angiogram koroner	Monitor penyumbatan aliran darah melalui jantung. Menggunakan sinar X untuk mendeteksi kontras yang disuntikkan melalui kateterisasi jantung

Serangan Jantung

Serangan jantung juga disebut *infark miokard*, terjadi ketika bagian dari otot jantung mati atau mengalami kerusakan karena suplai darah berkurang. Penyakit Arteri Koroner (CAD) merupakan penyebab utama serangan jantung. Penyebab lain yang jarang terjadi adalah kejang parah dari arteri koroner, yang juga dapat mencegah suplai darah dari mencapai jantung.

Penting sekali untuk segera mencari pertolongan pada

tahap ini, karena jika tidak, akan terjadi kerusakan lebih lanjut, ritme jantung menjadi tidak teratur, dan jantung dapat berhenti mendadak, dan bila tidak mendapat pertolongan dalam beberapa menit.

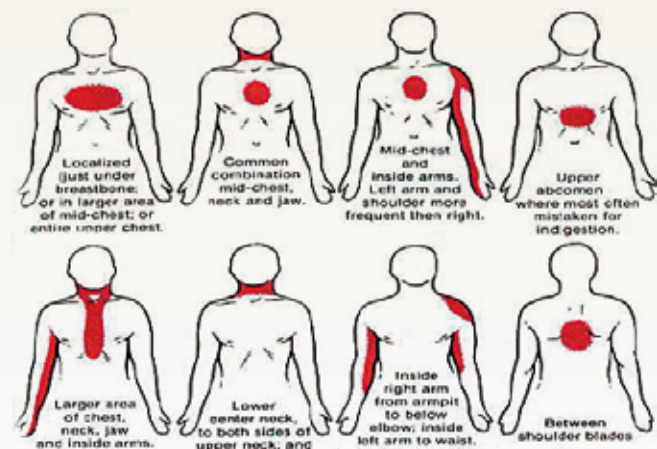
Apa saja yang menjadi Faktor Risiko Penyakit Jantung?

Beberapa kondisi serta beberapa faktor gaya hidup dapat menempatkan orang pada risiko tinggi untuk mengembangkan penyakit jantung. Semua orang dapat mengambil langkah-langkah untuk menurunkan faktor risiko jantung dan serangan jantung, dengan mengatasi faktor-faktor risiko. Pengendalian faktor risiko terutama dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah memiliki penyakit jantung sebelumnya.

Tekanan darah tinggi, Kolesterol LDL tinggi dan Merokok merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Beberapa kondisi medis lain dan gaya hidup, juga dapat menempatkan orang pada risiko tinggi untuk penyakit jantung, anatar lain : Diabetes (penyakit kencing manis), kegemukan/obesitas, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan penggunaan alkohol yang berlebihan

Serangan jantung memiliki beberapa tanda-tanda peringatan utama dan gejala :

1. Nyeri dada atau ketidaknyamanan
2. Nyeri tubuh bagian atas atau ketidaknyamanan pada lengan, punggung, leher, rahang, atau perut bagian atas.
3. Sesak nafas.
4. Jantung berdebar (palpitasi)
5. Sinkop/pingsan
6. Mual, pusing, berkeringat atau dingin
7. Henti jantung



Gambar 1. Gejala awal serangan jantung

NYERI DADA

Nyeri dada merupakan keluhan yang sangat umum.

Namun, penyebab dari gejala ini dapat berasal dari faktor lain dari luar jantung, seperti pencernaan, otot bahkan sampai pada pskososial misalnya akibat ada masalah ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan diagnosis terlebih dahulu, pada pasien dengan keluhan nyeri dada. Anamnesis perlu dilakukan untuk bisa memberi penanganan yang tepat. Hal yang perlu diketahui :

1. Kualitas, Durasi, Keparahan serta Penyebaran nyeri. Nyeri dada yang dipengaruhi jantung umumnya menyebar ke tungkai kiri atas leher dan punggung, rasanya seringkali digambarkan seperti diremas dibakar, ditimpa atau bisul yang hampir pecah. Durasi minimal 30 menit pada miokard infark
2. Riwayat Penyakit Korban. Apakah pernah terserang sebelumnya, apakah ada keluarga yang mengalami serangan, sejak kapan mulai nyeri?
3. Faktor risiko yang dimiliki. Merokok, hipertensi, DM, dll merupakan faktor risiko terjadinya sindrom koroner akut.
4. Gejala Penyerta. Nyeri dada akibat kerusakan jantung biasanya disertai dengan sesak nafas, keringat berlebihan, dsb

Syncope

Syncope itu nama lainnya pingsan, arti kedokterannya adalah, suatu keadaan dimana terjadi kehilangan kesadaran tiba-tiba yang sembuh sendiri (selflimited) yang selalu dibarengi dengan maneuver jatuh. Pingsan diakibatkan berkurangnya pasokan darah ke otak sehingga terjadi pengurangan curah jantung, atau penurunan resistensi perifer. Ketika resistensi perifer turun, maka darah akan banyak tertampung di perifer (misalnya di kaki ketika lama berdiri,) akibatnya volume darah balik ke jantung sedikit, curah jantung juga semakin sedikit, akibatnya aliran darah ke otak tidak mencukupi.

Ketika otak tidak memperoleh darah selama 6-8 detik maka pingsan dapat terjadi baik secara tiba-tiba atau dimulai oleh rasa pusing , bergoyang atau menurunnya pandangan.

Penyebab timbulnya pingsan dapat dibagi 4 kelompok besar :

1. Faktor Neural. Mekanismenya melalui vasovagal, situasi emosi atau hipersensitifitas sinus karotikus (misalnya pemasangan kerah/korset terlalu ketat bisa bikin sinus karotikus terangsang dan membuat tekanan darah turun dan pingsan).
2. Ortostatik (berkaitan dengan berdiri tegak) misalnya berdiri terlalu lama. Bisa juga diperkuat oleh efek obat-obatan atau penurunan volume darah.
3. Aritmia jantung. Misal disfungsi sinus node, blok AV, aritmia tiba-tiba (paroksismal), serta
4. Penyebab lainnya .

Korban pingsan perlu memperoleh pemeriksaan seksa-

ma, diantaranya pemeriksaan tanda vital, bunyi jantung, EKG, pemeriksaan gula darah. Selain itu kita perlu membuang kemungkinan penyebab lain seperti epilepsi, pingsan psikogenik, hipoglikemia, intoksikasi (keracunan). Tata laksana pingsan adalah dengan membaringkan pasien pada posisi terlentang, pemberian oksigen, cairan maupun vasopressor bila diperlukan selain itu perlu juga diberikan edukasi untuk pencegahan serta penanganan yang lebih baik, misalnya dengan mempersiapkan obat atau memakai pacemaker.

Pengobatan

Aksi dini adalah kunci

Orang-orang yang mengalami serangan jantung perlu perawatan darurat yang disebut sebagai Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) atau sengatan listrik (defibrilasi). Itulah mengapa Anda perlu bertindak cepat setelah tanda-tanda dan gejala serangan jantung.

Ingat kemungkinan bertahan hidup dari serangan jantung lebih banyak pada perawatan darurat segera dimulai.

Apabila kita menemukan suatu kegawatdaruratan jantung atau kardiovaskular ada yang disebut dengan Cardiac Chain Survival. Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Survei daerah. Lihat kondisi daerah usahakan lokasi aman buat korban dan kita sendiri jangan sampai kita digilas truk saat menyelamatkan korban atau apabila penderita berada di sebuah gedung bertingkat, pastikan jalur evakuasi pasien yang bisa membawa pasien ke mobil ambulance secepat mungkin
2. RAP (respon, aktif, position). Respons dengan cek kesadaran korban, memanggil dan menggoncangkan tubuh korban. Segera meminta bantuan tenaga medis, bisa rumah sakit/klinik terdekat, posisikan pasien pada kondisi nyaman rata dan tidak mudah bergeser-geseer. Perhatikan apakah ada trauma kepala/ cervical
3. Cek ABCD (airway, breathing, circulation, disability/ defibrillator)

Jika korban ditemukan tidak bernafas jangan malu-malu untuk beri bantuan nafas. Jika denyut nadi tidak terasa, maka lakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru). Apabila sampai 30 menit korban tidak membaik maka diperbolehkan untuk menghentikan RJP.

Prognosis

Jika anda pernah mengalami serangan jantung, jantung anda masih dapat rusak. Hal ini dapat mempengaruhi irama jantung anda, memompakan tindakan, dan sirkulasi darah. Anda juga mungkin berisiko untuk serangan jantung atau kondisinya seperti stroke, gangguan ginjal dan penyakit arteri perifer. Tapi ada beberapa langkah yang dapat anda ambil untuk menurunkan kesempatan anda mengalami kesehatan masa depan.

Dokter mungkin merekomendasikan rehabilitasi jantung yang merupakan program yang dapat membantu anda membuat perubahan gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan jantung anda dan kualitas hidup. Perubahan ini mungkin termasuk minum obat, mengubah apa yang anda makan, meningkatkan aktifitas fisik anda, berhenti merokok, dan mengelola stress. juga pastikan untuk berbicara dengan dokter anda tentang kegiatan sehari-hari. Dia mungkin ingin anda untuk membatasi pekerjaan, perjalanan jenis kelamin atau berolahraga

Pencegahan : Yang Dapat Anda Lakukan

1. Gaya Hidup Sehat

Makan makanan yang sehat. Memilih makanan sehat dan pilihlah makanan ringan dapat membantu Anda menghindari penyakit jantung dan komplikasinya. Pastikan untuk makan banyak buah-buahan dan sayuran segar.

Mengonsumsi makanan rendah lemak jenuh dan kolesterol dan memakan makanan yang tinggi serat, membatasi garam atau natrium dalam diet juga.

2. Menjaga berat badan yang sehat.

Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Untuk menentukan apakah berat badan anda dalam kisaran yang sehat dokter sering menghitung jumlah yang disebut indeks massa tubuh (BMI). Dokter kadang-kadang juga menggunakan pinggang dan pinggul pengukuran untuk mengukur kelebihan lemak tubuh seseorang

3. Berolahraga secara teratur. Aktifitas fisik dapat membantu Anda mempertahankan berat badan yang sehat dan menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Para Ahli Bedah Umum merekomendasikan orang dewasa melakukan exercise dalam intensitas sedang, selama 2 jam dan 30 menit setiap minggu

4. Jangan merokok. Merokok sangat meningkatkan risiko penyakit jantung, jadi jika anda tidak merokok jangan mulai. Jika anda merokok, berhenti akan menurunkan risiko penyakit jantung. dokter dapat menyarankan cara untuk membuat anda berhenti

5. Batasi penggunaan alkohol. hindari minum terlalu banyak alkohol, yang menyebabkan tekanan darah tinggi.

Sumber :
www.who.int/mdicentre/factsheets/fs317/
www.cdccgov/heartdisease



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



POLITISI MUDA YANG BERSAHAJA

Ramah menyapa. Tenang dan penuh kharisma. Saat Parlementaria menemuinya, ia menyambut dengan sangat baik. Inilah Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Sosoknya tampak bersahaja dan religius. Bicaranya berwawasan penuh keilmuan. Bahkan, keteduhan jiwanya membuat nyaman semua orang yang diajak bicara.

Saat ditemui, Agus berbusana batik, begitu rapihnya. Busana khas Indonesia ini, selalu ia kenakan saat bertugas menghadiri rapat-rapat kerja di DPR RI. Busana batik tak pernah lepas dari kesehariannya. Kapan dan di mana pun bertemu dengan seorang Agus Gumiwang Kartasasmita, batik melekat di tubuhnya. Berbatik sudah menjadi citra dirinya. Bisa dikatakan, tiada hari tanpa berbatik.

Kepada Parlementaria, Agus bercerita banyak tentang masa kecilnya di Ibu Kota dan romantika masa muda yang penuh kenakalan. Ia senang bisa berbagi kenangan dan pengalaman hidup. Bicara soal dunia militer dan politik luar negeri, Agus adalah orang yang tepat untuk diajak bicara. Ia begitu interes dengan kebijakan politik makro di Indonesia.

Antara Prestasi dan Kenakalan

Jakarta, 1969. Kondisi Ibu Kota belum seramai seperti sekarang. Jalan raya relatif lengang. Pemukiman belum padat. Gedung-gedung bertingkat juga belum banyak terlihat dan menjulang tinggi seperti saat ini. Yang terlihat justru rawa-rawa, lahan kosong dengan pepohonan rindang, dan pemukiman kumuh.

Sementara itu, sepasang insan sedang berbahagia, karena segera dikaruniai anak kedua. Kediannya berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Adalah Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina yang sedang berbahagia itu. Tangis bayi mungil telah memecah kesunyian dan ketegangan. Tahmid tiada henti terucap sebagai ungkapan rasa syukur telah dikarunia anak kedua berjenis kelamin laki-laki.

Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 3 Januari 1969. Kini, kediaman Ginandjar dan Yultin,

penuh keceriaan dengan kehadiran "jagoan kecil". Kedua orangtua sang bayi memberinya nama, Agus Gumiwang Kartasasmita. Setelah kelahiran Agus ini, masih ada dua adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Agus adalah anak kedua dari empat bersaudara.

Ayah sang bayi adalah perwira militer. Sementara ibundanya sosok bersahaja yang sangat mencintai keluarga. Ayah dan ibunda Agus berdarah sunda. Agus hidup di tengah keluarga yang penuh disiplin dan religius. Masa kecil Agus di-

Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Masa kecil penuh keceriaan. Ia suka bermain bola bersama sahabat-sahabat kecilnya. Agus juga sangat suka bermain galasin dan kasti. "Hampir semua permainan rakyat saya suka," katanya. Kecuali permainan yang menggunakan kelihaian jemari seperti gundu dan gasing, ia tak piawai memainkannya. Untuk permainan kasti, Agus meneruskannya hingga menyukai permainan bisball. Belum banyak anak Jakarta ketika itu yang menyukai bisball.



Agus Gumiwang saat berada di Palestina.

habiskan di Jakarta, karena kebetulan ayahnya bertugas di Ibu Kota ini.

Agus tumbuh menjadi anak yang periang dan suka bermain. Keingintahuannya pada sesuatu begitu besar mengikuti perkembangan hidupnya. Kawasan Jakarta Selatan, merupakan tempat Agus kecil dahulu bermain. Di tahun 1970-an kawasan ini masih tanah kosong dan berawa-rawa. Dahulu, Agus punya motor kecil yang kerap ia kendarai di sekitar rawa yang sekarang menjadi jalan arteri

Bahkan, ia sempat masuk club bisball satu-satunya di Jakarta waktu itu, bernama Falcon. Agus begitu gandrung pada bisball, hingga ia pernah mengikuti kejuaraan bisball junior antarkota se-Asia di Taipei. Ia mewakili Jakarta ketika itu. Karena peminat bisball sangat sedikit di Jakarta, maka clubnya menarik anak-anak orang asing yang kebetulan bersekolah di Jakarta. Anak asli Indonesianya sendiri hanya 2 orang termasuk Agus.

Memasuki usia sekolah, pendidik-

an formal perdana Agus adalah di SD Pangudiluhur, Jakarta Selatan, tahun 1975. Ia biasa diantar ayahnya ke sekolah yang berada di kawasan Jl. H.Nawi, Jakarta Selatan. Namun, pulang sekolah, ia kerap naik bus kota yang jaraknya tak jauh dari rumah. "Naik bus relatif aman dan bersih tidak seperti sekarang. Dan bus itu satu jalur hingga ke rumah saya," ujarnya.

Di sekolah, Agus sangat suka pelajaran matematika. Kecerdasan Agus selalu menempatkannya pada ranking teratas di kelasnya sepanjang 6 tahun di SD. Soal prestasi belajar, ia hanya bersaing dengan teman sekelasnya bernama Rizka. Ranking 1 dan 2 selalu bergantian antara dirinya dan Rizka. Tak hanya itu, Agus kecil juga selalu dipercaya menjadi ketua kelas.

Bahkan, setiap hari Senin, Agus selalu didaulat menjadi komandan upacara di sekolahnya. Agus sendiri tak mengetahui, mengapa ia selalu dipercaya memimpin teman-temannya di kelas dan menjadi seorang komandan upacara. Mungkin pertimbangan para gurunya ketika itu, karena ia siswa berprestasi dan pemberani.

Ada kejadian menarik saat masih di SD. Suatu hari di dalam kelas, Agus duduk di atas kursi. Dahulu, kursi sekolah dari kayu jati itu, memiliki lubang-lubang kecil di tengahnya. Sambil duduk, Agus *iseng* memasukkan jarinya ke lubang kursi. Tak dinyana, jari Agus tak bisa dikeluarkan lagi dari lubang tersebut. Jarinya tersangkut, karena ukuran lubang dan jarinya begitu pas.

Agus panik. Ia minta bantuan teman-temannya dan guru. Setelah dibantu,

jarinya tetap sulit dikeluarkan. Seisi kelas ikut panik dan resah. Satu-satunya jalan adalah menggergaji kursi tersebut, agar jari Agus bisa selamat dari himpitan lubang kursi. Kursi pun digergaji dan jari Agus akhirnya bisa dikeluarkan. Kenangan yang menghebohkan satu sekolah.

Tahun 1981, Agus menamatkan SD dan langsung melanjutkan di yayasan sekolah yang sama, SMP Pangudiluhur. Prestasinya masih terus berlanjut di SMP. Selain matematika, Agus menyukai pula pelajaran sejarah. Namun, prestasi akademiknya dibarengi pula dengan kenakalan masa kecil di sekolah. Berkelahi hampir menjadi warna hidupnya. Dihukum di sekolah hampir setiap hari.

"Saya adalah salah satu anak yang paling nakal. Memori masa kecil penuh dengan kenakalan. Dasar pribadi saya selalu ingin tahu dan berani mengambil risiko."

"Saya adalah salah satu anak yang paling nakal. Memori masa kecil penuh dengan kenakalan. Dasar pribadi saya selalu ingin tahu dan berani mengambil risiko. Berkelahi sudah seringlah di SMP," akunya, mengenang masa sekolah. Di angkatannya, boleh dibilang Agus adalah yang ternakal. Kenakalannya telah merepotkan sekolah dan orangtuanya sendiri.

Berkelahi sudah seringlah di SMP," akunya, mengenang masa sekolah. Di angkatannya, boleh dibilang Agus adalah yang ternakal. Kenakalannya telah merepotkan sekolah dan orangtuanya sendiri.

"Saya ingat, ibu saya ketika saya di SMP, hampir setiap dua minggu sekali dipanggil ke sekolah. Mungkin tingkat kenakalan saya di atas rata-rata anak-anak lain,"



ceritanya, penuh tawa. Begitulah perilaku Agus kecil di sekolah. Ia sudah mendapat stigma anak nakal.

Bahkan, sepupunya yang 6 tahun lebih muda darinya dan juga bersekolah di SMP Pangudiluhur pernah mengabarkan kepada dirinya bahwa nama Agus Gumiwang Kartasmita tertulis di dinding kantor kepala sekolah, sebagai siswa ternakal di angkatan bersama siswa-siswa lain dari angkatan berbeda. Agus terseyum mendengar kabar itu.

Kesaksian sepupunya didengarnya setelah ia tamat SMP. Dan hingga kini ia sendiri belum pernah mengecek kebenaran kabar itu di sekolahnya. "Nama saya itu dianggap oleh kepala sekolah yang ternakal." Sebenarnya, saat memasuki bangku SMP, ayahnya sendiri sudah menjabat menteri dalam kabinet yang dipimpin mendiang Presiden Soeharto waktu itu. Ia anak seorang menteri.

Namun, kenakalan Agus dibarengi pula dengan prestasi akademiknya yang mentereng. Ayahnya sendiri tak terlalu mengkhawatirkan kenakalan Agus sepanjang dinilainya masih wajar. Tapi, bila citra buruk itu menyangkut nilai dan prestasi di sekolah, ayahnya pasti marah. Sang ayah ingin Agus menjadi siswa cerdas agar mudah mengukir cita-citanya setinggi langit.

Dan bila ditanya cita-citanya sewaktu kecil, Agus sempat ingin menjadi tentara. Mungkin lingkungan ikut mempengaruhi pandangan Agus kecil yang melihat ayahnya seorang perwira TNI. Namun di sisi lain, karir politik ayahnya yang cemerlang di pemerintahan, ikut pula memengaruhi bakat seorang Agus kecil yang mengantarkannya menjadi politisi kelak.

Menuntut Ilmu Ke Amerika

Setamat SMP tahun 1984, Agus sempat melanjutkan sekolah ke SMA Kanisius Jakarta. Hanya setahun di sekolah ini, Agus hijrah ke Amerika. Ia melanjutkan sekolah di *Knox*



Agus Gumiwang saat memimpin rapat Komisi I DPR.

High School, New York, tahun 1985. Ayahnya, memang, sengaja menyekolahkan Agus ke luar negeri agar bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tak hanya itu, di Amerika ia tak hanya menuntut ilmu, tapi juga bisa belajar tentang kehidupan.

Agus bergaul dengan banyak pemuda dari berbagai bangsa dengan kultur yang beragam. Di Amerika, kenakalannya relatif tak berlanjut. Adaptasi dengan lingkungan barunya yang asing agak sulit dilakukan Agus muda di negeri Paman Sam. Rindu kampung halaman selalu menghantui di hari-hari pertamanya. Namun, seiring berjalannya waktu ia bisa beradaptasi dengan baik.

Tinggal di asrama sekolah tentu terikat disiplin. Bila tinggal di Jakarta begitu enak, di New York, ia banyak dibatasi. Setahun di New York, tahun 1986, Agus kembali pindah sekolah ke *Williston Northantom*

High School, Massachusetts. Kesempatan sekolah di Amerika dimanfaatkan betul oleh Agus untuk belajar banyak hal. Ia mulai tampak matang dan dewasa.

Setiap kali libur sekolah, Agus menyempatkan pulang ke Tanah Air. Tidak saja untuk mengobati rasa rindu pada keluarga, tapi selama di Jakarta, ia justru aktif berorganisasi. Ia sempat masuk Generasi Muda FKPPi. Berorganisasi merupakan wahana tepat bagi pemuda Agus untuk mengasah diri menajamkan daya kritis dan kepekaan sosialnya. Dari sinilah ia mulai gandrung pada dunia politik.

Di Amerika sendiri, Agus malah tak aktif berorganisasi. Memasuki tahun 1987, Agus sudah merampungkan sekolahnya. Ia langsung ingin melanjutkan kuliah di Amerika. Kesukaannya pada dunia politik, membuatnya ingin mengambil jurusan ilmu politik. Ia merasa sudah mantap dengan pilihannya.



Agus Gumiwang saat bersama delegasi Senator Amerika.

“Saya percaya bahwa politik itu tentang pengalaman. Kalau kita rajin mengikuti dan punya bakat, pasti bisa dengan cepat, sehingga tidak akan ada kesulitan untuk menjadi politisi yang profesional,”

Namun, terjadi diskusi menarik dengan ayahnya, sebelum Agus benar-benar melanjutkan kuliah.

Sang ayah menyarankan, bila ingin menjadi politisi tak harus mengambil jurusan ilmu politik. Dunia politik bisa dipelajari sendiri dari lingkungan, pengalaman, dan *wisdom*. Lebih baik mengambil ilmu lain untuk melengkapi wawasan keilmuan sebagai bekal menjadi politisi kelak. Awalnya, Agus tak terima dengan pandang ayahnya. Ia masih bersikukuh dengan jurusan ilmu politik.

“Kalau kamu mau jadi politisi, enggak perlu sekolah. Jadi politisi bisa dari pengalaman dan *wisdom*. Kalau kamu mau jadi politisi yang baik, kamu harus dibekali dengan ilmu yang lain, kemudian jadi politisi. Misalnya, seorang dokter jadi politisi, ekonom jadi politisi. Menjadi politisi bisa dibentuk dengan sendirinya tanpa perlu belajar ilmu-

nya,” ungkap Agus, mengutip nasehat ayahnya.

Agus pun mulai bisa mengerti dengan pandangan ayahnya itu. Bukankah sang ayah yang selain berlatar militer dan profesor di bidang administrasi negara, kemudian menjadi politisi? Akhirnya, Agus memutuskan mengambil jurusan ekonomi. Kampusnya pun sudah ia tetapkan. Tahun 1991, Mantan Sekjen MKGR ini, melanjutkan studinya di *Pacific Western University Bachelor of Science Commercial and Industrial Economics*, California, Amerika Serikat.

Sambil kuliah di Amerika, kegiatan berorganisasinya tak pernah ditinggalkan saat berada di Jakarta. Agus sudah menetapkan hati ingin jadi politisi seperti ayahnya. Selama kuliah di Amerika, Agus bertemu dengan sahabat-sahabat terbaiknya dari Indonesia. Dengan para sahabatnya itu, Agus membentuk club



Agus Gumiwang saat memberi santunan di tengah masyarakat.

sepakbola. Di antara para sahabatnya itu ada Bara Hasibuan (Ketua DPP PAN) dan Hotasi Nababan (mantan Dirut Merpati).

Soal olahraga Agus sangat aktif. "Kami tim Indonesia sering sekali bertanding dengan tim Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota lain di Amerika. Bahkan, kami juga bertanding dengan pelajar-pelajar asing dari negara lain, seperti pelajar Thailand dan Iran di Boston. Itu cukup berkesan buat saya," kenangnya.

Memasuki tahun 1994, Agus sudah merampungkan studi ekonominya di Amerika. Pulang ke Jakarta, ia langsung terjun berorganisasi. Mengasah diri, memperluas pergaulan, dan membaca situasi terkini, jadi agenda keseharian Agus sebagai aktivis pemuda.

Menjadi Politisi

Setahun sebelum reformasi bergulir Agus sudah menjadi anggota DPR RI. Ia bergabung dengan Fraksi Partai Golkar. Mantan Ketua Umum AMPI ini, pernah duduk di gedung parlemen periode 1997-1999. Ia masuk 5 besar anggota termuda di Senayan. Saat kali pertama dilantik menjadi anggota DPR, perasaannya hampir tak percaya, apakah dirinya mampu mengemban amanah.

"Saya percaya bahwa politik itu tentang pengalaman. Kalau kita rajin mengikuti dan punya bakat, pasti bisa dengan cepat, sehingga tidak akan ada kesulitan untuk menjadi politisi yang profesional," tandas Agus, meyakinkan. Baginya, panggung politik sudah menjadi interestnya sejak kecil. Kesukaannya pada dunia politik membekas hingga ia dewasa. Apalagi sang ayah mendukungnya.

Dahulu, ketika masih duduk di bangku SD dan SMP, Agus sering diajak ayahnya yang seorang pejabat tinggi negara untuk bertemu tokoh-tokoh penting. Ia duduk bersama ajudan ayahnya di pojok ruangan, mendengarkan perbincangan sang ayah dengan tokoh yang ditemuinya. Dari memori masa kecil itulah, interest politiknnya tumbuh.

Memasuki Pemilu perdana di masa reformasi, Agus kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 1999-2004 dari Dapil Jawa Barat II (Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat). Pada Pemilu berikutnya di tahun 2004, Ketua Korbid Kesejahteraan Rakyat DPP Golkar ini, rehat sejenak dari dunia politik, karena ingin mengurus dan membesarkan perusahaannya yang bergerak di bidang bisnis properti.

Lima tahun absen di Senayan, pada Pemilu 2009, kembali peraih magister ilmu administrasi publik,



UNPAS, Bandung itu, melenggang ke Senayan meneruskan karir politiknya. Sejak kali pertama menjadi anggota DPR, Agus selalu duduk di Komisi I yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, militer, intelijen, dan penyiaran. Ia berada di komisi yang membahas jantung NKRI.

Bicara soal pertahanan negara, alat utama sistem persenjataan (Alutsista) kita, memang, masih jauh dibanding kecanggihan dan penguasaan teknologi persenjataan negara-negara ASEAN lainnya. "Jangan lupa, kita pernah berhenti melakukan belanja senjata ketika reformasi muncul. Waktu itu ada stigma TNI kita banyak melanggar HAM, sehingga sulit untuk belanja alat pertahanan. Apalagi, kondisi keuangan negara sedang sulit," jelas Agus.

"Belanja senjata kita bukan untuk bersaing dengan Malaysia dan Singapura dalam penguasaan persenjataan, tapi lebih untuk menjaga kedaulatan teritorial kita. Persenjataan kita hanya untuk memenuhi standar pertahanan, bukan senjata serang."

Kini, sejak tahun 2009, anggaran TNI terus meningkat. Sepuluh tahun tak pernah belanja persenjataan, Komisi I telah memberi dukungan penuh kepada TNI untuk memperbarui sistem persenjataannya. "Belanja senjata kita bukan untuk bersaing dengan Malaysia dan Singapura dalam penguasaan persenjataan, tapi lebih untuk menjaga kedaulatan teritorial kita. Persenjataan kita hanya untuk memenuhi standar pertahanan, bukan senjata serang."

Di Komisi I, mantan Ketua Hublu Hankam DPP Golkar ini, dipercaya menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Intelijen. RUU ini masih terus dibahas secara intensif. Satu hal yang penting, peran intelijen adalah melakukan deteksi dini. Hasil dari deteksi dini itu kemudian dilaporkan ke pemerintah. Bila menyangkut bahaya terorisme, misalnya, produk

deteksi dini itu diserahkan ke Densus 88 untuk ditindaklanjuti.

Begitulah sekilas kiprah Agus selama menjadi Anggota Komisi I DPR RI. Pada Pemilu 2014, Agus kembali mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif dari Dapil Jawa Barat II. Lalu, apa kesannya setelah menjadi politisi. Ternyata, ia membenarkan nasihat ayahnya bahwa untuk menjadi politisi tak perlu belajar secara khusus ilmu politik. Sekarang, nasihat ayahnya dirasakan benar. Jadi politisi sepenuhnya ia pelajari dari lingkungan dan pengalaman.

Sosok Religius

Melihat pribadi seorang Agus Gumiwang Kartasasmita dulu dan kini, terasa beda. Ya, beda. Kini, ia tampak lebih religius. Agus bahkan mengaku religiusitasnya sudah berubah 180°. Bila dulu ia merasa jiwanya gersang dan kosong, kini terasa tersiram cahaya ilahi. Perubahan spiritualitas ini sudah terjadi sekitar 12 tahun terakhir.

Keteduhan dan ketenangan batin, ia rasakan betul. Tak hanya rutinitas ibadah harian yang ia tunaikan, Agus juga pernah rajin menunaikan tradisi puasa sunah Senin dan Kamis. Puasa sunah, katanya, tidak sekadar menyehatkan jiwa, tapi juga fisik. Membaca untaian ayat suci Al Quran juga tiap hari ia lakukan. Sukses meraih kenikmatan dunia dengan menjadi pengusaha sekaligus politisi, tak membuatnya jumawa.

Kedekatannya dengan Ilahi, justru membuatnya tampak bersahaja, sederhana, rendah hati, *low profile*, dan entah kata apalagi yang lebih tepat untuk menggambarkan pribadinya itu. Padahal, bila mengingat masa kecilnya dahulu, ia termasuk anak yang sulit bila disuruh belajar agama. Ayahnya telah mendatangkan guru *ngaji* ke rumahnya. Tapi selalu saja ada alasan dan cara untuk menghindari dari belajar membaca Al Quran.

"Dari SD, saya selalu disiapkan guru *ngaji* yang datang ke rumah. Saya selalu saja ada akal untuk menghindar. Saya dan kakak saya enggak pernah belajar *ngaji*. Padahal, sudah gunta-ganti guru *ngaji*. Jadi, saya tidak pernah peduli hal itu," katanya penuh senyum, mengenang masa kecilnya yang jauh dari sentuhan agama.

Pandangan dan pengabdianya pada agama kini lebih maju. Ia pandai bersyukur atas kondisi lahir batinnya saat ini. Bahkan, terhadap takdir hidup, Agus merasa tak perlu ada yang ditakuti. Hidup dan mati sepenuhnya diserahkan ke haribaan ilahi. "Saya tidak pernah takut terhadap takdir, terhadap garis dari Allah, termasuk soal kematian," tegasnya yang kini sedang studi S3 bidang ilmu pemerintahan di UNPAD, Bandung itu.

Bahagia Bersama Keluarga

Kesibukan sebagai anggota DPR RI telah menyita banyak waktu Agus sebagai kepala rumah tangga. Kebersamaannya dengan keluarga, memang, sedikit berkurang. Itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi. Saat berada di rumah, ia tetaplah seorang ayah dan suami. Istri dan anak-anaknya sudah memahami dunia kerjanya.

"Istri saya sudah mengerti bahwa saya punya interest pada dunia politik. Jadi, dia sudah tahu konsekuensi punya suami seorang politikus. Alhamdulillah, saya memiliki istri yang mengerti. Saya tidak mengatakan *men-support*, tapi mengerti. Tidak pernah komplain satu katapun. Anak-anak saya juga tidak pernah komplain, karena sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini," terang Agus.

Di rumahnya ada wanita istimewa. Leomonga H Nasoetion, begitulah nama lengkap istri tercinta yang dinikahinya pada 11 April 1997. Sang istri berdarah campuran Belanda, Batak, dan Padang. Ia mantan model yang juga pernah kuliah di Amerika. Agus telah mengenal Leomonga

sejak 1990 di Jakarta.

Dari hasil pernikahannya itu, Agus dikaruniai 3 anak, masing-masing Ghaniya Kartasasmita (13 tahun), Ghaziya Kartasasmita (12), dan Ghibran Kartasasmita (5). Agus tak mengarahkan ketiga putranya untuk mengikuti jejaknya sebagai politisi. Ia bebaskan menurut interest dan kecenderungan anak-anaknya. "Saya belum melihat satu anak saya yang suka dengan politik. Dan saya tidak memaksakan menyukai politik," tutur Agus.

Bersama keluarga tercinta, Agus tampak bahagia. Soal destinasi favorit keluarga, ia biasa mengajak keluarganya berwisata ke Bali. Kebetulan di Bali, punya proyek

teman saya main ke sini (rumah) setiap *weekend*. Istri saya juga senang kalau saya main *gaple*, karena membuat saya *happy*, ketawa-tawa sama teman-teman," akunya penuh antusias.

Selain bermain *gaple*, Agus juga ternyata sangat suka mendengarkan lagu. Namun, lagu-lagu yang sangat disukainya adalah lagu-lagu era 1980-an. Para penyanyi di era tersebut, seperti Fariz RM, Chrisye, Chandra Darusman, dan Kinan Nasution tentu sangat disukai. Atau lagu-lagu dari *The Queen* dan *The Police* yang muncul di era 1980-an juga sangat digemari Agus.

"Saya hanya suka mendengar lagu yang dibuat tahun 1980-an, baik lo-



Agus Gumiwang bersama keluarga tercinta.

pekerjaan bisnisnya. Jadi, sambil mengontrol pekerjaan, ia bisa mengajak anak-anaknya berwisata.

Sementara itu, ada yang unik dari hobi seorang Agus. Ternyata, ia suka sekali main *gaple*. Bersama para sahabat terdekatnya, ia punya waktu tertentu untuk menuangkan hobinya itu. Bahkan, ia dan para sahabatnya itu punya club *gaple* sendiri. Bermain *gaple* bagi Agus sangat menyenangkan.

Tertawa riang selalu menjadi warna keceriaan dalam bermain *gaple*. "Hobi saya main *gaple*. Saya punya *gaple* club di sini. Teman-

kal maupun dunia. Saya tidak pernah mendengar lagu tahun 1990-an atau 2000-an. Sampai sekarang saya selalu mendengarkan lagu-lagu 1980-an itu," katanya.

Bagi Agus, mendengarkan lagu yang dirilis tahun 1980-an membuatnya rileks dan tenang. Ada banyak kenangan dan romantisme di balik lirik-lirik lagu 1980-an tersebut. Jadi, bermain *gaple* dan mendengarkan lagu 1980-an sama-sama menyenangkan dan membahagiakan. "Lagu 1980-an itu, enak didengar," katanya, mengakhiri perbincangan. (MH) Foto: odjie/dok/parle.

PERLU PROFESIONALITAS DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAERAH



Aktivitas para pelajar di Perpustakaan Daerah Provinsi Sulteng.

Banyak pengelolaan perpustakaan daerah yang tidak berkompeten di bidangnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Panja Pengembangan Perpustakaan Komisi X DPR RI, Asman Abnur dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dalam pertemuan dengan Kadin Dikbud dan Kepala Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulteng, di kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Sulteng, Kamis (12/9).

“Bagaimana perpustakaan menjadi daya tarik kalau pengelola perpustakaannya tidak berkompeten di bidang itu, rasanya tidak mungkin,” kata Asman.

Perpustakaan menjadi tulang punggung kemajuan yang sekaligus menolong pendidikan kita. Kondisi saat ini, dari jika dikumpulkan 100 orang, yang memiliki minat baca hanya satu orang saja. Berbeda dengan negara lain, Singapura misalnya, jika dari 100 orang yang minat baca itu 55 orang, sedangkan Malaysia minat baca 25 orang dari 100 orang.

Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan, oleh karena itu ditambahkan Asman perlunya pengelolaan perpustakaan daerah yang betul-betul profesional. Agar Perpustakaan dapat menjadi kebanggaan daerah tersebut.

Untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan yang profesional itu harus dengan penciptaan orang yang benar-benar ahli di bidang perpustakaan, diantaranya dengan pendidikan dan pelatihan.

Asman mengatakan keinginannya untuk menjadikan perpustakaan menjadi *icon* nasional dan *icon* daerah. Dengan kata lain perpustakaan

tidak hanya seperti tempat simpan buku, melainkan menjadi pusat informasi.

“Jadi jangan menganggap perpustakaan itu hanya sebagai tempat menyimpan buku-buku bekas tapi perpustakaan menjadi pusat informasi, pusat kegiatan dan diskusi,” kata Asman

Salah satu cara untuk merubah perpustakaan sebagai tempat menumbuhkan daya tarik dan minat baca adalah dengan memberikan pelayanan yang sifatnya jemput bola. Jika perlu setiap mall yang ada di kota Palu ada perpustakaan daerah, begitu juga dengan di bandara.

“Tantangan kita semua, Insya Allah bangunan dan infrastrukturnya nanti menjadi tanggungjawab DPR RI untuk memperjuangkan sebahagiannya dari APBN, yaitu melalui perpustakaan nasional. Itu yang menjadi target kita, dan ini menjadi perjuangan kita bersama,” jelasnya.

Senada dengan Asman, Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulteng, Irwan Lahace juga mengatakan akan pentingnya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Oleh karena itu pemerintah Sulawesi Tengah telah membentuk kelembagaan perpustakaan sebagaimana peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Sulawesi Tengah. Termasuk didalamnya Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Merujuk pada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka penyelenggaraan pengelolaan

dan pengembangan perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai dengan amanat UU," jelas Irwan.

Irwan yang pada kesempatan tersebut mewakili Gubernur Sulawesi Tengah menghimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta kepada Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera merumuskan konsep kerjasama dalam rangka harmonisasi program dan kegiatan pengembangan taman bacaan masyarakat, yang pada akhirnya akan ikut menumbuhkan minat baca di masyarakat.

Perpustakaan di Provinsi dan Kabupaten Kurang Diminati

Keberadaan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah harus ditingkatkan fungsinya untuk menjadi sarana wisata baca bagi belajar, mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui membaca, menulis, meneliti dan berdiskusi.

"Komisi X DPR RI meminta perhatian pemda provinsi maupun pemda kabupaten untuk memberi perhatian yang lebih serius kepada perpustakaan. Sebab kita amatir perpustakaan ini seolah-olah lembaga yang nomor dua, artinya tidak diperhatikan dengan baik," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri (F-PG) saat ditemui Parle usai Tim Kunjungan Spesifik Panja Pengembangan Perpustakaan Komisi X meninjau perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jum'at (13/9'13).

Komisi X lanjut Syamsul, berkali-kali mengunjungi perpustakaan tingkat provinsi namun keadaannya sangat menyedihkan, seolah-olah menjadi tempat yang tidak menarik untuk dikunjungi oleh orang-orang yang mencari referensi, mencari ilmu dan segala macam.

Menurutnya, perpustakaan tidak menarik, karena tidak diurus dengan baik, tidak diberi dukungan yang baik oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Untuk itu, dia menghimbau kepada provinsi maupun kabupaten supaya memberi perhatian serius kepada perpustakaan.

"Kalau perpustakaan dikelola dengan baik bisa mendorong minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat meningkat tentu akan mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa," tambahnya.

Pengelolaan perpustakaan ini menjadi tanggungjawab kita



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Syamsul Bachri.

semua seperti DPR RI, pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten, dan juga DPRD provinsi maupun kabupaten untuk memberi perhatian yang lebih serius kepada perpustakaan.

Di sisi lain, Komisi X DPR RI selalu berusaha untuk memberikan dukungan, baik dukungan kebijakan maupun dukungan anggaran. Tapi ini sangat tergantung ke-

"Kalau perpustakaan dikelola dengan baik bisa mendorong minat baca masyarakat. Minat baca masyarakat meningkat tentu akan mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa," tambahnya.

pada manajemen perpustakaan itu sendiri. "Jadi kita selalu mendorong supaya ada perpustakaan kita menjadi kebanggaan, dan bisa menjadi semacam kebutuhan bagi masyarakat untuk bisa berkunjung ke perpustakaan terutama perpustakaan nasional," jelasnya.

Terkait masalah anggaran perpustakaan, Syamsul Bachri mengatakan memang belum begitu merasa bergembira dengan hasil-hasil yang dicapai oleh perpustakaan kita secara nasional, baik di pusat maupun di daerah.

Dia menambahkan, Komisi X DPR RI selalu mendukung anggaran perpustakaan ditingkatkan, tapi kadang-kadang perencanaan anggaran yang diusulkan oleh perpustakaan itu kelihatannya tidak terlalu menggembirakan, artinya tidak terlalu besar anggarannya. Sehingga lobby mereka kepada Bappenas, kementerian keuangan itu selalu mentok. "Jadi ketika mereka mengusulkan RKA-K/L dari perpustakaan nasional itu ya begitu saja, tidak ada peningkatan yang signifikan," tukasnya.



Foto bersama Tim Panja Pengembangan Perpustakaan Komisi X DPR RI dengan guru-guru SMAN 2 Palu, Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi X DPR RI setiap rapat selalu memberi saran dan usul untuk memberi motivasi, semangat kepada perpustakaan nasional untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis agar perpustakaan nasional kita ini menjadi kebanggaan, bisa menjadi icon nasional.

Oleh karena itu, kata Syamsul, pemerintah dan DPR RI harus sepaham bahwa perpustakaan ini penting dan perpustakaan ini ingin kita jadikan semacam icon nasional. Seperti kalau kita berkunjung ke luar negeri dimana kita lihat perpustakaan cukup membanggakan dan dikunjungi oleh masyarakat dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, perpustakaan menarik sekaligus menjadi tempat menarik untuk dikunjungi.

Politisi Partai Golkar ini berharap di provinsi maupun kabupaten perpustakaan ada tempat-tempat yang menarik, ada café, ada tempat orang-orang berkumpul dan bisa melihat-lihat ke perpustakaan.

“Jadi yang paling pokok adalah perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberi dukungan yang memadai kepada perpustakaan. Antara lain, anggaran yang cukup untuk memperbaiki suasana perpustakaan, pengadaan buku yang memadai. Tentunya buku-buku terbitan terbaru selalu muncul di perpustakaan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia minta kepada pemda memberikan perhatian, dan menempatkan tenaga-tenaga yang professional. Jangan ada kesan perpustakaan adalah tempat

pejabat yang tidak disukai, pejabat-pejabat yang dibuang, pejabat-pejabat yang tidak produktif. Kalau itu, ujar Syamsul, yang terjadi tentu memang perpustakaan kita akan menjadi sesuatu yang tidak menarik.

Tim Kunjungan Spesifik Panja Pengembangan Perpustakaan Komisi X DPR RI terdiri atas 9 orang dipimpin Asman Abnur (F-PAN) dan sejumlah anggota lintas fraksi yakni Muslim dari F-PD); Syamsul Bachri dan Oelfah AS Harmanto dari F-PG; Irsal Yunus dari F-PDI Perjuangan; Herlini Amran dari F-PPS; Hisyam Alie dari F-PPP; Abdul Kadir Karding dari F-PKB; dan Muchtar Amma dari F-Partai Hanura. (sc) Foto: Iwan Armanias/Parle.

KOMISI X DPR RI MINTA TROWULAN JADI KAWASAN BUDAYA



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X saat mengunjungi Museum Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur.

Komisi X DPR RI meminta pemerintah agar Trowulan dijadikan kawasan budaya sebagai bentuk pelestarian Kerajaan Majapahit.

“Saat ini wilayah Trowulan memang masih memiliki peninggalan bersejarah dari Kerajaan Majapahit,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X, Agus Hermanto disela-sela kunjungannya ke Museum Trowulan, di Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (12/9)

Oleh karena itu, menurutnya, peninggalan Kerajaan Majapahit di

Trowulan Mojokerto harus terus dilestarikan keberadaannya sebagai pusaka bangsa.

“Di Trowulan ini memang masih banyak yang harus ditingkatkan salah satunya pembuatan kawasan budaya tersebut,” ujar Agus.

Dengan adanya kawasan budaya, kata Agus, maka seluruh kebudayaan yang ada di kawasan Trowulan ini bisa dilestarikan termasuk seluruh kebudayaan yang ditinggalkan Kerajaan Majapahit.

Ia mencontohkan, seperti kawasan Bubat yang sebelumnya terkenal sebagai tempat pelatihan para prajurit Majapahit kini menjadi ladang tebu.

“Oleh karena itu, pembentukan kawasan budaya ini memang perlu dilakukan menyusul masih banyak aset di kawasan Trowulan ini yang harus ditingkatkan,” katanya.

Agus menjelaskan, bahwa kunjungan spesifik Komisi X ke Trowulan adalah kunjungan khusus untuk mengetahui secara langsung kawasan budaya yang ada di Trowulan.

Menurutnya, kebesaran sejarah peradaban di Indonesia dan nusantara harus ditilik dari sudut kekinian. “Tugas kita untuk tidak mengabaikannya,” kata politisi Partai Demokrat ini.

“Makanya kami perlu tahu batas

Secara umum kawasan cagar budaya Trowulan sepanjang 11 KM persegi. Namun diakui, masih banyak yang bisa dikembangkan dari keberadaan kawasan budaya Trowulan. Ada museum, candi, dan berbagai situs budaya yang ada di wilayah ini. Semua harus dilestarikan dan dikembangkan.

wilayah yang masuk cagar budaya di Trowulan biar jelas. Selama ini masih bias. Belum ada gambaran yang lebih jelas. Kami juga belum mendapatkan gambaran ini," katanya.

Secara umum kawasan cagar budaya Trowulan sepanjang 11 KM persegi. Namun diakui, masih banyak yang bisa dikembangkan dari keberadaan kawasan budaya Trowulan. Ada museum, candi, dan berbagai situs budaya yang ada di wilayah ini. Semua harus dilestarikan dan dikembangkan.

"Kawasan ini harus dikembangkan sehingga memberi kemakmuran masyarakat dan menjadi sumber devisa. Negara yang bertugas menciptakannya," kata Agus.

"Harus terus digali anggaran yang bersumber pada APBN untuk pengembangan budaya ini. Semua harus fokus dan tepat sasaran," tambah Agus.

Selain ke Museum Majapahit, Tim Komisi X melanjutkan kunjungan, melihat situs-situs budaya, mulai dari Candi Bajang Ratu dan Candi Tikus. Tim juga melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Mojokerto dan jajarannya.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Mojokerto terdiri dari, Agus Hermanto (FPD/Ketua Tim), Venna Melinda, Jefriston R. Riwu Kore dan Ida Riyanti masing-masing dari F-PD, Ferdiansyah dan Popong Oatje Djundjuran dari F-PG, Dedi Gumelar dan Itet Tridjajati Sumariyanto dari F-PDIP, Rohmani (F-PKS), Eko Hendro Purnomo (F-PAN), Mahmud Yunus (F-PPP), Dedi Wahidi (F-PKB) dan Nuroji (F-Gerindra).

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3)

Trowulan, Aris Sofyan mengatakan, saat ini pemerintah sedang mendayagunakan masyarakat setempat untuk beralih profesi dari pembuat batu bata menjadi pemandu wisata di Trowulan.

"Kami berharap dengan adanya dorongan dari pemerintah ini akan memberikan efek positif bagi perkembangan kawasan Trowulan untuk lebih baik lagi kedepannya," katanya.

Ia mengatakan, saat ini lebih dari tiga ribu tempat pembuat bata (linggan) yang ada di sekitar Trowulan.

"Dari masing-masing tempat pembuatan tersebut diisi oleh tiga sampai dengan lima orang tenaga kerja," katanya.

Oleh karena itu, mereka nantinya akan diberdayakan dengan dijadikan sebagai pemandu wisata atau juga pengantar para wisatawan yang datang ke Trowulan.

"Dengan demikian para wisatawan tersebut akan terbantu adanya para pemandu wisata yang datang ke lokasi wisata Majapahit," imbuhnya

Pemda Mojokerto Diminta Cabut Ijin Pabrik Baja di Trowulan

Terkait rencana pendirian pabrik baja di Trowulan, Komisi X DPR RI minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mencabut ijin pendirian pabrik baja di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto.

"Seharusnya Pemkab Mojokerto ikut mendukung upaya pemerintah melestarikan situs dan peninggalan bersejarah Kerajaan Majapahit, Majapahit memiliki sejarah yang mahal," kata Dedi Gumelar, Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi X saat pertemuan dengan Wakil Bupa-

ti Mojokerto dan jajarannya, di Pendopo Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/9)

"Ini (Majapahit) tak ternilai. Majapahit bukan hanya kondang secara nasional, tapi hingga internasional," imbuh Dedi.

Dedi menyatakan, upaya pelestarian situs peninggalan Kerajaan Majapahit harusnya dilakukan Pemkab Mojokerto. Karena jika upaya pelestarian bisa dilakukan, justru akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Situs peninggalan Majapahit ini harus dijaga, seperti di luar negeri. Jika mampu dilestarikan, ini akan menjadi aset wisata sejarah berskala internasional," kata politisi PDI Perjuangan.

Komisi X DPR RI, papar Dedi, memberikan ruang lebar bagi Pemkab Mojokerto untuk melakukan upaya pelestarian situs peninggalan Majapahit. Jika Pemkab Mojokerto membutuhkan anggaran untuk upaya pelestarian itu, Komisi X akan siap membantu.

"Kami nanti yang upayakan anggarannya. Terpenting Pemkab mau melestarikan yang ada di sini," katanya.

Sementara, Ketua Tim yang juga Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto mengatakan, kedatangan Komisi X DPR RI ke Trowulan untuk melihat langsung hasil anggaran revitalisasi cagar budaya peninggalan kerajaan Majapahit di kawasan Trowulan.

"Soal pembangunan pabrik baja di Trowulan kalau masuk zona wilayah cagar budaya jelas-jelas menyalahi aturan," papar Agus.

Dalam pertemuan tersebut, Pem-



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X berfoto bersama Wakil Bupati Mojokerto dan jajarannya.

kab Mojokerto terkesan kebingungan mengambil langkah lantaran sejauh ini pabrik baja PT. Manunggal Sentra Baja telah mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Sejak tahun 1970 pabrik ini sudah mengantongi IMB," kata Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Yoko Priyono.

Dikatakan Yoko, IMB awal yang dikeluarkan itu adalah untuk pabrik pengolahan tepung dan mie. Namun, Yoko tak menampik jika pihaknya juga menerbitkan IMB lain untuk pembangunan perkantoran pabrik berikut pagar keliling. "Untuk perkantoran dan pagar kita terbitkan

tahun ini," ujarnya.

Namun, Yoko berkelit dan mengklaim bahwa terbitnya IMB baru itu sudah sesuai prosedur. Menurutnya, penerbitan IMB baru itu berdasarkan rekomendasi dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim di Trowulan.

"Lokasi pabrik menurut BP3 di luar zona situs. Karena itu kami menerbitkan IMB tahun ini," katanya.

Selain itu, lanjut Yoko, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2012, Desa Jatipasar tempat berdirinya pabrik ini adalah masuk zona industri terbatas.

Artinya industri diperbolehkan dengan syarat bangunan yang sudah memiliki ijin sebelum perda ini dikeluarkan.

"Di pabrik sudah dilakukan penggalan dan tak ada benda bersejarah yang ditemukan. Kita menunggu instruksi tertulis dari pemerintah pusat terkait hasil ini," katanya.

Pabrik baja itu sendiri direncanakan hanya berskala kecil dengan kapasitas produksi hanya 500 ton per tahun dan dari 3,6 Ha lahan yang ada hanya 0,6 Ha yang akan digunakan untuk pabrik sedangkan sisanya untuk kawasan terbuka hijau. (sc) Foto suci/parle.



PT. INKA BISA KOK!

Kokoh apalagi warnanya merah semerah sang Merah Putih. Takjub dan haru terasa saat berdiri didepan lokomotif CC 330 yang mempunyai panjang 19 m dan berat sekitar 90 ton. Karya anak bangsa di PT. INKA (Industri Kereta Api) ini diresmikan peluncuran prototipenya saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional bulan Mei lalu. Spesifikasinya pada beberapa bagian mengungguli lokomotif impor buatan Amerika yang sudah digunakan PT. KAI saat ini. Anggota Komisi V yang menyaksikan prototipe ini kontan mengacungkan dua jempol.

"Kita bangga dan mendorong PT. INKA dapat segera menyelesaikan proses pengujian dan memperoleh sertifikasi. Kalau loko ini sudah memenuhi standar internasional kenapa kita harus beli ke luar negeri," kata anggota Komisi V Agung Budi Santoso saat mengunjungi pabrik PT. INKA di Madiun, Jawa Timur, akhir September lalu. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap komponen lokal pada lokomotif Diesel Hidrolik CC 330 yang saat ini masih sekitar 40 persen dapat terus ditingkatkan.

Ia menyebut salah satu kesempatan

an baik untuk meningkatkan kemampuan PT. INKA adalah menjalin kerja sama dengan General Electric Amerika yang saat ini sedang menggarap proyek pengadaan 150 lokomotif untuk PT. KAI. "Pemerintah harus mendorong agar dalam proses pembelian itu ada klausul kerja sama saling menguntungkan dengan industri kita sendiri misalnya kerja sama produksi, alih teknologi," lanjutnya.

Sementara itu Direktur Produksi dan Teknologi PT. INKA Yunendar Aryo Handoko menjelaskan 3 lokomotif prototipe saat ini sudah sele-

sai. Didukung mesin dari Amerika dan master controller dari Korea Selatan kereta besi ini memiliki kelebihan dibanding lokomotif yang dimiliki PT. KAI saat ini. "CC 300 masih dapat melaju dilokasi banjir, dengan mesin berkekuatan 2200 HP dan turbo transmission serta generator berdaya 380 VAC loko ini menghasilkan daya listrik sehingga tidak perlu lagi membawa kereta pembangkit untuk melayani penumpang," jelasnya.

Saat ini menurutnya PT. INKA sedang mengembangkan bengkel lokomotif dengan kapasitas produksi 50 unit pertahun. Target produksi

diproyeksikan dapat meningkat sampai dua kali lipat apabila seluruh bangunan selesai.

Pemerintah Kurang Serius

Dalam banyak kesempatan baik di dalam maupun luar negeri PT. INKA sering harus berhadapan *head to head* dengan banyak perusahaan asal Cina untuk memenangkan tender. Beberapa kali perusahaan BUMN ini kalah hanya karena harga jual yang sedikit lebih mahal. "PT INKA lebih mahal karena menggunakan mesin dari Amerika yang terkenal bandel dan awet, positifnya *life time* jelas lebih panjang. Itu sepadan dengan nilai jual yang sedikit lebih mahal," kata anggota Komisi V Sigit Sosiantomo.

Untuk menutupi hal ini pemerintah diminta lebih kuat mendukung industri ini dengan sejumlah paket kebijakan diantaranya dukungan fiskal penurunan bea masuk untuk komponen yang dibutuhkan, mendorong perbankan untuk memberikan pinjaman dan memesan lebih banyak produk PT. INKA. "Pemerintah harus lebih kuat mendukung, ini kadang beli kadang tidak. Kalau selisihnya lebih mahal beberapa puluh juga tetapi *life time*-nya tinggi ya tetap diambillah. Jangan berlindung dibalik aturan tender untuk mengalahkan perusahaan anak bangsa ini," tandas Politisi FPKS ini.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V dalam kesempatan tersebut menyaksikan sejumlah produk PT. INKA yang telah diekspor sejumlah negara seperti kereta penumpang ke Bangladesh, *body container wagon* dan *blizzard center sills* untuk Australia, *well wagon* ke Singapura dan Thailand. "PT. INKA bisa kok, bangsa ini mampu," tegas Eriko Sotarduga anggota Komisi V dari FPDIP usai mencoba menaiki rangkaian kereta yang terdiri dari lokomotif dan gerbong produksi PT. INKA, berangkat dari Kota Solo menuju Madiun.

Akademi Perkeretaapian

Disamping pembangunan infra struktur, hal yang tidak kalah penting adalah membangun SDM handal di bidang perkeretaapian. Hal ini disampaikan Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama saat mengunjungi Akademi Perkeretaapian di Madiun. "Kedatangan kami kesini ingin melihat sendiri pembangunan infrastruktur secara langsung, kami tidak ingin hanya laporan diatas kertas dan penyampaian dalam rapat," ungkapnya.

Kampus yang berdiri diatas lahan seluas 20 hektar terus digenjot penyelesaiannya. Dibangun 6 tahap sampai 2016, tahun ini pembangunan memasuki tahap ketiga atau sekitar 57 persen dan dijadwalkan selesai tahun 2016. Dibagi atas 4 jurusan, setiap tahun 120 SDM baru akan lahir di kampus ini. Siap menyambut tantangan lonjakan penumpang 929 juta orang pada tahun 2030, jauh melejit dibanding 2010, 200 juta orang lebih.

"Saya tantang SDM Perkeretaapian untuk benar-benar mewujudkan lintasan kereta api Trans Sumatera, Trans Sulawesi. Sudah lama hal ini saya pertanyakan pada pemerintah dan tentu yang akan berperan besar nantinya alumnus akademi ini," kata Hanna Gayatri wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Selatan ini.

Hanna bersama Tim Kunjungan Spesifik Komisi V berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas diantara asrama, ruang makan dan berdialog dengan mahasiswa serta dosen yang sebagian pernah dididik di Jerman dan Swedia.

Revitalisasi Boezem Morokrem-bangan

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V juga meninjau progres revitalisasi di Boezem atau Setu Morokrem-bangan, Surabaya, Jatim. Boezem yang dibangun pada era pemerintahan penjajah Belanda tahun 1934 ini sempat jadi objek kumuh, penuh

endapan tanah, sampah dan tanaman air serta berbau tajam. Langkah penataan yang didukung DPR ini mulai dilakukan pada tahun 2007. "Kita perlu meninjau proyek yang didanai APBN sebagai bentuk pengawasan. Sejauh ini kita lihat perkembangannya luar biasa, wilayah yang dulu dikenal kumuh setelah 5 tahun berubah menjadi lokasi wisata dan budi daya ikan," kata anggota Komisi V Fary Djemi Francis.

Proyek yang melibatkan Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air dan Pemkot Surabaya ini sejak tahun 2007 lalu telah menyerap anggaran sebesar Rp.205.266.000.000,- Tim Komisi dalam kesempatan itu memeriksa sejumlah proyek yang telah dilaksanakan diantaranya perbaikan jalan inspeksi, pembangunan rumah pompa untuk pembuangan air ke laut, penyaringan sampah otomatis.

Sementara itu anggota Komisi V dari FPKB Andi Muawiyah Ramli meminta program revitalisasi tidak meninggalkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi boezem. "Penduduk sekitar mesti dirangkul sebisa mungkin dilibatkan dalam kegiatan penataan lingkungan. Mereka kita harapkan ke depan ikut menjaga," imbuhnya.

Kepala Dinas PU, Pemkot Surabaya, Erna Purnawati menjelaskan saat ini sedang dipersiapkan pembangunan rumah susun sewa yang akan dilaksanakan Cipta Karya. "Pembangunan rusun memanfaatkan lokasi spoil bank/disposal area milik Sumber Daya Air. Pemkot Surabaya nantinya bertanggung jawab pada urusan pembebasan dan masalah sosial lain," jelasnya. Ia berharap Komisi V dapat mendukung program lanjutan revitalisasi Boezem Morokrem-bangan yang masih memerlukan tambahan anggaran. Sejauh ini kegiatan sudah berhasil menata boezem sebagai kolam retensi genangan air hujan dari kawasan pusat kota Surabaya. Ini menurutnya mengatasi banjir setidaknya di 4 kecamatan. (iky) Foto:ical/parle.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

PEMERINTAH TIDAK SERIUS WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

Pemerintah gagal dalam swasembada pangan, karena tidak ditangani dengan serius. Kalau Pemerintah serius dan menganggap penting terhadap strategisnya ketahanan pangan, maka produksi pangan menjadi prioritas utama Rencana Kerja Pemerintah.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014 mencapai lebih dari Rp.1.600 Triliun. Terkait Swasembada Pangan, Firman Subagyo menerangkan bahwa dalam rencana strategi yang disampaikan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan, untuk tiga komoditi yaitu jagung, kedelai, dan Padi. Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.30,4 Triliun, Tahun 2013 Rp.36,1 Triliun dan Tahun 2014 sebesar Rp.30,1 Triliun, sehingga totalnya 96,7 Triliun.

"Pemenuhan produksi pangan pokok 3 komoditi akan menyelamatkan dari importasi kebutuhan bahan pangan pokok," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI bidang Pertanian Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar, kepada Parle baru-baru ini.

Yang namanya membuka kebijakan impor tidak menyelesaikan masalah. Justru menurut Firman Subagyo, patut dicurigai. Alasan pertama, kalau Pemerintah akan melakukan stabilitas harga, tentunya tidak demikian secara serta-merta.

Tegasnya, kita harus mulai akar permasalahannya dimana? karena produksi pangan Indonesia memang rendah. "Kenapa produksi kita rendah, karena kita tidak serius untuk menangani masalah swasembada pangan," ungkapnya.

Firman mempertanyakan perencanaan anggaran dikaitkan dengan keterbatasan anggaran yang ada pada masing-masing eselon di Kementerian Pertanian RI. "Itu apa dasarnya, apakah itu sudah bisa menopang swasembada pangan

yang direncanakan oleh Pemerintah?

"Apa susahnyanya kalau memang pangan ini menjadi hal yang sangat fundamental, Pemerintah harus mendahulukan seluruh alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangan," tandasnya.

"Apa susahnyanya kalau memang pangan ini menjadi hal yang sangat fundamental, Pemerintah harus mendahulukan seluruh alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan swasembada pangan,"

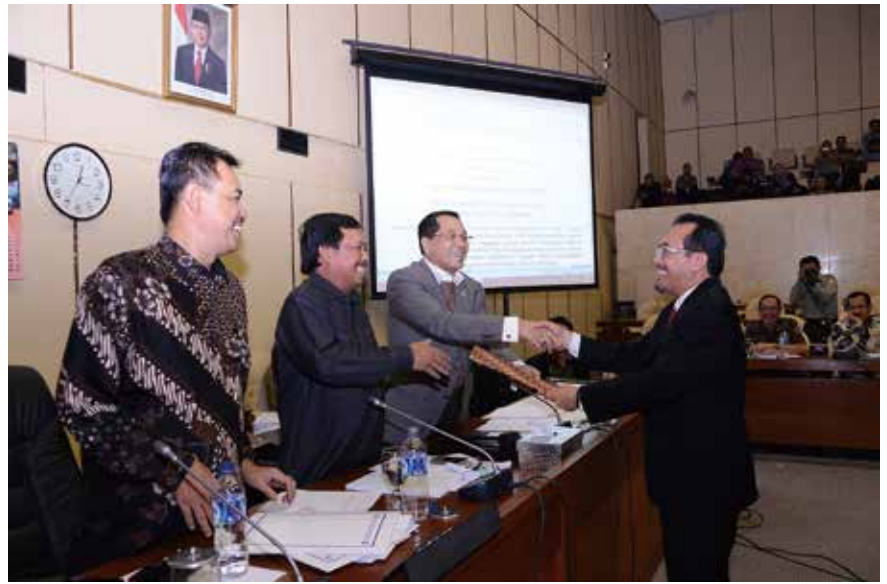
Karena tidak ada keseriusan, Pemerintah sekarang ini selalu mengambil kebijakan pintas. Akibatnya terjadi karut marut seperti sekarang ini, kemudian Pemerintah melakukan impor. "Impor ini memang permainan kartel. Pemerintah sekarang sudah dikuasai oleh pelaku kartel dan liberalisasi perdagangan," ungkap Firman Subagyo.

Amanat Konstitusi

Kita sudah punya Undang-Undang tentang Pangan No.18 Tahun 2012, yang mengamanatkan kepada Pemerintah supaya segera dibentuk Lembaga Pangan yang bertanggung jawab terhadap pengadaan pangan nasional.

Oleh karena itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) dikembalikan lagi fungsinya seperti Bulog pada masa lalu. Supaya Bulog menjadi Penanggung Jawab Tunggal terhadap masalah mekanisme, distribusi dan penyangga pangan.

Selanjutnya, terkait dengan UU tentang Hortikultura, yang mengamanatkan bahwa untuk impor produk hortikultura harus memper-



Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian.

hatikan Komoditi Holtikultura Dalam Negeri. UU ini telah diundangkan No. 13 Tahun 2011. "Pemerintah harus melaksanakan amanat itu. Jadi kalau hari ini Pemerintah membikin suatu regulasi harusnya mengacu pada Undang-Undang tersebut," jelas Firman Subagyo.

Sebagai wakil rakyat, dia mempertanyakan kepada Kementerian Pertanian, dimana posisi menteri pertanian sebagai *leading sector* di dalam pembahasan UU tentang Holtikultura, dimana letak persoalannya, mengapa justru Menteri Pertanian ikut menyetujui impor?

Walaupun dalam menentukan kebijakan itu dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, namun tentunya Menteri Pertanian hadir disitu. "Harusnya Menteri Pertanian menyampaikan bahwa ada UU yang terkait dengan masalah impor holtikultura. ketentuannya tidak boleh seperti itu, tidak bisa serta merta," kritiknya.

Ditambahkan Firman Subagyo, yang terkait dengan stabilitas harga itu, tidak serta merta bahwa penyelesaiannya dengan cara-cara instan. Apa susahnyanya kita untuk mengambil lebih dulu 96 Triliun itu untuk kepentingan swasembada pangan, sehingga kita tidak bergantung kepada kepentingan asing.

Persoalannya diungkapkan Firman adalah anggarannya tidak pernah disetujui. "Apakah memang Menteri Pertanian tidak mampu memperjuangkan atau tidak punya perencanaan yang matang sehingga instansi lain itu tidak mempercayai Kementerian Pertanian dalam rencana kerjanya. Atau sebaliknya, ini adalah bagian dari permainan oknum-oknum kementerian-kementerian yang memanfaatkan kebijakan impor pangan. "Karena impor ini memang keuntungannya sangat luar biasa," papar Firman.

Lebih jauh diungkapkan, seperti terjadi hari ini pada kedelai. kalau kedelai itu dibebaskan bea masuk impor 0%. berapa kerugian negara? Dipaparkannya tahun lalu dengan adanya karut-marut kedelai sampai ada yang membuang kedelai di jalan.

Dengan gegap gempita Pemerintah membebaskan bea masuk 5% menjadi 0%. Kerugian negara, Firman Subagyo menghitung dari Agustus sampai Desember yaitu sebesar Rp400 Miliar. Sampai hari ini belum dihitung besarnya yang akan diimpor, dan kemudian kalau sampai itu terjadi 0%.

Hal ini akan menjadi beban Pemerintah karena postur pendapatan APBN menurun yang diakibatkan

karena menurunnya pajak, apalagi dibarengi dengan situasi dan kondisi ekonomi dunia yang sedang terpuruk.

Disisi lain, nilai rupiah yang terus terpuruk terhadap USD, kemudian dalam waktu dekat utang swasta harus mulai dikembalikan. Oleh karena itu, gonjang ganjing perekonomian ini masih belum bisa selesai dalam waktu dekat ini, apalagi inflasi sekarang sudah mulai nampak meningkat.

Salah satu penyebab dari inflasi yang tinggi, adalah tindakan yang salah dalam memberikan kebijakan yaitu subsidi. Sementara pemberian subsidi pupuk dan subsidi benih sering terjadi kekacauan

Ketika ditanyakan adanya dugaan kartel khususnya kedelai dan komoditas pangan lainnya, Firman Subagyo, mengatakan ada, namun kartel ini berlingkungan di balik kepentingan kekuasaan.

Kartel ini memang pelakunya sudah jelas bahwa kalau tidak salah di komoditas gula itu ada **9 Samurai**. "Tentunya ini tugas dari KPPU. KPPU harus sudah memulai melakukan penyelidikan. Aparat penegak hukum harus memulai, karena ini sudah nampak permainannya," ungkap Pimpinan Komisi bidang pertanian dan pangan ini.

Dijelaskan, sebetulnya kelangkaan ini hanya hukum ekonomi, masalah pasokan dan permintaan. Ketika

yang menguasai stok pangan itu adalah mereka, maka untuk posisi cadangan yang ada, mereka itu tinggal membuka krannya saja. Kalau dibesarkan krannya, harganya turun, kalau dikecilkan harganya naik.

Karena kalau permintaan pasar tinggi, sedangkan suplainya dikendalikan akan terjadi gejolak harga. Firman menyatakan dirinya selalu menyampaikan kepada Pemerintah, hendaknya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan.

"Kalau memang kejaksan dan polisi tidak bergerak dan juga aparat hukum lainnya juga tidak bergerak, saya minta kepada KPK mulai melakukan penyidikan karena ini sudah merupakan kejahatan ekonomi," katanya.

Menurutnya ada oknum yang terlibat didalamnya, karena memang penyelesaian secara instan yang terkait dengan masalah importasi ini sangat nikmat sekali. "Coba bayangkan dalam waktu Agustus sampai Desember kerugian Rp.400 miliar, akibat bea masuk 0%. Tinggal bagi-bagi saja, padahal yang punya stok mereka," ungkapnya.

Disisi lain dalam UU tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah harus segera memutuskan jenis komoditas pokok. Sampai hari ini kedelai belum menjadi satu kebijakan atau keputusan Pemerin-



Aktifitas pabrik tahu di Cibubur.

Kartel ini memang pelakunya sudah jelas bahwa kalau tidak salah di komoditas gula itu ada **9 Samurai**. "Tentunya ini tugas dari KPPU. KPPU harus sudah memulai melakukan penyelidikan. Aparat penegak hukum harus memulai, karena ini sudah nampak permainannya," ungkap Pimpinan Komisi bidang pertanian dan pangan ini.

IMPOR KOMODITAS PANGAN

Beras	167,51 juta kg
Jagung	897,35 juta kg
Kedelai	502,02 juta kg
Gula Pasir	25,9 juta kg
Daging sejenis Lembu	9,9 juta kg
Jenis lembu	18,34 juta kg
Daging Ayam	26,27 ribu kg

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Januari sampai April 2013

tah bahwa kedelai itu adalah menjadi komoditas pokok. "Ini yang penting, UU sudah dibuat dan diundangkan, tetapi Pemerintah tidak mau melaksanakan Undang-Undang bahkan dilanggar. Ada apa ini?, mesti ada permainan," katanya

UU tentang Hortikultura sudah jelas membatasi, melindungi, memprioritaskan, tetapi malah dibuka impor. Artinya Undang-Undang ditabrak, kalau Pemerintah sudah melanggar Undang-Undang artinya Pemerintahan ini dalam posisi bahaya.

Sandang, pangan, dan papan adalah Amanat Konstitusi, menurut Firman Subagyo ketika Pemerintah tidak mampu menyediakan pangan, tidak bisa menyediakan sandang, tidak bisa menyediakan papan. "Ini suatu pelanggaran konstitusi, sudah berbahaya.

"Oleh karena itu, saya minta kepada pelaksana di Pemerintahan, Presiden RI SBY telah menegaskan bahwa prioritas anggaran Tahun 2014 adalah untuk mencapai swasembada pangan. Kemudian harus melakukan evaluasi terhadap program-program yang sifatnya tidak produktif dialihkan kepada yang produktif, terutama subsidi, termasuk subsidi minyak, subsidi benih, dan subsidi pupuk," tukasnya lagi.

Karena sudah ditegaskan Presiden, kini bola ada di tangan pelaksananya Kementerian, mau melaksanakan atau tidak. "Ketika tidak melaksanakan, ada *Something Wrong*, artinya ada permainan. Siapa yang bermain, aparat hukum harus masuk, karena ini merugikan uang negara," tegasnya.

Diungkapkan Firman Subagyo, pembebasan bea masuk impor kedelai tahun lalu mencapai Rp.400 Miliar, hari ini kita akan berhitung lagi berapa juta ton yang akan diimpor. "Tinggal dihitung kali 5%, berapa miliar? siapa yang menikmati,

ya cukong-cukong itu," papar wakil rakyat asal pemilihan Jawa Tengah III meliputi Kabupaten Blora, Grobogan, Pati, dan Rembang.

Dukungan Lembaga Penyiaran

Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan intensitas tanaman pangan, perlu adanya dukungan sosialisasi untuk kepentingan negara dari lembaga penyiaran yang mengemban tugas menyelenggarakan penyiaran, mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat serta mendorong kemajuan kehidupan masyarakat, yaitu TVRI dan RRI.

Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere menginginkan Lembaga



Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere.

Penyelenggara Penyiaran TVRI dan RRI ikut memberikan pengetahuan kepada Rakyat Indonesia mengenai peningkatan hasil pangan untuk tercapainya swasembada pangan. TVRI dan RRI memiliki jangkauan siar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"TVRI dan RRI diharapkan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian mensosialisasikan program pemerintah dalam pencapaian ketahanan pangan," ungkap Daeng

Sere, anggota Dewan yang mendampingi bidang komunikasi dan informasi, di Gedung DPR RI, baru-baru ini.

Daeng Sere meminta kepada TVRI dan RRI memberikan tayangan program pembelajaran dan pendidikan dalam mendukung pencapaian swasembada, mendukung swasembada gula, mendukung swasembada daging, pengembangan komoditas strategis lainnya, pengembangan Lembaga mandiri yang mengakar di Masyarakat (LM3), pengelolaan pupuk dan alat-alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta pengawalan dan pendampingan penyuluhan.

"TVRI dan RRI harus ikut serta mensosialisasikan kegiatan-kegiatan utama pencapaian swasembada, misalkan saja, Optimalisasi Lahan dan Sistem Penyuluhan Pertanian," kata Daeng Sere, anggota DPR asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 yang meliputi Kabupaten Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar.

TVRI dan RRI juga dapat memberikan informasi untuk mendapatkan modal berupa kredit yang disalurkan pada sektor pertanian dari Kementerian Pertanian melalui Bank Pelaksana, seperti Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS).

Selain itu, seiring terjadinya lonjakan harga sapi akhir-akhir ini, TVRI dan RRI dapat memberikan pengetahuan kepada rakyat Indonesia dalam upaya meningkatkan populasi ternak sapi dengan cara pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong, peningkatan kualitas bibit unggul, penguatan modal Usaha Kelompok (PUMK), pengembangan pakan, dan integrasi tanaman-ruminansia. (as) Foto: wahyu/parle.



GALANG KERJASAMA MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015

Sidang Umum ke-34 AIPA yang berlangsung pada 17-23 September 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam mengangkat tema “The Role of AIPA in Realizing ASEAN Community. Misi utama yang ingin dilaksanakan adalah menggalang kerjasama antar Parlemen Anggota AIPA untuk mewujudkan ASEAN Community 2015.

Ketua DPR RI Marzuki Alie, sekaligus Ketua Delegasi dari Parlemen Indonesia menyatakan bahwa tema Sidang Umum AIPA kali ini sangatlah tepat, pasalnya tahun ini sudah mendekati ASEAN Community pada tahun 2015. Para anggota parlemen di kawasan ASEAN harus turut berpartisipasi dalam menyukseskan integrasi regional dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terakomodasi. Selain itu, sesama anggota ASEAN, masing-masing negara harus saling menghargai kekayaan dan ragam budaya.

“Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara ASEAN telah mencapai beberapa hal, diantaranya

adalah diratifikasinya UN *Convention* mengenai isu korupsi oleh Parlemen Myanmar. Dalam isu sosial-ekonomi, Parlemen Indonesia sangat mendukung pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta terciptanya komunitas ekonomi ASEAN yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain itu, pentingnya sektor usaha dan menghormati hak-hak asasi manusia demi kesejahteraan masyarakat,” jelas Marzuki pada Sidang Pleno Pertama, di Empire Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Kamis (19/09).

Delegasi dari DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie, didampingi

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua BKSAP Surahman Hidayat (F-PKS), dan Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya (F-PAN).

Selain itu, Anggota BKSAP yang ikut serta adalah Atte Sugandi (F-PD), Okky Asokawati (F-PPP), Ida Ria Simamora (F-PD), Selina Gita (F-PG), Vanda Sarundajang (F-PDIP), Muhammad Oheo Sinapoy (F-PG), Iskan Qolba Lubis (F-PKS), Nazarudin Kiemas (F-PDIP), dan Marwan Ja’far (F-PKB).

Sidang Umum ini juga dihadiri oleh sepuluh Parlemen Anggota AIPA yaitu; Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia,

Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Selain itu, hadir pula tujuh Parlemen Observers, diantaranya Belarus, Kanada, China, Parlemen Eropa, India, Jepang, dan Federasi Rusia. Sedangkan, dari *Guest of the Host* yakni; hadir Perwakilan *Secretary General of ASEAN*; *Vice Secretary General of IPU*; *Representative of ASEAN-WEN*; dan *Representative of Special Adviser for UN on the prevention of Genocide*.

Wujudkan Kemajuan Kawasan

Sidang Umum ke-34 AIPA secara resmi dibuka oleh Perdana Menteri Brunei Darussalam Sultan Hassan Bolkiah pada 19 September 2013. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa masyarakat ASEAN harus bekerjasama demi kemajuan kawasan. Selain itu, perlu adanya dukungan dari Parlemen anggota AIPA dalam upaya menjaga kestabilan dan keamanan kawasan secara berkelanjutan.

Pada Sidang *Executive Committee* yang dipimpin oleh Presiden AIPA, Delegasi DPR RI mengajukan dua tambahan agenda untuk Komite Ekonomi, dan satu agenda tambahan untuk Komite Sosial. Agenda *"The Role of AIPA in Response to the Challenges of ASEAN Economic Community"* dan *"The Role of AIPA in the Promotion of Human Rights in Business Sector"* menjadi usulan di Komite Ekonomi. Sementara untuk Komite Sosial, Delegasi Indonesia mengajukan tema *"Role of AIPA in Advancing the Post 2015 Development Agenda"*.

"Tema dalam sidang kali ini adalah bagaimana kita merealisasikan komunitas ASEAN 2015. Nah, dalam konteks itu ada beberapa hal yang kami sampaikan. Dalam bidang ekonomi ada dua proposal, sedang dalam bidang sosial ada satu yang kita sampaikan. Kita tidak menyadari bahwa ASEAN punya pasar yang besar, kita hanya berbicara pasar di 2015. Padahal, saat itu terjadi arus besar barang, arus jasa dan sebagainya. Kita tidak sadar bahwa kita akan menjadi pasar sangat

potensial," jelas Marzuki.

Menanggapi usulan ini, delegasi Brunei, Singapura, Myanmar, dan Kamboja menyatakan bahwa usulan yang diajukan Indonesia memang penting, namun diperlukan waktu yang lebih panjang untuk mempertimbangkan proposal tersebut. Sementara itu, beberapa negara menyarankan untuk membahas ketiga Draft Resolusi tersebut pada Sidang AIPA ke-35 pada tahun mendatang.

Delegasi Indonesia mendapatkan dukungan dari Delegasi Malaysia, Thailand dan Vietnam. Delegasi Malaysia menilai, apabila pembahasan usulan ini ditunda sampai tahun depan, akan sangat terlambat. Pasalnya, ASEAN Community akan diimplementasikan dalam waktu kurang dari 2 tahun mendatang.

Dalam sidang ini, Marzuki juga menyampaikan bahwa AIPA harus menyadari target bersama dalam implementasi ASEAN Community. Jangan sampai ASEAN pada akhirnya hanya dimanfaatkan oleh negara lain sebagai pangsa pasar potensial.

"Juga mengenai HAM dan bisnis, kita harus menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam konteks bisnis, sehingga menciptakan ketidakadilan antara pengusaha dan masyarakat. Kita juga harus memikirkan banyak hal mengenai target pembangunan pasca 2015, akan kemana ASEAN melangkah," imbuh Politisi Demokrat ini.

Kesehatan Ibu dan Anak

Salah satu agenda dalam Sidang Umum ke-34 AIPA adalah Sidang *Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)*. Tema yang diangkat yakni Rancangan Resolusi pada Pembinaan kesehatan Ibu dan Anak di ASEAN.

Delegasi Indonesia diwakili Anggota BKSAP DPR Okky Asokawati, Vanda Sarundajang, Selina Gita dan Ida Ria Simamora. Dalam sidang, Ida Ria mengusulkan adanya satu pen-

guatan untuk MDGs yang ke-4 dan ke-5 yang menangani kesehatan ibu dan anak. Selain itu, ia mengusulkan bahwa AIPA sendiri harus memberikan perhatian yang optimal kepada masalah kesehatan ibu dan anak.



Ketua DPR RI Marzuki Alie memberikan cinderamata kepada Presiden AIPA ke-34.

"Kita tekankan bahwa substansinya ibu dan anak harus diprioritaskan. Kita juga menargetkan masalah kesetaraan dibahas dalam rapat. Jadi tidak ada perbedaan, dimana fokusnya wanita dan anak-anak diberikan perhatian khusus masalah kesehatan," ujar Politisi yang juga menjabat Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Politisi Demokrat ini menegaskan bahwa kesetaraan gender ini adanya keadilan bukan hanya pada kesehatan, tetapi juga penyakit-penyakit yang *communicable* dan jenis penyakit yang sulit disembuhkan. Selain itu, ia juga mengusulkan untuk ibu dan anak agar diberikan fasilitas, baik sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur untuk menciptakan hidup yang sehat.

"Kita inginkan ada kesepakatan di antara Member of Parlemen ASEAN agar lebih memperhatikan kesehatan ibu dan anak. Kita targetkan dari beberapa peserta memberikan masukan yang arahnya menyetujui usulan ini. Resolusi ini juga akan kita bawa ke forum lagi, dan akan digabungkan dengan beberapa resolusi lain diantaranya masalah politik, ekonomi dan sosial budaya," jelas Politisi asal Jawa Timur ini.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat dan Anggota BKSAP Muhammad Oheo Sinapoy.

Usulan ini mendapat respon positif dan dukungan dari delegasi negara lain. Bahkan, ini merupakan salah satu terobosan di Sidang WAIPA dalam rangka mendapatkan standar hidup yang baik untuk fokus hidup yang sehat.

Peningkatan Kerjasama

Delegasi DPR RI telah berpartisipasi aktif dalam setiap persidangan baik dalam Sidang-sidang Komisi, diantaranya Sidang Komisi Politik, Ekonomi, dan Sosial. Selain itu, Delegasi Indonesia juga ikut serta pada *Joint Communiqué* maupun *Dialogue With Observers*.

Pada sesi dialog dengan *Observers*, Delegasi DPR RI berpartisipasi aktif dan menyampaikan kepentingan Indonesia dalam pertemuan yang dilaksanakan secara paralel. Dialog berlangsung dengan beberapa negara, diantaranya Belarus, Kanada, China, India, Jepang, dan Rusia.

Dalam dialog dengan Parlemen India, Anggota BKSAP DPR Andi Anzhar Cakra Wijaya menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan India telah terjalin selama 60 tahun. Ia berharap, pertemuan ini dapat lebih meningkatkan kerjasama India dengan negara-negara anggota AIPA.

"Sampai saat ini, setidaknya ada 40 perusahaan India yang berinvestasi di sektor pertambangan di

Indonesia. India juga merupakan importir terbesar untuk produk CPO Indonesia. Semoga kerjasama ekonomi antara kedua negara dapat terus ditingkatkan. Indonesia dan India harus terus bekerjasama dalam mempromosikan demokrasi dan dalam hal pemberantasan korupsi," jelas Andi Anzhar.

Sahkan 26 Resolusi

Sidang Umum ke-34 AIPA di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah menghasilkan tujuh *Report Sidang*, *Joint Communiqué* dan 7 Resolusi, dimana 2 resolusinya merupakan usulan Indonesia. Selain itu, sidang telah mengesahkan 26 Resolusi, terkait bidang Politik dan WAIPA masing-masing sebanyak 1 resolusi, 2 resolusi di bidang Ekonomi, Sosial 3 resolusi, dan Organisasi sebanyak 19 resolusi.

Di bidang Politik, para anggota parlemen AIPA mendukung pembentukan ASEAN Political Security Community yang dapat menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan serta meningkatkan kontribusi untuk merealisasikan APSC. Isu-isu keamanan regional saat ini semakin luas, sehingga dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi aktif dari seluruh negara di kawasan dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan ASEAN *awareness* baik di tingkat regional maupun nasional dan meningkatkan hubungan antar masyarakat.

Negara anggota AIPA menyadari bahwa sektor UKM di ASEAN masih mengalami kesulitan terutama dalam hal pendanaan dan pengadaan modal. Sektor UKM perlu dikembangkan dengan dukungan dari berbagai pihak, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam *ASEAN Economic Community Blueprint*. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing ASEAN, termasuk dengan melibatkan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi yang diupayakan oleh ASEAN harus berkelanjutan dengan mengedepankan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Dalam menyambut pembentukan *ASEAN Economic Community*, diperlukan peran serta dan kontribusi aktif dari generasi muda, terutama dalam hal pembentukan lapangan kerja baru melalui kewirausahaan. Pemerintah harus mempromosikan peningkatan kreatifitas generasi muda untuk mengurangi angka pengangguran.

Pada bidang sosial, anggota AIPA harus mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan/jaminan sosial bagi masyarakat. Banyak negara ASEAN yang sudah menunjukkan kemajuan dalam mencapai MDGs, namun masih banyak yang harus diperbaiki. Diperlukan partisipasi aktif baik dari sektor pemerintah maupun institusi legislatif untuk menghentikan praktek *child trafficking*, pornografi, dan prostitusi yang melibatkan anak-anak. Salah satu upaya yang diperlukan adalah dengan memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku kejahatan.

Sidang Umum ke-35 AIPA direncanakan akan diselenggarakan di Vientienne, Lao PDR pada tanggal 14-20 September 2014. Palu AIPA diserahkan oleh Mr. Pehin Dato Hj. Judin Hj. Asar selaku tuan rumah kepada Ketua Delegasi Lao PDR yang akan menjadi the Incoming 35th AIPA President. (hr,sf) Foto: eka hindra/parle.



RACHEL AMANDA AURORA

Deg-degan Nyoblos Pertama Kali

Bukan tidak bersyukur atas karir yang telah diraihinya di dunia hiburan tanah air, namun bintang sinetron plus penyanyi yang terkenal dengan lagu religi bertajuk "Alhamdulillah" bersama Opick ini memilih untuk lebih mengutamakan pendidikan sebagai jembatan

dalam meniti masa depannya kelak. Kepada Rahayu Setiowati dari Parle, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini berbagi kisah.

Berhadapan dengan kamera bukan hal yang asing bagi pemilik

nama lengkap Rachel Amanda Aurora. Sejak usia 2,5 tahun Manda, begitu ia biasa disapa sudah terbiasa dengan sorotan lampu kamera. Padahal diakuinya, semua berawal dari sebuah kebetulan.

"Dulu tante aku kerja di sebuah



perusahaan advertising, saat itu lagi bikin iklan. Tiba-tiba model anak kecilnya ngga bisa, jadinya aku yang gantiin diajak tante aku. Karena dulu aku kan gendut jadi lucu," kisahnya.

Ketika lensa kamera di arahkan ke wajahnya, dengan sikap centilnya Manda pun langsung bergaya. Tak ayal hal itu langsung membuat Manda untuk pertamakalinya *didapuk* sebagai model iklan cilik.

Dari sana tawaran untuk membintangi iklan berbagai produk Indonesia pun berdatangan kepadanya. Hingga kemudian Manda mendapat kesempatan untuk berakting dalam sebuah sinetron Wajah Penuh Cinta. Disusul dengan sinetron lainnya seperti Dewi Fortuna, Indera Keenam, Belaian Sayang, Saling Memiliki, Tersanjung 6, Papaku Keren-keren, Nirmala, Kejora dan Bintang, serta sinetron Candy. Di

sinetron terakhir inilah yang kemudian semakin melambungkan nama Manda.

Manda tak hanya didapuk pada peran-peran dalam sinetron, gadis kelahiran 1 Januari 1996 ini pun di daulat untuk membintangi berbagai judul film layar lebar seperti Heart, I Love You, Om..., Kata Maaf Terakhir dan Film Paddle Pop Kombatei The Movie meski hanya berakting suara menjadi Liona.

Tak puas hanya berakting, Manda pun menjajal kemampuan vokalnya, ia pun berduet dengan Opick melantunkan lagu religi berjudul Alhamdulillah. Tak dinyana lagu ini mendapat sambutan yang sangat baik dari pecinta musik tanah air. Bahkan dari lagu ini pun tawaran off air terus berdatangan kepada Amanda. Juni 2009 lalu Manda kembali digandeng penyanyi Opick

untuk berduet menyanyikan lagu Maha Melihat.

Dari kiprahnya di dunia *acting* dan tarik suara itu, beberapa penghargaan pun diraih manda, diantaranya sebagai Penyanyi Anak Terbaik dalam ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2005. Manda pun sempat mendapat Nominasi MTV Indonesia Movie Award untuk Kategori Breakthrough Actress.

Utamakan Pendidikan

Sukses di layar kaca dan panggung hiburan tanah air, tak lantas membuat putri pasangan Ade Paul Lukas dan Safira ini mengadopsi ungkapan Aji mumpung. Manda lebih mengutamakan pendidikan dibanding aktivitasnya di dunia hiburan.

"Aku syuting atau show pasti setelah pulang kuliah atau weekend,"aku gadis berzodiak Capricorn ini.

Bahkan saat persiapan mengikuti Ujian Nasional awal tahun 2013 ini, Manda rela mengurangi job di dunia entertainment. Itu dilakukannya agar lebih fokus dalam menghadapi UN dan tidak kecewa dengan hasil yang akan di dapatnya.

"Alhamdulillah, nilai UN ku lumayan baik. Walau aku belum mendapat kesempatan untuk kuliah di fakultas kedokteran, namun aku bersyukur mendapat kesempatan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat di UI," ujarnya.

Kekecewaan memang tampak di wajah Manda, maklum sejak kecil Manda memang bercita-cita ingin menjadi dokter anak. Bahkan ia sangat mengidolakan seniornya Lula Kamal dan Tompi yang meski terkenal menjadi selebriti dengan seabrek aktivitasnya di panggung hiburan namun masih bisa menolong sesama lewat profesinya sebagai dokter.

Walaupun demikian, hal itu tak mengurangi rasa syukur Manda dengan



apa yang sudah diraihinya saat ini. Karena tidak banyak orang yang berkesempatan mengenyam bangku kuliah di Universitas Indonesia. Lewat Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa menjadi jalan baginya untuk bisa mengabdikan diri pada masyarakat.

Lebih jauh Manda berharap dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ia bisa menjadi seorang Menteri Kesehatan. Walaupun diakuinya sampai sekarang kebanyakan menteri kesehatan selalu berlatar belakang pendidikan di bidang kedokteran.

"Sebenarnya kan Fakultas Kesehatan malah lebih mengena ke masyarakat. Bagaimana cara menyebarkan tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh kesehatan kepada masyarakat luas, termasuk di daerah-daerah terpencil agar seluruh masyarakat Indonesia sehat. Jadi kami ini yang manage hal tersebut. Sementara kalau latar belakang kedokteran kan lebih cenderung bergelut dengan hal-hal medis. Yah, semoga saja kelak



aku bisa menjadi menteri kesehatan pertama yang berlatar belakang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, bukan dokter,” harap Manda.

Tidak sekedar berandai-andai atau harapan semu, guna melengkapi dan mempersenjatai diri jika kelak dewi fortuna menghampirinya dan ia di dapuk menjadi menteri kesehatan, Manda akan terus mencoba mewujudkan cita-cita lamanya menjadi seorang dokter. Namun, jika kelak hal tersebut tidak jua terwujud, ia akan terus bertekad untuk peduli terhadap kesehatan masyarakat secara umum.

Tahun 2014 Pemilu Pertama Untuknya

Seiring dengan bertambahnya usia, tak hanya penampilan Manda saja yang berubah. Selain tambah cantik dengan sentuhan make up tipis di wajahnya, pola pikir Manda pun berkembang. Sedikit banyak Manda mulai berpikir tentang negara dan bangsa.

Bahkan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan pada 2014 mendatang, Manda mulai mencari tahu tentang siapa yang terbaik dan layak memimpin negeri ini, baik tokoh maupun partainya. Ia lebih memilih mencari tahu lewat pemberitaan di media massa tentang tokoh tersebut, ditambah dengan biografi yang bersangkutan. Ia tidak ingin termasuk dalam “Golput”. Baginya itu merupakan hak nya sebagai warganegara untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan amanah bagi rakyat, bangsa dan negaranya.

“Iya, tahun 2014 nanti untuk pertamakalinya aku ikut memilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Jujur, deg-degan juga sih nyoblos pertama kali. Saat ini aku belum menemukan dan menentukan kandidat yang terbaik untuk aku pilih, baik partainya atau pun orang-orangnya. Lagian kandidatnya juga belum ditetapkan secara resmi,” papar Manda.

Namun alumni SMAN 70 Jakarta itu mengaku belum terfikirkan untuk ikut kampanye salah satu partai atau kandidat calon presiden, maupun terjun langsung dalam politik praktis. Ia beralasan, jika ia ikut berkampanye mengusung salah satu kandidat, maka jika kelak ternyata kandidat yang pernah diusungnya itu tidak amanah, ia akan merasa berdosa dan salah pilih.

Bahkan sekalipun untuk mengikuti kampanye dari rekan sesama artis yang kelak juga akan mencalonkan

“Tidak semua artis yang berpolitik itu memiliki kemampuan dan pengetahuan politik yang baik. oleh karena itu aku akan berpikir matang-matang jika teman sesama artis itu mengajak aku untuk ikut kampanye. Tapi ya lihat saja nanti,” jelas Manda.

diri baik sebagai anggota legislatif maupun calon presiden, Manda akan berpikir matang untuk hal itu.

“Tidak semua artis yang berpolitik itu memiliki kemampuan dan pengetahuan politik yang baik. oleh karena itu aku akan berpikir matang-matang jika teman sesama artis itu mengajak aku untuk ikut kampanye. Tapi ya lihat saja nanti,” jelas Manda.

Khusus untuk dirinya sendiri, Manda mengaku hingga saat ini belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang politik, oleh karena itu merasa belum tertarik untuk ikut terjun ke dunia politik.

“Hingga saat ini aku merasa belum memiliki pengetahuan dan kemampuan politik yang baik. Gampangnya begini deh, aku aja belum baik sekali urusin diri sendiri, bagaimana bisa urusin oranglain, bahkan urusin Negara. Ini bukan hal yang mudah lho. Yang pasti semoga tahun 2014 nanti saya tidak salah pilih,” ungkapnya.

Terlepas dari itu semua, Manda berharap pilihannya di tahun 2014 mendatang menjadi pilihan terbaik untuk bangsa dan Negara, yang akhirnya bisa membawa bangsa ini menjadi Negara yang lebih maju lagi. (Ayu)

PARTOGI NAINGGOLAN

PROFESOR RISET PERTAMA SETJEN DPR



Tekun, semangat dan konsisten. Itulah yang ditunjukkan sosok Poltak Partogi Nainggolan-peneliti dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Berkat ketekunannya itu pria yang lahir tanggal 26 Juni 1963 di Jakarta, pada Rabu (18/09) dikukuhkan sebagai profesor riset.

Ia dikukuhkan di hadapan Sidang Majelis Profesor Riset dipimpin Ketuanya Prof. Dr. Lukman Hakim yang juga Kepala Lipi setelah menyampaikan Orasinya berjudul ; Parlemen dan Hubungan Internasional: Diplomasi DPR-RI di Fora Internasional. Sejumlah undangan hadir diantaranya beberapa anggota DPR, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Sekjen MPR , sejumlah akademisi dari dalam dan luar negeri serta undangan lainnya digelar di Gedung Nusantara V Senayan, Jakarta. Acara berlangsung khidmat dan lancar hingga seluruh rangkaian acara termasuk pemasangan Widyamala serta penyerahan sertifikat kepada Prof Poltak Partogi Nainggolan.

Apresiasi kepada professor riset pertama di jajaran Setjen DPR ini ditunjukkan anggota DPR Indah Kurnia. Ia mengaku bangga ternyata di Setjen DPR telah muncul seorang Profesor Riset Partogi Nainggolan. " Kita akan meneladani seorang anak bangsa yang konsisten dan komit terhadap bidang yang digelutinya. Bagaimanapun dia memberikan *support* terhadap kegiatan bidang tugas Komisi maupun BURT," katanya

Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan selamat kepada Partogi dan mengharapkan menjadi teladan dan menjadi semangat bagi kita semua

khususnya teman-teman sekerja di P3 DI. Selain itu, sosok Prof. Partogi bisa menjadi pendorong yang efektif serta berkualitas bagi kinerja DPR-RI. " Prof. Partogi adalah sosok yang sangat komit dan konsisten di bidangnya dan staf pendukung yang baik bagi DPR," ungkap anggota BURT ini.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti saat memberikan sambutan pada acara ini. Ia mengatakan, pencapaian gelar sebagai profesor riset dari pusat pengkajian DPR bukanlah hal yang mudah sebab upaya tersebut dilakukan di tengah berbagai tugas yang diemban

peneliti dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan.

Diperjuangkan Maksimal

Pada acara pengukuhan profesor riset ini, Poltak Partogi Nainggolan menegaskan bahwa diplomasi parlemen untuk kepentingan nasional harus diperjuangkan secara maksimal seperti lazimnya dilakukan para diplomat karir Kementerian Luar Negeri. "Sehingga dengan kehadiran parlemen di fora internasional terdapat fungsi representasi dan proteksi kepentingan negara," tandas peneliti yang juga aktif dalam Perhimpunan Akademisi/Peneliti Asia Tenggara *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg* dari tahun 2010 hingga saat ini.

Lebih lanjut Profesor Riset menjelaskan, berbagai bentuk diplomasi bilateral parlemen yang tidak terbatas pada kegiatan saling kunjung melainkan juga dilakukan di sela-sela berlangsungnya forum multilateral.

"Kinerja diplomasi parlemen telah banyak memberikan capaian kinerja yang membanggakan," kata Profesor Riset yang sebelumnya menyelesaikan pendidikan S2nya di Universitas Birmingham, Inggris tahun 1999 dan pendidikan S3nya di Universitas Freiburg, Jerman tahun 2011 tersebut seraya menjelaskan bahwa diplomasi parlemen yang dilakukan di sela-sela berbagai forum multilateral misalnya mampu membuat sikap anti-Indonesia yang menyudutkan kepentingan nasional tidak meluas pada saat isu mengenai Santa Cruz, Timor Timur bergulir.

Diungkapkan Partogi, diplomasi parlemen telah berulang kali membela kehormatan bangsa. Sebagaimana dilakukan Komisi I dan BKSAP yang dipimpin Abdul Ghafur yang berinisiatif mencari tahu nasib TKI yang dilaporkan disiksa. Selain itu, Komisi I DPR-RI dengan TNI AL yang menggunakan strategi *gun boat diplomacy* yang berhasil mencegah aksi kapal perang Malaysia mengganggu lebih lanjut upaya pekerja Indonesia membangun

mercusuar di atas pulau karang yang diperebutkan yaitu Ambalat.

"Aksi diplomasi seorang diri Sutradara Gintings di Kamboja pada saat acara makan malam dimana Anggota Komisi I sekaligus anggota BKSAP DPR-RI menyanyikan lagu "Rasa Sayange" mendahului delegasi Malaysia sehingga mereka mengurungkan niat menyanyikan lagu yang selama ini telah diklaim sebagai lagu negaranya," papar peneliti yang juga sempat mengenyam pendidikan *International Leadership di US State Department/US Congress* ini menjelaskan.

Anggota parlemen Indonesia, tambah Partogi, harus memiliki keinginan yang tinggi untuk dan mampu berkompetisi secara sehat memimpin organisasi-organisasi perlemen internasional dan berperan besar dalam menentukan kebijakan dunia, tidak lagi sebagai pembawa pesan biasa di panggung internasional.

Karenanya, mereka harus dapat meningkatkan kapasitas, penampilan dan kinerja individual mereka. Hambatan kultural, seperti sungkan dan kurang inisiatif dalam menyampaikan pendapat, harus ditinggalkan, diganti dengan sikap yang memiliki pencapaian target. Sehingga diplomasi parlemen di dunia internasional tidak lagi untuk tujuan pencitraan yang semakin banyak menciptakan paradoks di dalam negeri, yakni sebagai kegiatan yang berbiaya tinggi tetapi hasilnya minim, melainkan memiliki target tertentu yang rasional.

Masalah-masalah di dalam, seperti konflik DPR-RI dengan DPD, dan juga perbedaan pandangan di antara individu anggota parlemen, harus diselesaikan lebih dulu sebelum mereka menghadiri fora internasional. Yang lebih penting lagi, anggota Delegasi DPR-RI harus memahami kepentingan nasional yang harus dicapai.

Di dalam, di antara para aktor diplomasi internasional boleh ter-



dapat perbedaan pendapat, namun keluar, di arena internasional, pandangan yang satu harus ditunjukkan. Sebab yang dihadapi adalah lawan bersama yang harus ditaklukkan, dipengaruhi atau dapat diajak kerja sama untuk mendukung kepentingan Indonesia.

Representasi dan Proteksi

Sekjen DPR menambahkan, setelah kita menyimak orasi ilmiah yang disampaikan Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA, semakin jelaslah bagi kita bahwa kehadiran parlemen di fora internasional memiliki fungsi representasi dan proteksi kepentingan negara. Parlemen telah mengambil peran yang penting dalam melakukan diplomasi damai untuk kepentingan nasional.

Selain itu, berbagai bentuk diplomasi bilateral parlemen yang tidak terbatas pada kegiatan saling kunjung melainkan juga dilakukan di sela-sela berlangsungnya forum multilateral telah banyak memberikan capaian kinerja yang membanggakan. Bahkan, beberapa anggota DPR-RI yang memiliki kapasitas tinggi dalam berdiplomasi di kancah internasional, dengan kemampuan mereka, selain mampu mempengaruhi berbagai forum sidang internasional, juga mampu menduduki yang posisi strategis dalam forum tersebut.

Berbagai capaian kinerja DPR-RI dalam diplomasi parlemen di fora internasional tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Pada titik inilah kita melihat pentingnya riset berkenaan dengan Parlemen dan Hubungan Internasional. Hal ini juga menunjukkan betapa kita memerlukan tenaga-tenaga peneliti yang mumpuni, memiliki integritas akademik yang kuat, dan sensitif terhadap berbagai kondisi yang ada dalam hubungan dunia internasional sehingga mampu memberikan masukan yang berharga kepada parlemen dalam upaya meningkatkan kinerja dalam bidang diplomasi parlemen. Sebagaimana dinyatakan Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA,



Suasana sidang Majelis Profesor Riset di Gedung Nusantara V.

keterbatasan penguasaan informasi merupakan salah satu kelemahan dalam diplomasi parlemen, selain kecakapan yang terbatas.

Sekjen DPR yang akrab disapa Win ini menyampaikan penghargaan kepada para peneliti pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI yang selama ini telah memberikan kontribusi yang berharga dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan. P3DI merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian, pengolahan data, dan informasi perkembangan DPR RI. Salah satu tugas tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pengkajian, yang terdiri dari para pejabat fungsional peneliti yang mempunyai fungsi penyelenggaraan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan masalah kedewanan.

Pada awal berdiri, P3DI baru memiliki peneliti sebanyak 16 orang. Dalam perjalanannya, seiring dengan permintaan data dan kajian yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan dari periode per periode DPR, jumlah peneliti Bidang Pengkajian terus bertambah. Penambahan secara resmi dan dalam jumlah besar-besaran dilakukan setelah adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jumlah peneliti hingga saat ini adalah 82 orang, 6 orang di antaranya telah memiliki tingkat pendidikan S-3 atau bergelar Doktor, dan 11 orang peneliti lainnya saat ini sedang menempuh pendidikan S-3.

Berbagai peran para peneliti P3DI selama ini terkait dengan upaya pemberian dukungan keahlian kepada Dewan di antaranya dilaksanakan dengan melakukan penelitian dan pengkajian atas berbagai topik yang relevan dengan perkembangan kedewanan untuk dijadikan sebagai usulan kepada Alat-alat Kelengkapan Dewan dalam rangka membahas dan memproses berbagai kebijakan legislatif dengan pemerintah. Para peneliti juga terlibat secara intensif dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang serta terlibat langsung dalam pembahasan undang-undang. Selain itu para peneliti juga memberikan dukungan dalam berbagai tim kerja yang dibentuk oleh DPR dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

“Saya berharap agar ke depan, kontribusi para peneliti dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dapat terus ditingkatkan. Upaya untuk menjalin komunikasi dengan DPR sebagai *user* juga perlu ditingkatkan, sehingga apa yang telah dihasilkan oleh peneliti, baik hasil penelitian, hasil kajian, maupun produk berupa buku-buku dapat secara langsung dimanfaatkan oleh DPR, baik sebagai sebuah institusi maupun Anggota DPR sebagai pribadi. Untuk itu perlu kiranya kita membangun sebuah sistem terpadu yang memungkinkan Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan dapat mengakses secara lebih cepat produk yang telah dihasilkan oleh para peneliti P3DI,” demikian Win menegaskan. (mp)

Foto risiko/parle.

WARNA WARNI RAPAT TIM PENGAWAS BANK CENTURY



Rapat-rapat yang digelar Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR dengan mitra kerja selalu ramai dan mendapat sambutan antusias masyarakat dan kalangan pers. Apalagi bilamana Timwas mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk didengar *progress report* sebagai institusi yang diberi kepercayaan menangani kasus Century dengan kerugian mencapai Rp 6,7 triliun.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ketika membuka rapat pada Rabu (11/9) lalu menyebutkan bahwa Timwas termasuk tim paling lama bertugas, telah bertugas 2 tahun lebih sementara timwas lain paling lama setahun. "Apapun yang terjadi progress tetap ditunggu selanjutnya akan dilaporkan ke sidang paripurna," ungkapnya.

Setelah menyampaikan pidato pengantar, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memberikan kesempatan kepada Ketua KPK Abraham Samad untuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan kasus Bank Century. Namun belum sempat Samad berbicara, dipotong interupsi oleh anggota Timwas dari Fraksi PD Sutan Bhatoegana yang juga Ketua Komisi VII DPR.



Sejumlah anggota Timwas Century DPR

dihadapi KPK, meski tidak disampaikan secara tertulis. Lalu dia mengutip lirik lagu yang diciptakan Sunan Kalijaga, sepenggal liriknya dilantunkan untuk menunjukkan betapa berat tugas yang diemban KPK.



Sutan Bhatoegana.

"Saya tidak mengajukan protes tetapi mau mengundurkan diri sementara sebab saat yang bersamaan Komisi VII menggelar rapat dengan SKK Migas, mohon ijin ya," ujar Sutan. Namun permohonan ijin Sutan ditanggapi Priyo dengan mengatakan "

Ternyata Pak Sutan lebih memilih memimpin rapat SKK Migas untuk diselamatkan, ketimbang rapat Timwas Century. Saya tanya kepada Pak Sutan, lebih memilih penyelamatan Bank Century atau penyelamatan yang lain," ungkap Priyo yang disambut tawa seluruh hadirin.

Dengan gayanya yang khas diwarnai humor, politisi senior Partai Demokrat ini mengatakan " Saya memilih kedua-duanya, Bank Century penting, tetapi masalah energi juga penting. Bayangkan saja, kalau dua jam saja tanpa energi bisa meninggal. " Untuk menjaga supaya tidak ada mati listrik saya harus ke rapat dengan SKK Migas," tandas Sutan sembari keluar ruangan.

Suasana makin hangat ketika politisi PDI Perjuangan Prof. Hendrawan Supratikno mengatakan, dirinya menanggapi nuansa beban yang luar biasa yang sedang

Cah angon.... Cah angon... penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot iro. Artinya, gembala-gembala, tolonglah naik pohon blimbing itu meski sangat licin naiknya, karena itu untuk kehormatan kita.

Menurut Hendrawan, kehormatan kita yang menjadi pertarungan kita bukan hanya KPK, tetapi juga kehormatan DPR dan juga kehormatan semua lembaga yang telah bekerja dengan baik. BPK, Kepolisian termasuk Tim Pengendali Aset tiga kementerian dan lainnya. "Jadi saya merasakan beban itu, juga saya sampaikan tanggal 21 Nopember 2012 bahwa Pak Boediono memiliki peran dalam kasus ini," katanya.

Lalu kata Hendrawan, pernyataan KPK tanggal 20 Nopember " Telah ditemukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian FJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tanggal 27 Pebruari 2013 laporan KPK menyebut keterlibatan BM dan kawan-kawan (dkk)". Untuk menyebutkan dkk itu perlu waktu 3 bulan. Untuk memeriksa Sri Mulyani di New York akhir April- awal Mei, perlu waktu 3 bulan lagi.

Kemudian untuk menggeledah kantor BI juga perlu waktu 3 bulan, kini diperlukan waktu 3 bulan lagi, untuk membuat kesimpulan sangat datar. "Semakin menguatkan dugaan. Hanya berputar di-kata kata dugaan. Kehormatan kita yang dipertaruhkan..... Akhirnya Timwas memperpanjang masa tugas untuk tetap mengawal kasus Bank Century hingga akhir masa jabatan Oktober 2014. (mp) Foto: iwan armanias/parle.

Bung PARLE

HARGA
BAHAN BAKAR MINYAK
DAN GAS BUMI KOK
NAIK TERUS YA ?

YA...MUNGKIN KARENA
MIGAS KITA DIKUASAI ASING
AKIBAT ADANYA LIBERALISASI
MIGAS DI INDONESIA NON ...

WADUH...KITA DAPAT APA DONG ?
KALAU SUMBER DAYA ALAM YANG
MERUPAKAN HARTA KEKAYAAN NEGARA YANG
SEHARUSNYA BUAT MENSEJAHTERAKAN
RAKYAT DIKUASAI ASING ?

DAPAT AMPASNYA
KALI BU !!

BETUL
BRO...

MAKANYA SEKARANG WAKIL
KITA DI DPR SEDANG MENDORONG ADANYA
REVISI UU MIGAS SEBAGAI TOLOK UKUR
PERUBAHAN TATA KELOLA MIGAS MENUJU
KEDAULATAN ENERGI INDONESIA...

SIIP !!!
SEMOGA RAKYAT
DAN BANGSA
INDONESIA BISA
LEBIH MAJU DAN
SEJAHTERA YA
BUNG !!